

LAPORAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2020

JUDUL

**PENGEMBANGAN PROSPEKTUS PRODI MANAJEMEN
PENDIDIKAN ISLAM (MPI) UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG MENUJU *WORLD CLASS UNIVERSITY* (WCU)**

**PENELITIAN AFIRMATIF PENGEMBANGAN TATA KELOLA
PROGRAM STUDI**



Oleh:

Dr. H. Mulyono, MA. NIP. 199606262005011003 (Ketua Peneliti)
Dr. M. Fahim Tharaba, M.Pd. NIP. 19801001 200801 1 016 (Wakil Ketua)
Dr. Muhammad Walid, MA. NIP. 197308232000031002 (Anggota)
Dr. Nurul Yaqien, S.Pd.I., M.Pd.I. NIP. 19781119 200604 1 002 (Anggota)
Walid Fajar Antariksa, M.M. NIP. 198611212015031003 (Anggota)
Fantika Feby Puspitasari, M.Pd. NIP. 199202052019032015 (Anggota)
Muhammad Amin Amrullah, M.Pd. (Anggota)

KEMENTERIAN AGAMA
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
THE DEVELOPMENT OF UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PHASE II EAST JAVA PROJECT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020

PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PROGRAM

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H. Mulyono, MA.**
NIP : 19660626200501 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/Lektor Kepala/IVb
Bidang Keahlian : Manajemen Pendidikan
Fakultas/Jurusan : FITK/Manajemen Pendidikan Islam
Jabatan dalam Program : Ketua Pengusul

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya sanggup menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil maksimal pada tanggal 30 November 2020.
2. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan kami belum menyerahkan laporan hasil, maka saya sanggup mengembalikan dana hibah yang telah saya terima.

Malang, 30 November 2020

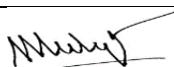


Dr. H. Mulyono, MA.
NIP.196606262005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Program Penelitian Afirmatif Pengembangan Prodi dan Kelembagaan Penelitian dengan judul: “*Pengembangan Prospektus Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju World Class University (WCU)*” ini disahkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal 30 November 2020

Ketua		
Nama	:	Dr. H. Mulyono, MA.
NIP	:	196606262005011003
Tanda tangan	:	
Wakil Ketua		
Nama	:	Dr. Fahim Tharaba, M.Pd.
NIP	:	19801001 2008011016
Tanda tangan	:	

<p>Direktur PMU UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p> <p><u>Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.</u> NIP. 195503021987031004</p>	<p>Ketua LP2M UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p> <p><u>Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.</u> NIP. 195904231986032003</p>
---	--

Mengetahui,
Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag
NIP. 196210211992031003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dr. H. Mulyono, MA.
NIP	: 196606262005011003
Pangkat/Gol.	: Pembina/Lektor Kepala/IVb
Bidang Keahlian	: Manajemen Pendidikan
Fakultas/Jurusan	: FITK/Manajemen Pendidikan Islam
Jabatan dalam Program	: Ketua Pengusul

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam program ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam karya ilmiah ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana program yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, 30 November 2020
Ketua Pengusul,



Dr. H. Mulyono, MA.
NIP.196606262005011003

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan laporan program dalam bentuk penelitian afirmatif pengembangan prodi dan kelembagaan dengan judul: "Pengembangan Prospektus Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju World Class University (WCU)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw., beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya termasuk kita semua.

Selama melakukan penelitian ini banyak pihak yang telah membantu peneliti. Untuk itu peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. yang telah mendorong segenap sivitas akademika untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan yang mengintegrasikan sains dan Islam.
2. Direktur Project Management Unit (PMU) The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II East Java Project - Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag., Pejabat Pembuat Komitmen PMU, Zainal Habib, M.Hum, beserta seluruh Staf PMU yang telah memberikan dana program ini serta memberikan kemudahan seluruh administrasi kegiatan yang peneliti butuhkan..
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.; Dr. H. Nur Ali, M.Pd., selaku Ketua Unit Penelitian beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk terlibat dalam Program Penelitian Skema Penelitian Pengembangan Program Studi dan Kelembagaan Tahun 2020.
4. Kedua Reviewer Proposal hingga penyusunan akhir laporan, Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. dan Dr. Siti Mahmudah, M.Si serta Komite Penilai, Dr. H. Uril Bahruddin, M.A yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan penelitian ini.
5. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang, Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. dan Dr. Muhammad Walid,

- MA. beserta segenap Pimpinan dan Staff Fakultas yang telah mendorong dan mengizinkan peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian.
6. Semua pihak yang tidak mampu peneliti sebutkan namanya satu-persatu yang telah memberikan bantuan kepada peneliti dalam menggali data di lapangan maupun penyusunan laporan penelitian ini.

Tak lupa peneliti mengharapkan saran kritik dari berbagai pihak, demi sempurnanya penyusunan laporan ini. Teriring doa semoga amal kebaikan Bapak/Ibu/Saudara yang telah disumbangkan kepada peneliti mendapat balasan yang sepadan di sisi Allah Swt. Dan segala jerih payah dan pengorbanan kita dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan setimpal di sisi Allah Swt. *Jazakumullahu Khoiran Katsira.*

Malang, 30 November 2020
Ketua Peneliti,

Dr. H. Mulyono, M.A.
NIP. 196606262005011003

DAFTAR ISI

Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Program	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Orisinalitas Penelitian	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Abstrak	vii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	5
A. Manajemen Pengembangan Kampus Merdeka	5
B. Integrasi Keilmuan sebagai Model pengembangan Kampus di Lembaga Pendidikan dengan Menumbuhkan Pribadi Yang Berkarakter <i>Ulul Albab</i>	10
C. Menumbuhkan Pribadi Yang Berkarakter <i>Ulul Albab</i>	15
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
B. Tahap-tahap Penelitian	22
C. Subjek penelitian	23
D. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Analisis Data	26
F. Keabsahan Data	27
BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN	29
A. Sejarah Singkat Prodi MPI	29
B. Program dan Spesifikasi Prodi MPI	30
C. Visi, Misi, dan Tujuan Prodi MPI	31
D. Bidang kajian Keilmuan/Kurikulum Prodi MPI.....	32
E. Nilai Keunggulan Prodi MPI	48

F. Program pengembangan Prodi MPI	49
G. Capaian Pembelajaran (<i>Learning Outcomes</i>)	49
H. Laporan Hasil Survey Kepemimpinan Unit Pengelola Program Studi	55
I. Laporan Hasil Survey Pelayanan Akademik Dan Sarana Prasarana	59
J. Laporan Hasil Survey Pelaksanaan Ujian Akhir Semester	63
K. Laporan Hasil Survey Pengelolaan Program Studi.....	68
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	75
A. Standar Pendidikan Dan Pengajaran	75
B. Standar Penelitian	111
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	136
D. Rencana Strategis Penelolaan Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (J-MPI)	
.....	153
BAB VI KESIMPULAN	161
DAFTAR PUSTAKA	162
LAMPIRAN LAPORAN PENELITIAN	166

ABSTRAK

Mulyono, M. Fahim Tharaba, Muhammad Walid, Nurul Yaqien, Walid Fajar Antariksa, Fantika Febry Puspitasari, Muhammad Amin Amrullah. “Pengembangan Prospektus Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Menuju World Class University (WCU)”. Penelitian Afirmatif Pengembangan Prodi dan Kelembagaan, 2020.

Key Words: Prospektus, Prodi MPI, WCU

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Menuju World Class University (WCU). Penelitian ini penting dilakukan untuk mendapatkan suatu rumusan rencana kerja atau prospektus yang jelas dan rinci yang bermanfaat bagi pengembangan Program studi MPI di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk menuju *World Class University* (WCU) dan mewujudkan daya saing lulusan.

Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan paradigma alamiah dengan metode penelitian kualitatif. Peneliti sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpul data melalui wawancara, observasi dan dokumen, data dianalisis dengan model interaktif dengan alur tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Model dan implementasi manajemen pengembangan Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu meliputi: (1) Sejarah singkat lembaga/prodi; (2) Program dan spesifikasi lembaga/prodi; (3) Tujuan lembaga/prodi; (4) Bidang kajian lembaga/prodi; (5) Nilai keunggulan yang ditawarkan lembaga/prodi; (6) Kegiatan dan prospek lembaga/prodi; (7) Rekam jejak SDM lembaga/prodi; (8) Surat ijin operasional lembaga/prodi; (9) Prestasi lembaga/prodi; (10) Lembaga kerjasama lembaga/prodi.

Penelitian ini menghasilkan model Perencanaan Strategik Pengembangan Program studi MPI Menuju *World Class University*. Model ini memuat berbagai hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta menyusun kerangka kebijakan serta kebijakan strategis pengembangan Program studi MPI menuju *World Class University*. Prospektus Prodi MPI mewujudkan WCU pada akhirnya bermuara untuk mewujudkan cita-cita besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar dapat melahirkan Profil Ulul Albab yaitu Ulama’ yang Intelek Professional dan atau Intelek Professional yang ulama’ yang mampu berdaya saing di level internasional serta mewujudkan kampus sebagai Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*) sekaligus Pusat Peradaban Islam (*Centre of Islamic Civilization*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan, akan terus berjalan dalam setiap lini kehidupan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Tugas dan tanggung jawab pendidikan, bagaimana perubahan itu menuju peningkatan, bukan hanya mempertahankan stagnasi, atau bahkan perubahan kemunduran. Menurut M. Amien Rais, “perubahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: pertama, konservatif, mengarah pada pelestarian nilai-nilai lama yang sudah mapan, sungguh pun nilai itu irasional; kedua, radikal revolusioner, mengarah pada pencabutan semua nilai sampai akar-akarnya, karena pelestarian nilai lama itu mengakibatkan stagnasi sosial, iptek, dan lainnya, sehingga klasifikasi ini cenderung pada *chance for sake change*, yakni mengubah asal mengubah: ketiga, reformis, mengarah pada perpaduan antara konservatif dan radikal revolusioner, yakni perubahan dan pergeseran nilai dengan berlahan-lahan sesuai tuntutan Rasulullah SAW.” (Abdul Mujib, dkk, 2006: 135-136). Nabi Muhammad SAW. berpesan,

أطلب العلم من المهدى إلى اللحدى

“*Carilah ilmu, mulai lahir, sampai ke liang lahat (mati)*”.

Covid 19 memaksa kita untuk cepat mengadakan perubahan, suka atau tidak, siap atau tidak, kita harus cepat beradaptasi dan mengadakan perubahan secara cepat. Dalam ritual misalnya, dulu imam sebelum memulai jamaah, mengajak untuk merapatkan barisan, yang merupakan kesempurnaan shalat (سووا صفكم فان التصویة الصفعی من)

(تمام الصلة)، dengan adanya covid 19, menjadi beda, ada *social distance*, gimana (ترك) (المفاسد مقدم على الجلب المصالح) “mendahulukan mencegah kamadhoratan dari pada menarik kemaslahatan”, ini jadi beda sama sekali., dst. lha bagaimana agama dan pendidikan menyikapi hal-hal seperti fenomena itu, agar tetep sesuai dengan kosep **الإسلام صالح في كل زمن و مكان**

“*Islam sesuai dengan lokus dan tempusnya*”. Bagaimana Islam mewujudkan nilai utamanya, *eternal* (tidak terbatas waktu), *universal* (tidak terbatas ruang), dan *kosmopolit* (tidak terbatas tempat).

Di sisi lain, pendidikan bertugas untuk memaksimalkan tugas pendidikannya, salah satunya adalah lewat lembaga pendidikan. “Sebagai salah satu lembaga pendidikan, kampus berperan sebagai lembaga yang ikut bertanggungjawab untuk menangkap perubahan yang ada, dan sekaligus sebagai cagar budaya bagi nilai-nilai yang relevan dengan perubahan yang ada” (M. Fahim Tharaba, 2011: 69). Itulah yang mendasari pentingnya posisi kampus sebagai *agent of change*, sekaligus sebagai *agent of conservation*.

Lebih lanjut, kampus juga berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), transfer nilai (*value transfer*), juga berfungsi mempertahankan dan mengembangkan tradisi dan budaya-budaya luhur dalam suatu masyarakat melalui proses pembentukan kepribadian (*in the making personality processes*) sehingga menjadi manusia dewasa yang mampu berdiri sendiri di dalam kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. (M. Fahim Tharaba, 2016: 67)

Berbicara integrasi sains dan Islam, serta moderasi agama, harus difahami bahwa “Agama” dan “Ilmu” merupakan entitas yang menyatu (*integral*) tak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga setiap diskursus tentang metodologi memerlukan sentuhan-sentuhan filsafat. “Tanpa *sense of philosophy* maka sebuah metodologi akan kehilangan substansinya”. Oleh karena itu, perlu visi epistemologis yang dapat menjabarkan secara integral dan terpadu terhadap tiga arus utama dalam ajaran Islam, yaitu: aqidah, syari’ah dan akhlaq. “Kecenderungan untuk memaksakan nilai-nilai moral secara dogmatik ke dalam argumentasi ilmiah hanya akan mendorong ilmu surut ke belakang (*set back*) ke zaman Pra-Copernicus dan mengundang kemungkinan berlangsungnya *inquisi* ala Galileo (1564-1642 M) pada zaman modern ini. Begitu juga sebaliknya bahwa kecenderungan mengabaikan nilai-nilai moral dalam pengembangan ilmu dan teknologi juga akan menjadikan dishumanisme. Hal inilah yang mendasari perlunya paradigma integralisme ilmu”. (Zainuddin, 12 November 2013)

Berkaitan dengan moderasi agama, Mustari (4 September 2020) menyatakan, bahwa “Moderasi beragama (beragama secara moderat) di tengah masyarakat Indonesia yang heterogen merupakan salah satu kebutuhan dasar yang terkait langsung dengan pilar kebangsaan yang telah diperlukan”. Lebih lanjut dia menyatakan “moderasi beragama sebagai landasan berpikir, bersikap dan sebagai rumusan kebijakan seluruh lapisan masyarakat, konsep moderasi beragama merupakan

turunan atau bagian lanjutan dari jaminan persamaan kedudukan warga negara menurut dasar negara dan konstitusi". Mustari (4 September 2020) juga menambahkan "Di Indonesia, jaminan persamaan kedudukan warga negara diatur dalam dasar negara dan konstitusi. Hal tersebut menunjukkan adanya keseriusan negara dalam menjamin persamaan kedudukan warga negara".

Di sisi lain, berbicara *ulual-albab*, Al-Qur'an sendiri menempatkan mereka (*ulual-albab*) dalam posisi istimewa, yaitu orang-orang yang mampu memikirkan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh sekelompok orang pada umumnya. Di era industri 4.0 atau era disruptif yang mengglobal seperti saat ini, dimana pengaruh teknologi terutama informasi, dan komunikasi serta transportasi yang begitu cepat, ditambah lagi adanya covid 19 sangat sulit menemukan profil *ulul albab* yang benar-benar dijadikan patokan dalam Al-Qur'an, dikarenakan *ulul albab* tidak terbatas pada kemampuan intelektual semata, tapi juga harus memiliki kemampuan lain yang bersifat emosional dan spiritual. (Herawati, Juni 2015)

Di pihak lain, Mendiknas Nadiem Makarim (Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020) mencita-citakan terwujudnya kampus merdeka dalam rangka menyikapi era disruptif dan perkembangan industri 4.0. Oleh karena itu, bagaimana memenuhi kampus, yang unjung tombaknya Program Studi menyikapi berbagai fenomena latar belakang di atas. Itulah penelitian ini menjadi penting adanya, dengan mengambil judul, "**Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)**".

Adapun beberapa point yang harus ada dalam Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu:

1. Sejarah singkat lembaga/prodi.
2. Program dan spesifikasi lembaga/prodi.
3. Tujuan lembaga/prodi.
4. Bidang kajian lembaga/prodi.
5. Nilai keunggulan yang ditawarkan lembaga/prodi.
6. Kegiatan dan prospek lembaga/prodi.
7. Rekam jejak SDM lembaga/prodi.
8. Surat ijin operasional lembaga/prodi.
9. Prestasi lembaga/prodi.
10. Lembaga kerjasama lembaga/prodi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana model dan implementasi manajemen pengembangan Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu meliputi:

1. Sejarah singkat lembaga/prodi.
2. Program dan spesifikasi lembaga/prodi.
3. Tujuan lembaga/prodi.
4. Bidang kajian lembaga/prodi.
5. Nilai keunggulan yang ditawarkan lembaga/prodi.
6. Kegiatan dan prospek lembaga/prodi.
7. Rekam jejak SDM lembaga/prodi.
8. Surat ijin operasional lembaga/prodi.
9. Prestasi lembaga/prodi.
10. Lembaga kerjasama lembaga/prodi.

C. Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan model dan implementasi manajemen pengembangan Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu meliputi:

1. Sejarah singkat lembaga/prodi.
2. Program dan spesifikasi lembaga/prodi.
3. Tujuan lembaga/prodi.
4. Bidang kajian lembaga/prodi.
5. Nilai keunggulan yang ditawarkan lembaga/prodi.
6. Kegiatan dan prospek lembaga/prodi.
7. Rekam jejak SDM lembaga/prodi.
8. Surat ijin operasional lembaga/prodi.
9. Prestasi lembaga/prodi.
10. Lembaga kerjasama lembaga/prodi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Pengembangan Kampus Merdeka

Manajemen pengembangan kampus adalah kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan kampus pada suatu sistem pendidikan secara keseluruhan.

Dalam kaitannya dengan manajemen pengembangan kampus ini, ada program, yaitu sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

Selain itu, dalam kaitannya dengan manajemen pengembangan kampus ini ada hubungan kebijakan, program dan kegiatan, yaitu

- a. Kebijakan, yaitu putusan yang mengikat untuk melaksanakan program.
- b. Program, yaitu sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan SDM, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.
- c. Kegiatan, yaitu bentuk perwujudan program dalam bentuk satuan. (Fahim, 2017: 27)

Beberapa bulan yang lalu (Mengulas Balik: Kampus Merdeka, Fact News, May 1) kita banyak mendengar istilah “Kampus Merdeka”. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan bahwa “pengertian dari Kampus Merdeka adalah perguruan tinggi yang lebih otonom”. “Kampus Merdeka ini merupakan bagian dari rangkaian kebijakan Kemendikbud dengan tema payung besar Merdeka Belajar” (Kemdikbud, 2020). “Kampus Merdeka sendiri bertujuan untuk menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi”. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem A. Makarim pada 24 Januari 2020 dalam peluncuran kebijakan Kampus Merdeka (Ashari, 2020).

“Kebijakan Kampus Merdeka ini terdiri dari beberapa inisiatif perubahan terkait Perguruan Tinggi, yang dilandasi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut (Kemdikbud, 2020): Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi”:

- a. “Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum”.
- b. “Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi”.
- c. “Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri”.
- d. “Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta”.

“Kebijakan Kampus Merdeka ditetapkan untuk mempermudah pendirian program studi (prodi) baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B melalui beberapa ketentuan. Sebelumnya, wewenang membuka prodi baru hanya dipegang oleh PTN-BH. Adapun proses perizinan pembukaan prodi baru untuk PTS dan PTN non-BH memakan waktu yang lebih lama. Selain itu, prodi yang baru dibuka hanya mendapatkan akreditasi minimum (bukan C)” (Kemdikbud, 2020). Hal ini menghambat proses penyesuaian perguruan tinggi dengan kondisi industri masa kini. “Untuk itu, pemerintah menetapkan program Kampus Merdeka ini agar perguruan tinggi dapat mengikuti arus perubahan dan kemajuan yang link and match dengan kebutuhan lapangan pekerjaan” (Kemdikbud, 2020).

Dalam praktiknya, “reakreditasi memberikan beban administrasi yang cukup berat bagi dosen pengelola perguruan tinggi. Proses akreditasi sendiri dapat berjalan sampai 170 hari untuk perguruan tinggi dan 150 hari untuk satu prodi. Untuk mengurangi beban tersebut, masa berlaku akreditasi akan diperpanjang secara otomatis setiap lima tahun selama tidak ada penurunan indikator mutu atau perubahan program secara signifikan” (Kemdikbud, 2020).

Program Kampus Merdeka juga menyoroti perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). “Berdasarkan Permenristekdikti no. 44/2015, SKS merupakan takaran waktu kegiatan belajar berdasarkan proses pembelajaran maupun pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler”. Selama ini, definisi SKS terbatas pada metode pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Akan tetapi, dalam skema yang baru, mahasiswa diberikan hak untuk secara sukarela melakukan kegiatan di luar program studi, bahkan di luar perguruan tinggi yang dapat diperhitungkan dalam

SKS. Perubahan ini ditetapkan dalam “Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi”. Harapannya, mahasiswa memiliki kebebasan menentukan rangkaian pembelajaran mereka sehingga tercipta budaya belajar yang mandiri, lintas disiplin, dan mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga untuk diterapkan. Proses pelaksanaan penghitungan sks akan dibebaskan kepada setiap perguruan tinggi. “Perguruan tinggi wajib memberikan hak kepada mahasiswanya untuk secara sukarela mengambil sks di luar program studi dan di luar perguruan tingginya” (Kemdikbud, 2020).

Program Kampus Merdeka juga mewajibkan perguruan tinggi melakukan *tracer study* (studi pelacakan jejak alumni) setiap tahun. “*Tracer study* menjadi wajib dilakukan karena *tracer study* berfungsi sebagai alat ukur kinerja dan luaran perguruan tinggi, tempat untuk melihat kemampuan perguruan tinggi dalam membentuk mahasiswa yang siap bekerja, dan juga sebagai masukan untuk menjamin mutu pembelajaran, seperti evaluasi relevansi kurikulum” (Kemdikbud, 2020).

Saat ini, terdapat tiga status perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia. “PTN Satuan Kerja (Satker), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Badan Hukum (BH)”. Tiga status tersebut menentukan tingkat otonomi perguruan tinggi tersebut, dengan PTN Satker berada di tingkat otonomi terendah dan PTN-BH di tingkat otonomi paling tinggi. Menurut Nadiem Makarim, “tuntutan masa kini adalah membuat semua perguruan tinggi bisa bergerak dengan cepat, maka diharapkan sebanyak mungkin perguruan tinggi bisa menjadi mencapai status PTN-BH (yang lebih otonom) agar semua kampus bisa berkompetisi di panggung dunia”. Saat ini, PTN BH di Indonesia hanya ada 11 universitas, sisanya adalah PTN Satker dan PTN-BLU. Situasi saat ini yang mendorong adanya kebijakan “Kebebasan bagi PTN-BLU dan PTN Satker untuk menjadi PTN-BH” adalah rumitnya syarat untuk menjadi PTN BH. “Syarat-syaratnya yaitu: PTN harus mendapat akreditasi A sebelum dapat menjadi PTN-BH dan mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi PTN-BH. Tak hanya syarat yang rumit, PTN-BLU dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan PTN-BH” (Kemdikbud, 2020).

Nadiem Makarim percaya “bahwa hampir tidak ada profesi di dunia ini yang membutuhkan satu disiplin ilmu saja”. “Ia pun memberi perumpamaan dari renang. Ia percaya bahwa mahasiswa nantinya harus turun ke lautan lepas (dunia pekerjaan) yang

memiliki banyak kemungkinan yang tidak pasti. Namun, saat ini mahasiswa dilatih di kolam renang (kampusnya saat ini) dan hanya dilatih dengan satu gaya saja (prodinya saat ini). Ia merasa mahasiswa perlu untuk belajar berbagai macam gaya renang dan sekali-kali dilatih untuk berenang ke laut lepas agar suatu hari nanti jika mahasiswa itu harus benar-benar terjun ke laut lepas, ia bisa bertahan. Pada situasi saat ini, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri. Juga, bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Tak hanya itu, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa". Maka dari itu, muncullah kebijakan "Hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS)" (Kemdikbud, 2020).

Kumpulan berbagai kebijakan yang sudah dipaparkan disebut dengan "Kampus Merdeka". Kampus Merdeka hadir untuk mendorong perguruan tinggi menjadi lebih adaptif. Menurut Nadiem Makarim, "pendidikan tinggi memiliki potensi dampak tercepat dalam membangun SDM unggul karena jangka waktu dari perguruan tinggi menuju dunia nyata untuk membangun Indonesia sangat cepat". Untuk itu, perguruan tinggi harus adaptif. Kampus Merdeka juga diharapkan bisa mempercepat inovasi. Inovasi yang merupakan tujuan utama perguruan tinggi, namun inovasi tidak dapat dilakukan tanpa ruang bergerak. Inovasi hanya bisa dilakukan di suatu ekosistem yang tidak dibatasi. Tak hanya itu, Kampus Merdeka hadir untuk menghilangkan paradigma, pendidikan hanya tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Nadiem, "dengan kebijakan Kampus Merdeka, tanggung jawab pendidikan bisa diampu bersama oleh industri, asosiasi, dan unsur masyarakat". Terakhir, Kampus Merdeka diharapkan bisa melatih mahasiswa agar lebih adaptif. "Kebijakan Kampus Merdeka yaitu pembebasan mahasiswa belajar di luar prodi, akan membuat mahasiswa akan lebih adaptif dalam menghadapi situasi pascakuliahan dan zaman yang terus berkembang" (Prodjo, 2020).

Yohanes Enggar (KOMPAS.com) mengulas "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar kali ini ditujukan bagi pendidikan tinggi bertajuk Kampus Merdeka". Peluncuran program Kampus Merdeka disampaikan Mendikbud Nadiem kepada media dalam rapat koordinasi kebijakan pendidikan tinggi di Gedung D kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (24/1/2020). "Ini tahap awal untuk melepaskan belenggu agar lebih

mudah bergerak. Kita masih belum menyentuh aspek kualitas. Akan ada beberapa matriks yang akan digunakan untuk membantu perguruan tinggi mencapai targetnya," ujarnya. Nadiem menjelaskan, "Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang." Baca juga: "Kebijakan Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi Bebas Buka Prodi Baru, Asal...". Mendikbud menerangkan bahwa "paket kebijakan Kampus Merdeka ini menjadi langkah awal dari rangkaian kebijakan untuk perguruan tinggi". Kampus Merdeka mengusung empat kebijakan di lingkup perguruan tinggi: "1. Sistem akreditasi perguruan tinggi Dalam program Kampus Merdeka, program re-akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama 5 tahun namun akan diperbarui secara otomatis". Pengajuan re-akreditasi PT dan prodi dibatasi paling cepat 2 tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Untuk perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan "Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri," tambah Nadiem. "Evaluasi akreditasi akan dilakukan BAN-PT jika ditemukan penurunan kualitas meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi". 2. "Hak belajar tiga semester di luar prodi Kampus Merdeka yang kedua memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS)". "Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS", ujar Nadiem. Ia melanjutkan, "Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain di dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan." Nadiem menilai "saat ini bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih di banyak

kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa". Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan "terdapat perubahan pengertian mengenai SKS. Setiap SKS diartikan sebagai 'jam kegiatan', bukan lagi 'jam belajar'. Kegiatan di sini berarti belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil". "Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh rektornya," kata Mendikbud. 3. "Pembukaan prodi baru Program Kampus Merdeka memberikan otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru". "Otonomi diberikan jika PTN dan PTS tersebut sudah memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities". Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan. Ditambahkan oleh Mendikbud, "Seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C". Lebih lanjut, Mendikbud menjelaskan "kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa". Kemudian Kemendikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. "Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini diterapkan," ujar Mendikbud Nadiem. 4. "Kemudahan menjadi PTN-BH Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga terkait kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH)". Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

B. Integrasi Keilmuan sebagai Model pengembangan Kampus di Lembaga Pendidikan dengan Menumbuhkan Pribadi Yang Berkarakter *Ulul Albab*

Menurut Mulyadhi (2000: 251), integrasi ilmu pengetahuan adalah proses mengaitkan dirinya pada prinsip tauhid. Sasaran integrasi ilmu adalah pencari ilmu, bukan ilmu itu sendiri. Karena yang menentukan adalah manusia, maka manusialah yang akan menghayati ilmu. Penghayatan para pencari ilmu itulah yang menentukan,

apakah ilmunya berorientasi pada nilai-nilai Islam ataukah tidak. “Upaya integrasi ilmu berarti pembebasan ilmu dari penafsiran-penafsiran yang didasarkan pada ideology secular, yaitu menggeser dan menggantinya dengan pemahaman-pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan Islam ketika menelaah dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.

Kata kunci konsep “integrasi ilmu adalah semua pengetahuan yang benar berasal dari Allah (*all true knowledge is from Allah*)”. Dalam pengertian yang lain, M. Amir Ali (dalam Nafis, makalah: 4) juga menggunakan istilah “*all correct theories are from Allah and false theories are from men themselves or inspired by Satan*”. “Membangun format keilmuan (*body knowledge*) yang bersifat integratif yang tidak membedakan ilmu umum dan ilmu agama hanya dapat dilakukan dengan cara menempatkan al-Quran dan al-Hadist bukan sebagai petunjuk ritual dan spiritual belaka, melainkan memuat aspek-aspek kehidupan yang bersifat global”. “Integrasi ilmu adalah penggabungan struktur ilmu. Struktur keilmuan dikotomik seharusnya diubah”. Struktur ilmu tidak memisahkan cabang ilmu agama dengan cabang ilmu hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis. “Struktur bangunan keilmuan yang integratif adalah perpaduan antara kajian yang bersumber dari ayat-ayat *qauliyah*, Al-Quran hadist, dan ayat-ayat *kauniyah*, hasil observasi, eksperimen dan penalaran logis”. Pembagian yang amat populer untuk memahami ilmu adalah “pembagian menjadi bidang bahasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi”. Menurut M.Cholis Nafis (makalah: 4), “integrasi dapat dilakukan di perguruan tinggi. Integrasi keilmuan dalam kontek Perguruan Tinggi Islam dapat dilakukan dengan cara membuka prodi atau jurusan keilmuan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Untuk mencapai tingkat integrasi epistemologis ilmu agama dan ilmu umum, integrasi harus dilakukan pada level integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu dan integrasi metodologis. Saat ini sedang dalam proses Islamisasi sekaligus integrasi ilmu pengetahuan, seperti politik Islam, kedokteraan Islam, Seni Islam, psikologi Islam, dan ekonomi Islam. Di Negara Indonesia yang sedangan marak adalah ekonomi Islam yang dikenal dengan sebutan ekonomi syari’ah”.

Untuk dapat memahami nilai-nilai kewahyuan, umat Islam harus memanfaatkan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan dalam upaya memahami wahyu, umat Islam akan terus tertinggal oleh umat lainnya. (Raharjo, 2002: 241). Realitasnya saat ini, ilmu pengetahuanlah yang amat berperan dalam menentukan tingkat adanya

kemajuan umat manusia. Menurut Mahdi Ghulsyani, “integrasi ilmu adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan modern”. Tujuan utamanya adalah “untuk menunjukkan mukjizat al-Qur'an sebagai sumber segala ilmu, dan untuk menumbuhkan rasa bangga kaum muslimin karena telah memiliki kitab yang sempurna”. Pandangan yang menganggap bahwa al-Qur'an sebagai sebuah sumber seluruh ilmu pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang baru, sebab kita mendapatkan banyak ulama besar kaum muslim terdahulu yang berpandangan demikian, di antaranya Imam al-Ghazali dengan bukunya “*Ihya 'Ulum al-Din*”, mengutip kata-kata Ibnu Mas'ud yang berarti “jika seseorang ingin memiliki pengetahuan masa lampau dan pengetahuan modern, selayaknya dia merenungkan al-Qur'an”. Selanjutnya beliau menambahkan bahwa “seluruh ilmu tercakup di dalam karya-karya dan sifat-sifat Allah, dan al-Qur'an adalah penjelasan esensi, sifat-sifat, dan perbuatan-Nya”. Tidak ada batasan terhadap ilmu-ilmu ini, dan di dalam al-Qur'an terdapat indikasi pertemuan antara al-Qur'an dan ilmu-ilmu. (Ghulsyani, 2001: 40)

Selain masalah ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan itu, ada hal terbesar yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini ialah berkaitan dengan paradigma berpikir. Umat Islam masih berpikir secara *absurd* (kabur). Misalnya, dalam memahami al-Qur'an, umat Islam masih mencari sisi mistik dari surat-surat tertentu bukan mengembangkan wacana-wacana keimanan, kemanusiaan dan pengetahuan. Padahal al-Qur'an sarat dengan nilai-nilai keimanan, kemanusiaan, peradaban dan ilmu pengetahuan.

Ulama duhulu hampir tidak mengenal istilah “dikotomi ilmu”, sehingga mereka banyak menguasai ilmu-ilmu selain ilmu agama, sebab, bagi mereka berpandangan “semua jenis ilmu berada dalam satu bangunan pemikiran yang bersumber dari Allah SWT dan semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu mengenal dan menyembah Allah SWT sesuai dengan kodrat diciptakannya manusia” (Nafis, Makalah: 6). Pemahaman seperti itulah yang dimiliki oleh para ulama terdahulu di masa-masa kejayaan Islam, mereka tidak pernah mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum. “Ibnu Rusyd, misalnya, selain dikenal sebagai pakar fikih, juga seorang pakar kedokteran; Ibn Nafis adalah dokter ahli mata, sekaligus pakar fikih mazhab Syafi'I; Ibnu Khaldun, sosiolog Islam ternama, pakar sejarah, juga seorang ahli syariah; Al-Ghazali, walaupun belakangan popular karena kehidupan dan ajaran sufistiknya, sebenarnya beliau telah melalui berbagai bidang ilmu yang ditekuninya, mulai dari ilmu Fiqh, Kalam, Falsafah,

hingga Tasawuf; Ibn Sina, selain ahli dalam bidang Kedokteran, Filsafat, Psikologi, dan musik, beliau juga seorang ulama". Pengertian integrasi ilmu dapat dikatakan "sebagai sikap profesionalisme atau kompetensi dalam satu keilmuan yang bersifat duniawi di bidang tertentu dibarengi atau dibangun dengan pondasi kesadaran ketuhanan dan kesadaran ketuhanan tersebut akan muncul dengan adanya pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu Islam". Oleh sebab itu, "ilmu-ilmu Islam dan kepribadian merupakan dua aspek yang saling menopang satu sama lain; dan secara bersama-sama menjadi sebuah fondasi bagi pengembangan sains dan teknologi. Bisa disimpulkan, integrasi ilmu berarti adanya penguasaan sains dan teknologi dipadukan dengan ilmu-ilmu Islam dan kepribadian Islam adanya". (Turmudi, 2006: xv)

"Integrasi sinergis antara Agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya yang handal dalam mengaplikasikan ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan". Islam tidak lagi dianggap sebagai Agama yang kolot, akan tetapi sebuah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri di berbagai bidang kehidupan, dan sebagai fasilitas untuk perkembangan ilmu dan teknologi. (Turmudi, 2006: xv). Menurut Imam Munandar, "konsep integralisme ilmu adalah sebuah paradigma unifikasi bagi ilmu-ilmu kealaman dan keagamaan, tidak hanya menyatukan ilmu-ilmu tersebut tetapi juga menjadi paradigma ilmu-ilmu kemasyarakatan dan kemanusiaan. Islam tidak hanya menjadi sudut pandang atau pelengkap tetapi menjadi pengawal dari setiap perbuatan atau kerja sains". (Munandar, Makalah). M. Amir Ali kemudian memberikan pengertian integrasi keilmuan: "*Integration of sciences means the recognition that all true knowledge is from Allah and all sciences should be treated with equal respect whether it is scientific or revealed*". Kata kunci konsepsi integrasi keilmuan berangkat dari premis bahwa "semua pengetahuan yang benar berasal dari Allah (*all true knowledge is from Allah*)". Dalam pengertian yang lain, M. Amir Ali juga menggunakan istilah "*all correct theories are from Allah and false theories are from men themselves or inspired by Satan*". Dengan pengertian yang hampir sama Usman Hassan menggunakan istilah "*knowledge is the light that comes from Allah*". (Thoyyar, Makalah: 10)

Konsep integrasi keilmuan juga berangkat dari doktrin keesaan Allah (*tawhîd*), sebagaimana dikemukakan oleh Seyyed Hossein Nasr, "*the arts and sciences in Islam are based on the idea of unity, whichh is the heart of the Muslim*

revelation”. (Thoyyar, Makalah: 12; Nasr, 1970: 21-22). Doktrin keesaan Tuhan, atau iman dalam pandangan Isma’il Razi al Faruqi, “bukanlah semata-mata suatu kategori etika, tetapi ia adalah suatu kategori kognitif yang berhubungan dengan pengetahuan, dengan kebenaran proposisi-proposisinya”. “Karena sifat dari kandungan proposisinya sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan, metafisika, etika, dan estetika, maka dengan sendirinya dalam diri subjek ia bertindak sebagai Cahaya yang menyinari segala sesuatu”. (Thoyyar, Makalah: 12). Al-Faruqi selanjutnya mengatakan: “*As principle of knowledge, al tawhîd is the recognition that Allah, al haqq (the Truth) is, and that He is One. This implies that all contention, all doubt, is referable to Him; that no claim is beyond testing, beyond decisive judgment. Al tawhîd is the recognition that the truth is indeed knowable, that man is capable of reaching it. Skepticism which denies the truth is the opposite of al tawhîd. It arises out of a failure of nerve to push the inquiry into truth to its end; the premature giving up of the possibility of knowing the truth*”. (Thoyyar, Makalah: 13). Bagi al-Faruqi, mengakui Ketuhanan Tuhan dan Pandangan al-Faruqi ini memperkuat asumsi bahwa “sumber kebenaran yang satu berarti tidak mungkin terjadi adanya dua atau lebih sumber kebanaran”. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa integrasi keilmuan memiliki kesesuaian dengan prinsip *al tawhîd*. Mengatakan bahwa “kebenaran itu satu, karenanya tidak hanya sama dengan menegaskan bahwa Tuhan itu satu, melainkan juga sama dengan menegaskan bahwa tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan, yang merupakan gabungan dari penafian dan penegasan yang dinyatakan oleh *syahadah*”. (Thoyyar, Makalah: 13). Untuk itulah, kita perlu mengintegrasikan ilmu-ilmu ini karena sebenarnya tidak ada perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini dapat kita lihat dari:

- a. Dalam tinjauan normatif teologis (Nata, 2005: 50), “al-Qur'an dan Sunnah tidak membeda-bedakan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Keduanya terikat dengan prinsip tauhid yang melihat bahwa baik aspek ontologis, epistemologis maupun aksiologis ilmu pengetahuan adalah sama”. (Amin, 1989: 18; Connoly (ed.), 2002: 315)
- b. Dalam tinjauan historis, Islam telah lebih dahulu memperkenalkan ilmu pengetahuan dalam kerangka yang integrated. Hal ini terlihat dari adanya ulama-ulama besar yang selain ahli dalam ilmu agama juga ahli dalam ilmu umum seperti Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun dan sebagainya. (Yatim, 1996: 50; Yunus, 1992: 39)

- c. Dalam tinjauan filosofis, integrasi ilmu agama dan ilmu umum memiliki landasan yang amat kokoh, karena integrasi tersebut dapat dijumpai pada dataran pemikiran para filsuf di masa lalu (Nata, 2005: 186; Hamdani, 1993: 173), “Al-Ghazali dan Ibn Khaldun menggunakan konsep ilmu yang integral dan holistik dalam fondasi tauhid yang menurut Ismail al-Faruqi sebagai esensi peradaban Islam yang menjadi pemersatu segala keragaman apapun yang pernah diterima Islam dari luar. Dikhotomi yang merekalakukan hanyalah sekedar penjenisan bukan pemisahan apalagi penolakan validitas yang satu terhadap yang lain sebagai bidang disiplin ilmu”. Akibatnya pada zaman klasik Islam tidak terdapat dualism. (Nanat, Makalah: 21). Demikianlah pengertian integrasi ilmu¹ pengetahuan yang harus kita pahami dan kemudian dapat dikembangkan dalam menatap era globalisasi. Ini merupakan tanggung jawab moral ilmuwan dalam rangka menyelamatkan peradaban bangsa.

C. Menumbuhkan Pribadi Yang Berkarakter *Ulul Albab*

Ulul albab secara bahasa berasal dari dua kata: “ulu dan al-albab”. “Ulu” berarti “yang mempunyai”, sedang “al albab” mempunyai beragam arti. Kata “ulul albab” muncul sebanyak 16 kali dalam Al Quran”. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah “akal”. Karenanya, “ulul albab sering diartikan dengan ‘yang mempunyai akal’ atau ‘orang yang berakal’”. Al-albab berbentuk jama dan berasal dari “al-lubb”. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam.

Penelusuran terhadap terjemahan bahasa Inggris menemukan arti yang lebih beragam. ”Ulul albab memiliki beberapa arti, yang dikaitkan pikiran (*mind*), perasaan (*heart*), daya pikir (*intellect*), tilikan (*insight*), pemahaman (*understanding*), kebijaksanaan (*wisdom*)”.

Pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata “ulul albab” menghasilkan sebuah kesimpulan besar: “ulul albab menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir. Kedua aktivitas ini berjalan seiring sejalan”.

“Ulul albab berzikir, atau mengingat Allah, dalam situasi apapun: dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring (Q.S. Ali Imran 3:191), memenuhi janji (Q.S. Ar-Ra’d 13: 20), menyambung yang perlu disambung dan takut dengan hisab yang jelek

¹ Istilah integrasi termasuk spiritualisasi dan Islamisasi.

(Q.S. Ar-Ra'd 13: 21), sabar dan mengharap keridaan Allah, melaksanakan salat, membayar infak dan menolak kejahatan dengan kebaikan (Q.S. Ar-Ra'd 13: 22)". Di sini, "zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal transendental (seperti mendirikan salat) dan hubungan horisontal sosial (seperti membayar infak dan menyambung persaudaraan)".

Dalam berpikir, ulul albab melibatkan beragam obyek: "*fenomena alam*, seperti pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi (Q.S. Ali Imran 3:190-191) dan siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan dan akhirnya mati (Q.S. Az-Zumar 39: 21), *fenomena sosial*, seperti sejarah atau kisah masa lampau (Q.S. Yusuf 12:111)".

Sebagai sebuah konsep, ulul albab perlu dioperasionalisasi atau dibumikan. Beberapa strategi berikut terbayang setelah melakukan *tadabbur* atas beragam ayat di atas, yaitu: "(a) meningkatkan integrasi, (b) mengasah sensitivitas, (c) memastikan relevansi, (d) mengembangkan imajinasi, dan (e) menjaga independensi".

Meningkatkan integrasi. "Ulul albab menjaga integrasi antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman". Integrasi aspek zikir dan pikir ulul albab diikhtiarkan untuk diimplementasikan ke dalam tiga level Islamisasi: (a) "Islamisasi diri, yang ditujukan untuk menjadi manusia yang saleh, termasuk saleh sosial"; (b) "Islamisasi institusi, dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan dan desain proses bisnis"; dan (c) "Islamisasi ilmu, yang sekarang lebih sering disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam".

Mengasah sensitivitas. "Berpikir membutuhkan sensitifitas (Q.S. Yusuf 12: 105-106)". "Fenomena yang sama dapat memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda. Sensitivitas bisa diasah dengan perulangan, yang sejalan dengan pesan Q.S. al-Alaq ayat 1-5, bahwa membaca kritis dilakukan berulang (dalam ayat 1 dan 3). Pembacaan ini pun tetap dibarengi dengan zikir: didasari dengan 'nama Allah' (ayat 1) dan dengan tetap memuliakan Allah (ayat 3)".

Memastikan relevansi. "Proses berpikir harus menghasilkan manfaat. Di sini, isu relevansi menjadi penting. Bisa jadi, kemampuan berpikir manusia belum sanggup membuka tabir dan memahaminya dengan baik alias berpikir fungsional. Tapi bagi ulul albab, semuanya dikembalikan pada kepercayaan bahwa Allah menciptakan semuanya dengan tujuan, tidak sia-sia (Q.S. Ali Imran 3:192)".

Sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang dituliskan dalam Al-Qur'an tidak semuanya dapat dipahami dengan mudah pada masa turunnya. "Sebagai contoh, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa matahari bersinar (*dliya'an*) dan bulan bercahaya (*nuuran*). Pemahaman awam sebelumnya menganggap bahwa bulan pun bersinar. Bulan tidak bersinar tetapi bercahaya karena memantulkan sinar dari matahari (lihat Q.S. Yunus 10:5). Klorofil, atau zat hijau daun, yang diungkap oleh Q.S. al-an'am 6: 99 baru diketahui oleh pengetahuan modern jauh setelah ayat ini turun".

Mengembangkan imajinasi. "Paduan aktivitas pikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju (Q.S. Al-Hashr 59:18; An-Nisa 4:9). Untuk bergerak dan maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Karenanya, ulul albab harus mengikhtiaran pikiran yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, meneorisasi, mengkritik, dan mengimajinasi. Ciri kritis karakter zikir muncul ketika berhadapan dengan masalah konkret. Berzikir berarti mengingat atau mendapat peringatan. Karenanya, watak orang yang berzikir adalah mengingatkan. Di sini, bisa ditambahkan bahwa obyek berpikir juga termasuk fenomena sosial yang terhubung dengan berbagai kisah rasul (Q.S. Yusuf 12:111) juga menegaskan pentingnya aspek kritis ini karena salah satu tugas rasul adalah memberi peringatan (Q.S. Al-Baqarah 2: 119)".

Menjaga independensi. "Ulul albab juga seharusnya terbiasa berpikir independen. Tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks kini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perenial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat (Q.S. Ash-Shaffat 31:102), hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya (Q.S. Al-An'am 6:164), dan diminta hati-hati dalam menilai (Q.S. Al-Hujurat 49:6). Independensi ini menjadi sangat penting di era pascakebenaran ketika emosi lebih mengemuka dibandingkan akal sehat. Di sini kemandirian dalam berpikir menjadi saringan narasi publik yang seringkali sulit diverifikasi kebenarannya". (Diringkas dari presentasi pada Seminar 30 Oktober 2018.)

Ada dua hal yang paling mendasar yang dapat dikategorikan sebagai *Ulul Albab*, yaitu "*zikir* dan *fikir*". "Zikir itu mencakup pikir atau pikir itu terkandung dalam pengertian zikir sebab dalam zikir terkandung unsur piker". Sebaliknya juga, di dalam

pikir terkandung pula zikir. Kata “*fakkara*” sering dimaknai dengan “*to reflect*” atau “refleksi”. Dalam bahasa Indonesia ungkapan ini mengandung unsur makna “merenung”. Dapat dipahami bahwa “orang yang merenungkan atau memikirkan semua ciptaan Allah adalah termasuk juga *zikir*”. Untuk lebih rinci tentang karakteristik *Ulul Albab* sebagaimana yang enam belas kali di ungkapkan dalam Al Quran, dapat diformulasikan sebagai berikut: a. “Memiliki akal pikiran yang murni dan jernih serta mata hati yang tajam dalam menangkap fenomena yang dihadapi, memamfaatkan kalbu untuk zikir kepada Allah dan memamfaatkan akal (pikiran) untuk mengungkap rahasia alam semesta, giat menuntut Ilmu (QSAli Imran [3]:7) dengan merenungkan ciptaan Allah di langit dan yang dibumi serta meperhatikan semua ciptaannaya yang dijadikan dari air sebagai sumber melakukan kajian dan penelitian untuk kemaslahatan hidup, suka merenungkan dan mengkaji ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan dan kebenaran)-Nya dan berusaha menangkap pelajaran darinya, serta berusaha mencari petunjuk dan pelajaran dari’fenomena historik atau kisah-kisah terdahulu”. b. “Selalu sadar diri akan kehadiran Tuhan dalam segala situasi dan kondisi”. c. “Lebih mementingkan kualitas hidup (jasmani dan rohani)”. d. “Mampu menyelesaikan masalah dengan adil”. e. “Siap dan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat”. f. “Mampu memilih dan menerapkan jalan yang benar dan baik yang diridhoi oleh-Nya serta mampu membedakan mana yang lebih bermanfaat dan menguntungkan dan mana pula yang kurang bermanfaat dan menguntungkan bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat”. g. “Menghargai khazanah intelektual dari para pemikir, cendikiawan atau ilmuan sebelumnya”. h. “Bersikap terbuka dan kritis terhadap pendapat, ide atau teori dari manapun datangnya, untuk selanjutnya berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengikuti pendapat, idea tau teori yang terbaik”. i. “Mampu dan bersedia mengajar, mendidik orang lain berdasar ajaran dan nilai-nilai Ilahi dengan cara baik dan benar”. j. “Sabar dan tahan uji walaupun ditimpa musibah dan digangu oleh syetan (jin dan manusia)”. k. “Sadar dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup”. l. “Tidak mau membuat onar, keresahan dan kerusakan, serta berbuat makar di masyarakat”. (Munandar, Makalah: 7).

Untuk menumbuhkan *Ulul Albab* sebagaimana yang dikemukakan di muka, ada beberapa hal yang bisa kita dilakukan untuk mewujudkannya yaitu, “*Perama*, umat Islam harus mampu memanfaatkan sarana teknologi yang kian terjangkau hingga ke

pedesaan sebagai alat perjuangan (*jihad*)-nya. *Kedua*, umat Islam harus secara terus menerus meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas IPTEK dan IMTAK secara bersamaan, atau peningkatan diri kearah kekokohan spiritual, moral dan intelektual. *Ketiga*, proses modernisasi adalah sesuatu yang meniscayakan bagi perombakan sistem pendidikan Islam, mulai dari paradigma, konsep, kerangka kerja, dan evaluasi". (Munandar, Makalah: 7)

"Pelajar muslim setiap aktivitasnya dituntun ajaran agamanya (dorongan transendental), memiliki akidah yang kokoh. Selainnya, bahwa pelajar muslim bukan sekedar berperan sebagai kolektor sks, transkrip, dan ijazah, agar segera digunakan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Bukan itu. Pelajar – khususnya mahasiswa- muslim diharapkan memiliki idialisme, komitmen dan integritas yang tinggi terhadap agama dan kemanusiaan". Lebih jelas lagi bahwa pelajar muslim diharapkan mampu menempa diri agar dapat menyandang identitas sebagai "ulin nuha, ulil abshor, dan ulil al-baab serta bersedia berjuang (*jihad*) di jalan Allah untuk memperbaiki kualitas kehidupan". "Sebagai penyandang identitas yang sangat mulia itu, pelajar muslim harus berhasil membangun karakter atau pribadi utuh. Kekayaan berupa ilmu dan profesional dipandang tidak cukup memadai". Kekayaan itu harus disempurnakan dengan kelebihan lain, yaitu spiritual dan akhlak. "Kekayaan ilmu dan profesional tanpa ditopang oleh akhlak dan kedalaman spiritual hanya akan melahirkan pribadi tamak, individualis, materialis yang justru merusak kehidupan bersama". Berdasarkan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa "seorang pelajar muslim harus mampu memahami Islam secara komprehensif yang ditandai dengan pemahaman integral antara Islam dan Ilmu Pengetahuan, sehingga dengan pemahaman yang komprehensif ini dapat memberikan kepercayaan diri dalam kehidupan. Islam tidak hanya dipahami sebagai sebuah ritual, tetapi harus dipahami sebagai sumber ilmu pengetahuan,bahkan antara Islam dan ilmu harus sejalan". (Charles, Makalah)

Menurut Ahmad Barizi, "untuk mengintegrasikan sains dan Islam adalah dengan menyusun *Kurikulum Berbasis Integrasi Sains dan Islam* (KBISI)". "Untuk terwujudnya insan yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlaq, keluasan intelektual dan kematangan profesional, diperlukan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu atau Sains dengan Islam dalam proses pembelajaran".

Berbicara integrasi ilmu, metode integrasi sains dan islam di perguruan tinggi memandang bahwa hakikat semua ilmu adalah bersumber dari Allah SWT. “Integrasi sains dan Islam bertujuan untuk menghilangkan anggapan bahwa IPTEKS dan ajaran Islam tidak dapat disatukan, dan untuk membuktikan bahwa Agama Islam bukan Agama yang tidak menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan sumber ajaran Islam merupakan sumber atau inspirasi dari semua ilmu pengetahuan”. Untuk mewujudkan Integralisasi sains dan Islam pada lembaga pendidikan, maka perlu kajian khusus tentang metode-metode untuk mengintegrasikan sains dan Islam. (Husein, Makalah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pengembangan prospektus prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pengembangan kampus menuju *world class university*.

Untuk itu diperlukan pengamatan yang mendalam dalam situasi yang wajar (*natural setting*) yang dikenal dengan pendekatan kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982; Denzin & Lincoln, 1994), atau dalam bidang pendidikan sering disebut pendekatan *naturalistic* (E.G. Guba & Y.S Lincoln, 1981). "Penelitian kualitatif setidaknya memiliki tujuh ciri, yaitu: (1) menolak penggunaan kerangka teoritik sebagai persiapan penelitian; (2) tidak terikat oleh hipotesis; (3) melihat objek dalam konteksnya dengan menggunakan tata pikir logik lebih dari sekedar linier kausal; (4) peneliti sebagai instrumen utama, sehingga antara peneliti dengan responden terbina *rappoport*; (5) analisis data menggunakan analisis interaktif (Miles and Huberman) atau analisis alur yang bersifat siklus (Strauss and Corbin); (6) lebih mementingkan proses dari pada hasil; dan (7) dalam penelitian kualitatif menggunakan *snowbolling sampling* dan istilah responden dikenal dengan istilah *informan*" (Basrowi Sukidin, 2002: 9-11).

Dalam penelitian ini, langkah-langkah penelitian dilakukan sebagai berikut. *Pertama*, dilakukan pengumpulan data, yaitu pada situs penelitian (Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang) sebagai subyeknya. Data yang masuk dipelajari, disandi dan dikerjakan dengan melihat kategori-kategori yang dikembangkan dalam tema, sehingga berkembang suatu temuan konseptual yang bersifat tentatif tentang model integrasi ilmu prespektif ulu al-albab yang dikembangkan pada situs penelitian. *Kedua*, berdasarkan temuan konseptual dari subyek tersebut kemudian dilakukan analisis dengan melakukan pengembangan konseptual yang dihasilkan dari subyek tersebut. Dengan langkah-langkah ini dapat diperoleh temuan konseptual yang bersifat lebih mantap dan dapat diabstraksikan secara mendalam pengembangan prospektus prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang dikembangkan pada situs penelitian. Untuk mengungkapkan temuan yang terakhir ini dilakukan metode induksi

analitis termodifikasi (*modified analytic induction*) sebagai suatu cara untuk mengembangkan teori dan mengujinya.

Kedua, berdasarkan temuan konseptual dari subyek tersebut kemudian dilakukan analisis dengan melakukan pengembangan konseptual yang dihasilkan dari subyek tersebut. Dengan langkah-langkah ini dapat diperoleh temuan konseptual yang bersifat lebih mantap dan dapat diabstraksikan secara mendalam tentang model integrasi ilmu prespektif ulu al-albab yang dikembangkan pada situs penelitian. Untuk mengungkapkan temuan yang terakhir ini dilakukan metode induksi analitis termodifikasi (*modified analytic induction*) sebagai suatu cara untuk mengembangkan teori dan mengujinya (Bogdan & Biklen, 1982).

Sesuai dengan petunjuk Robinson sebagaimana dikutip Bogdan & Biklen (1982: 67-69), dalam menerapkan metode induksi analitis ini, dilakukan langkah berikut: (1) pada awal penelitian dikembangkan definisi kasar (*rough definition*) dan penjelasan tentang fenomena tertentu; (2) membiarkan definisi dan penjelasan berlaku sampai diperoleh data yang terkumpul; (3) memodifikasi definisi dan penjelasan tersebut manakala dijumpai hal baru yang tidak cocok dengan definisi dan penjelasan yang dirumuskan; (4) aktif mencari hal-hal yang terpikirkan tidak cocok dengan rumusan; dan (5) mendefinisikan kembali fenomena tersebut dengan menyusun kembali penjelasannya sampai diperoleh satu hubungan yang sifatnya umum, dengan menggunakan kasus negatif untuk membuat definisi ulang atau rumusan ulang.

B. Tahap-tahap Penelitian

Sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang disainnya disusun secara sirkuler (Nasution, 1988), maka penelitian ini menggunakan tiga tahapan. "Pertama, tahapan studi persiapan atau studi orientasi dengan menyusun praproposal dan proposal penelitian yang bersifat tentatif dan menggalang sumber pendukung yang diperlukan".

"Kedua, tahapan studi eksplorasi umum dengan melakukan: (1) konsultasi, wawancara, dan perijinan pada instansi berwenang, dalam hal ini pada kampus yang menjadi situs penelitian, yang hasilnya digunakan untuk melakukan penelitian; (2) penjajagan umum pada beberapa subyek yang ditunjuk untuk melakukan observasi dan

wawancara *grand tour* dan *mini tour*² yang mempengaruhi seleksi dan pemilihan subyek penelitian; (3) mengadakan studi literatur untuk menentukan kembali fokus penelitian; (4) mengadakan seminar kecil guna memperoleh masukan dari teman sejawat dan pakar; serta (5) melakukan diskusi dan seminar berlanjut untuk dapatnya melanjutkan penelitian”.

”Ketiga, tahapan eksplorasi terfokus yang diikuti dengan pengecekan hasil atau temuan penelitian dan penulisan laporan hasil penelitian. Tahap eksplorasi terfokus ini mencakup: (1) tahap pengumpulan data yang dilakukan secara terinci dan mendalam guna menemukan konseptual tema-tema di lapangan; (2) dilakukan pengumpulan dan analisis data secara bersama-sama; (3) dilakukan pula pengecekan hasil dan temuan penelitian (*audit trail*); dan (4) selanjutnya ditulis sebagai laporan hasil penelitian, untuk diajukan ke tahap seminar hasil”.

C. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara dinamis dan bertahap serta terjalin secara terus-menerus. Dalam pengumpulan data diperlukan teknik sampling secara purposif (*purposive sampling*) (Bogdan & Biklen, 1982: 67), yang diimplementasikan melalui disain *funnel* (Bogdan & Biklen, 1982: 186), yaitu dengan mengumpulkan data seluas-luasnya untuk dipersempit dan dipertajam sesuai fokus penelitian, yaitu model integrasi yang dikembangkan pada situs penelitian. Untuk memperoleh kedalaman dan keabsahan data ini dicari informan kunci (*key informant*) yang dapat memberi informasi (*sources of information*) kepada peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Para informan yang dimaksud, seperti rektor, dosen, dan lain-lain.

“Teknik sampling purposif dalam penelitian ini digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penseleksian dan pemilihan informan yang benar-benar menguasai informasi dan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap” (M.Q. Patton, 1980). Penggunaan sampling purposif ini memberi kebebasan peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampling, yang berarti peneliti dapat menentukan sampling

²*Grand tour question* adalah pertanyaan deskriptif yang secara luas diajukan pada informan sehingga memungkinkan bagi informan memiliki waktu lebih luang dan berfikir dalam menjawab pertanyaan peneliti, sedangkan *mini tour question* identik dengan *grand tour* hanya unit pertanyaannya jauh lebih kecil.

sesuai dengan tujuan penelitian. “Sampling yang dimaksudkan bukanlah sampel yang mewakili populasi, melainkan didasarkan pada relevansi dan kedalaman informasi”. Namun demikian, pemilihan sampling tidak sekedar berdasarkan kehendak subyektif peneliti, melainkan berdasarkan tema yang muncul di lapangan.

Selain teknik sampling bola salju, dalam penelitian ini juga digunakan sampling waktu (*time sampling*). ”Pada waktu peneliti menemui informan, penyesuaian waktu akan dipertimbangkan guna diperoleh data yang diinginkan”. Peneliti memperkirakan waktu yang baik untuk observasi dan wawancara, kecuali terhadap peristiwa atau kejadian yang bersifat aksidental. Penggunaan sampling waktu ini dianggap sangat penting, sebab sangat mempengaruhi makna dan penafsiran berdasarkan konteks terhadap subyek atau peristiwa di lapangan. Selanjutnya, hasil atau temuan penelitian dianalisis secara mendalam guna menyusun sebuah kerangka konseptual yang dikembangkan dalam abstraksi temuan dari lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara holistik yang integratif, dan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan, maka dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan tiga teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam (*indepth interview*); (2) observasi partisipan (*participant observation*); dan (3) studi dokumentasi (*study of document*). Hampir semua penulis penelitian kualitatif sepakat bahwa ketiga teknik ini merupakan teknik-teknik dasar yang digunakan dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982).

a. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

”Wawancara sebagai piranti metodologi terpenting dari pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menangkap makna secara mendasar dalam interaksi yang spesifik” (Denzin & Lincoln, 1994). ”Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstandar (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat” (Koentjaraningrat, 1989). Selanjutnya, wawancara yang tidak berstandar ini dikembangkan dalam tiga teknik, yaitu: ”(1) wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview* atau *passive interview*); (2) wawancara agak berstruktur (*somewhat structured interview* atau *active interview*); dan (3) wawancara sambil lalu (*casual interview*)”.

Bentuk wawancara tidak terstandar yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Hal ini disebabkan karena wawancara ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan perolehan informasi sebanyak-banyaknya. Di samping itu, melalui wawancara tidak terstruktur memungkinkan dicatatnya respon efektif yang tampak selama wawancara berlangsung, dan dipilih-pilihkan pengaruh pribadi peneliti yang mungkin mempengaruhi hasil wawancara, serta memungkinkan pewawancara belajar dari informan tentang budaya, bahasa, dan cara hidup mereka. Secara psikologis wawancara ini lebih bebas dan dapat bersifat obrolan sehingga tidak melelahkan dan menjemukan informan (Koentjaraningrat, 1989).

b. Observasi Partisipatif (*Participant Observation*)

Teknik observasi partisipasi digunakan untuk melengkapi dan menguji hasil wawancara yang diberikan oleh informan yang kemungkinan belum holistik atau belum mampu menggambarkan segala macam situasi atau bahkan melenceng. "Observasi partisipatif merupakan karakteristik interaksi sosial antara peneliti dengan subyek-subyek dalam lingkungannya". Dengan kata lain, "proses bagi peneliti memasuki latar dengan tujuan untuk melakukan pengamatan tentang bagaimana peristiwa-peristiwa (*event*) dalam latar memiliki hubungan" (Goetz, J.P., & LeCompte, M.D, 1981).

Observasi partisipatif yang dilakukan dalam penelitian ini mengikuti observasi deskriptif (*descriptive observations*) secara luas dengan melukiskan secara umum situasi sosial yang terjadi di tiga situs penelitian. Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama dilakukan, diadakan penyempitan pengumpulan datanya serta mulai melakukan observasi terfokus (*focused observations*) untuk menemukan kategori-kategori, seperti nilai-nilai yang diprioritaskan dalam pengembangan prospektus prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) yang dikembangkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka pengembangan kampus menuju *world class university*.

c. Studi Dokumentasi (*Study of Document*)

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber non-insani. Penggunaan studi dokumentasi ini didasarkan pada lima alasan; "pertama, sumber-sumber ini tersedia dan murah (terutama dari konsumsi waktu); kedua, dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang stabil, akurat,

dan dapat dianalisis kembali; *ketiga*, dokumen dan rekaman merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya; *keempat*, sumber ini merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas; dan *kelima*, sumber ini bersifat nonreaktif, sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi”.

Di antara dokumen-dokumen yang akan dianalisis untuk memahami profil ketiga situs yang menjadi latar penelitian ini meliputi: (1) visi, misi dan tujuan universitas; (2) daftar dosen dan staf; (3) daftar jumlah mahasiswa menurut tingkat, jenis kelamin, dan usia; (4) foto-foto yang menjadi dokumen situs penelitian, terutama yang berkaitan dengan prestasi-prestasi mahasiswa secara akademik dan non-akademik; (5) tata tertib kampus; dan lain-lain.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk menambah pemahaman peneliti mengenai bahan-bahan itu, dan untuk memungkinkan peneliti melaporkan apa yang ditemukan kepada pihak lain. Oleh karena itu, ”analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa yang bermakna, dan apa yang akan diteliti dan diputuskan peneliti untuk dilaporkan secara sistematis” (Bogdan & S.K. Biklen, 1982). Data sendiri terdiri dari ”deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai situasi, peristiwa, orang, interaksi, dan perilaku”. Dengan kata lain, data merupakan deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif, pengalaman atau sesuatu hal, sikap, keyakinan, dan pikirannya, serta petikan-petikan isi dokumen-dokumen berkaitan dengan suatu program.

Menurut Bogdan & Biklen (1982), ”analisis data melibatkan pekerjaan organisasi data, pemilahan menjadi satuan-satuan tertentu, sistesis pola data, pelacakan pola, penemuan hal-hal yang penting dan dipelajari, dan penentuan apa yang harus dikemukakan kepada orang lain”. Jadi, pekerjaan analisis data bergerak dari penulisan kasar sampai pada produk penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data. Data dianalisis dalam kata-kata, kalimat dengan bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Penerapan

teknik analisis deskriptif dilakukan dengan tiga jalur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: “(1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan”.

Peneliti dapat membuat kesimpulan-kesimpulan yang longgar dan terbuka, dimana pada awalnya belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. “Kesimpulan akhir dimungkinkan setelah pengumpulan data tergantung pada kesimpulan-kesimpulan, catatan lapangan, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang digunakan”. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan matriks yang telah dibuat untuk menemukan pola, topik atau tema sesuai dengan penelitian.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: “*pertama*; kredibilitas (*credibility*) adalah kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan”. Artinya hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dan dari responden informan. Hal ini terdapat tujuh teknik yang diajukan, yaitu: “(1) perpanjangan kehadiran peneliti, (2) pengamatan terus-menerus, (3) triangulasi, (4) diskusi teman sejawat, (5) analisis kasus negatif, (6) penilaian atas kecukupan referensial, dan (7) pengecekan anggota”.

“*Kedua*; transferabilitas (*transferability*), kriteria ini untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan kepada setting lain yang memiliki tipologi yang sama”. “*Ketiga*; dependabilitas (*dependability*), kriteria ini dapat digunakan untuk menilai apakah proses kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah si peneliti sudah cukup hati-hati dalam mengonseptualisasikan rencana penelitian, pengumpulan data dan menginterpretasikannya”. Dan “*keempat*; *dependability audit* dengan meminta *independent auditor* untuk *mereview* aktivitas peneliti”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kredibilitas sebagai keabsahan data dengan teknik triangulasi. “Uji validitas dan reliabilitas instrumen yang paling banyak digunakan adalah triangulasi” (Patton, 1980). Dalam menggunakan teknik triangulasi data, peneliti melakukan melalui triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi sumber.

Triangulasi data digunakan peneliti untuk mencari informasi baru guna membuktikan bahwa data yang telah diperoleh adalah terpercaya. Pencarian informasi tentang data yang sama, digali dari berbagai informasi yang berbeda dan pada tempat yang berbeda. Data yang sama juga dicarikan informasi dari informan yang sama tetapi pada suasana yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan peneliti untuk pencarian data tentang fenomena yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda. Hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode yang berbeda itu dengan membandingkan dan disimpulkan sehingga mempeoleh data yang dipercaya. “Dalam menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti baik dilihat dari dimensi waktu maupun sumber lain, misalnya membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara baik antara pihak obyek peneliti dengan tokoh, ahli atau masyarakat”

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

SUSUNAN KURIKULUM PRODI MPI BERBASIS INTEGRASI DAN

KAMPUS MERDEKA

A. Sejarah Singkat Prodi MPI

Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) adalah salah satu Prodi yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembukaan Prodi MPI ini pada hakikatnya bukan termasuk program studi baru karena Prodi MPI ini sudah pernah dibuka pada tahun 1995 di bawah Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya di Malang dengan nama Jurusan/Program studi Kependidikan Islam (KI). Prodi KI telah menerima 2 angkatan mahasiswa yaitu pada tahun akademik 1995/1996 sebanyak 37 orang dan tahun akademik 1996/1997 sebanyak 45 orang. Dengan demikian jumlah mahasiswa Prodi KI dua angkatan sebanyak 82 mahasiswa, namun sesuai hasil pelacakan data di BAK baru mendapatkan 69 transkrip nilai dari 82 mahasiswa yang terdaftar. Program studi KI waktu itu diorientasikan dapat melahirkan para pemikir pendidikan Islam dan kepala sekolah/madrasah yang profesional. Namun dalam kenyataannya kurikulum Prodi KI waktu itu tidak jelas arahnya, untuk menjadi pemikir pendidikan Islam mata kuliah kefilosafatannya kurang, untuk melahirkan kepala sekolah/madrasah mata kuliah manajemen dan kepemimpinan juga sedikit. Secara umum mata kuliah Prodi KI waktu itu tidak jauh berbeda dengan mata kuliah Prodi PAI hanya perbedaannya jumlah mata kuliah tentang psikologi dan bimbingan konseling lebih banyak sekitar 10 sks. Ketidak jelasan dari sisi kurikulum dan orientasi lulusan tersebut menyebabkan Prodi KI waktu itu dianggap tidak memiliki orientasi keilmuan yang jelas dan tumpang tindih dalam lapangan pekerjaan dengan Jurusan PAI. Maka atas berbagai pertimbangan Pimpinan STAIN Malang pada waktu itu menutup Jurusan KI terhitung sejak tahun akademik 1997/1998.

Dengan dasar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Penetapan dan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama serta SK Direktur Jenderal

Pendidikan Islam No. 1429 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam maka Jurusan KI diganti dengan Jurusan/Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI). Berdasarkan PMA 36 dan SK Dirjen Pendis tersebut maka Pimpinan UIN Maliki Malang memutuskan untuk membuka kembali Prodi KI dengan nama Jurusan/Program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maliki Malang dengan Nomor SK Pendirian dan SK Izin Operasional: SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1463 Tahun 2014 tertanggal 13 Maret 2014, serta bulan dan tahun dimulainya penyelenggaraan Prodi pada tanggal 22 Juli 2014. Prodi MPI memiliki mahasiswa baru terhitung sejak angkatan 2014/2015 dengan jumlah 36 mahasiswa.

Tahun 2016 melakukan akreditasi pertama kali dengan mendapat nilai B [Nilai 345] dengan No. 1191/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 Berlaku 21 -7-2016 s.d 21-7-2021. Sampai sekarang (Mei 2020) tercatat sebagai Mahasiswa aktif = 296 mahasiswa, Mahasiswa aktif penerima beasiswa 32 orang; Lulus 64 orang; Mutasi/pernah studi = 13 orang; Cuti/non aktif = 9 orang, jumlah keseluruhan = 414 mahasiswa.

B. Program dan spesifikasi Prodi MPI

1. Identitas Prodi MPI

1. Nama Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
2. Ijin Penyelenggaraan Prodi : SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1463 Tahun 2014
tanggal 13 Maret 2014
3. Akreditasi Prodi : B [Nilai 345]
No. 1191/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016
Berlaku 21 -7-2016 s.d 21-7-2021
4. Gelar Akademik beserta Singkatannya : Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.)
5. Jenis Pendidikan : Akademik
6. Program Pendidikan : Program Sarjana (Level 6)
7. Bahasa Pengantar Kuliah : Bahasa Indonesia, Inggris dan Arab
8. Masa Studi Program Sarjana : Paling lama 7 tahun akademik

2. Spesifikasi Prodi MPI

- a. Memperkokoh kajian integrasi sains dan Islam bidang MPI serta karakter Ulul Albab;
- b. Memperkokoh basis ilmu pendidikan dan keguruan sebagai turunan dari keunggulan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan;
- c. Mendalami semua kompetensi profil utama berbasis ICT;
- d. Memperkuat mata kuliah pendukung profil utama dan tambahan dalam bidang aplikasi akutansi dan keuangan pendidikan;
- e. Meningkatkan skill mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pada kegiatan kewirausahaan bidang pendidikan (Edupreneur).
- f. Membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga pendidikan baik di level lokal, regional, nasional bahkan internasional.

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi MPI

1. Visi Prodi MPI

Terwujudnya program studi MPI integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. Misi Prodi MPI

- a. Mencetak sarjana MPI yang berkarakter *ulul albab*.
- b. Menghasilkan sains Manajemen Pendidikan Islam dan budaya saing tinggi.

3. Tujuan Prodi MPI

- a. Memberikan akses Manajemen Pendidikan Islam yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan Sarjana MPI untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. Strategi Prodi MPI

Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Manajemen Pendidikan Islam secara integratif yang berkualitas.

5. Profil Lulusan Prodi MPI

- a. **Profil Utama Lulusan MPI:** sebagai Tenaga Kependidikan Profesional Berkarakter Ulul Albab yang berdaya saing.
- b. **Profil Tambahan Lulusan MPI**

- 1) Tenaga Pendidik bidang MPI/Administrasi Perkantoran yang Profesional Berkarakter Ulul Albab.
- 2) Pengelola/Manajer Lembaga Pendidikan Islam yang Profesional, berkarakter Ulul Albab dan berbasis IT.
- 3) Wirausaha bidang pendidikan (Edupreneur) yang kreatif dan inovatif.

D. Bidang kajian Keilmuan/Kurikulum Prodi MPI

1. Dasar Hukum Kampus Merdeka

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Tujuan Nasional Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 49 tahun 2014 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 3 tahun 2020 tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 18 tentang Kebijakan Kampus Merdeka
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditas Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Ijin Perguruan Tinggi Swasta.

2. Rujukan Penyusunan Kurikulum Prodi MPI

a. Kode Mata Kuliah

Sesuai dengan buku Pedoman Pendidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kode Mata Kuliah disebutkan bahwa

- 1) Kode terdiri atas 11 digit
- 2) Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun akademik

- 3) Digit ketiga dan keempat menunjukkan Kode Fakultas
- 4) Digit kelima dan keenam menunjukkan Kode Program Studi
- 5) Digit ketujuh menunjukkan jenjang
- 6) Digit kedelapan menunjukkan kelompok mata kuliah wajib (1) dan mata kuliah pilihan (2)
- 7) Digit kesembilan menunjukkan Kode jenis mata kuliah yaitu
 - a) Mata Kuliah Umum (MKU) & Kekhasan Univ. (MKKU) "A"
 - b) Mata Kuliah Kekhasan Fakultas (MKF) "B"
 - c) Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) "C"
 - d) Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) "D"
- 8) Digit kesepuluh dan kesebelas menunjukkan kode urutan mata kuliah

Contoh :

Kode mata kuliah Pancasila 20010611A01

Adalah Mata Kuliah Umum pertama yang WAJIB ditempuh bagi mahasiswa program sarjana Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020.

b. Susunan Mata Kuliah

Susunan mata kuliah disusun berdasarkan kepada:

- 1) Capaian Pemberajaran (CP) yang ditetapkan oleh semua program studi yang ada di lingkungan FITK;
- 2) Aspek sikap, keterampilan, pengetahuan yang harus dikuasakan kepada mahasiswa FITK;
- 3) Ketentuan pengembangan kurikulum Merdeka Kampus.

Maka, struktur kurikulum dan matakuliah pada Kurikulum FITK UIN Malang 2020 dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Jumlah sks yang dikembangkan di FITK UIN Malang minimal 144 dan maksimal 155 sks;
- 2) Jumlah sks Matakuliah Umum sebesar 6 sks (lihat tabel);
- 3) Jumlah sks Matakuliah Kekhasan Universitas sebesar 26 sks;
- 4) Jumlah sks Matakuliah Dasar Kependidikan sebesar 12 sks;
- 5) Jumlah sks Matakuliah Keahlian Fakultas sebesar 2 sks;
- 6) Jumlah sks Matakuliah Keahlian Program Studi sebesar 2 sks
- 7) Jumlah sks Matakuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi sebesar 8 sks;

- 8) Jumlah sks Matakuliah Keahlian Inti Program Studi sebesar 69 sd 71 sks;
- 9) Jumlah sks Matakuliah Keahlian Pilihan Bidang Studi sebesar 16 sd 18 sks;
- 10) Mata kuliah Keahlian Pilihan Bidang Studi harus minimal lebih banyak 2 x lipat dari yang dipasarkan;
- 11) Mata kuliah Keahlian Pilihan Bidang Studi haruslah mendukung profil tambahan, dan bukan untuk mengakomodasi konsentrasi.

Tabel 1. Contoh mata kuliah Keahlian Pilihan Program studi MPI

Profil tambahan 1 Pendidik MPI di SMK/MAK	Profil Tambahan 2 Pengelola/Manajer LPI
Mata Kuliah (16 -20 sks)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain Kurikulum Manajemen Pendidikan 2. Pengantar Ekonomi Bisnis 3. Perencanaan dan Strategi Pembelajaran 4. Otomatisasi Tata Kelola Kepergawainan 5. Otomatisasi Tata Kelola Keuangan 6. Otomatisasi Tata Kelola Sarana & Prasarana 7. Otomatisasi Tata Kelola Humas & Keprotokolan 8. Pendidikan Profesi Guru 9. Literasi ICT dan Media Pembelajaran 10. Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perundang-Undangan Pengelolaan Pendidikan 2. Pengambilan Kebijakan dan Keputusan 3. Strategi Pengelolaan Proyek Pendidikan 4. Pengelolaan Ekologi dan Tata Ruang Pendidikan 5. Ekonomi dan Kewirausahaan Pendidikan 6. Manajemen Pemasaran dan Kerjasama Pendidikan 7. Manajemen Dakwah dan Jurnalistik 8. Perbandingan Sistem Pendidikan 9. Pemrograman Web dan Desain Pendidikan 10. Tata Kelola Pendidikan Formal dan Nonformal

Adapun ketentuan penyusunan mata kuliah Program studi MPI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nama mata kuliah Keahlian Inti Bidang Studi dan Pilihan Bidang Studi menjadi wewenang program Studi dengan melihat profil lulusan, Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian yang dikembangkan.

- 2) Matakuliah Keahlian Pilihan Bidang Studi boleh dipilih oleh mahasiswa prodi lain dalam satu fakultas, atau fakultas lain Perghuruan Tinggi lain, sehingga dapat mendukung profil tambahan, kegiatan magang dan tugas akhir (tugas akhir boleh kolaborasi dengan mahasiswa pada Prodi/Fakultas lain).
- 3) Model pengembangan kurikulum dilakukan dengan Cut Top, artinya tidak mengenal istilah konversi nilai.
- 4) Minimal terdapat empat matakuliah masing-masing program studi harus dilakukan pembelajaran on-line (blended learning)/ berbasis online kampus dengan perbandingan maklimal 30 %, sedang 70% dilakukan wajib tatap muka.
- 5) Pada program S-1 tetap dilaksanakan PPL, namun dengan menggunakan istilah PLSP (pengenalan lapangan satuan pendidikan) dengan durasi waktu 2 bulan.
- 6) Pada program S-1 tetap dilaksanakan PKL, namun dengan menggunakan istilah Magang Kependidikan dengan durasi waktu 4 bulan.
- 7) Perangkat pembelajaran yang wajib disetorkan meliputi; RPP, Bahan Ajar, LKPD dan Instrumen Penilaian.

c. Merespon Ide Menteri Kemendikbud: Nadiem Makarim

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:

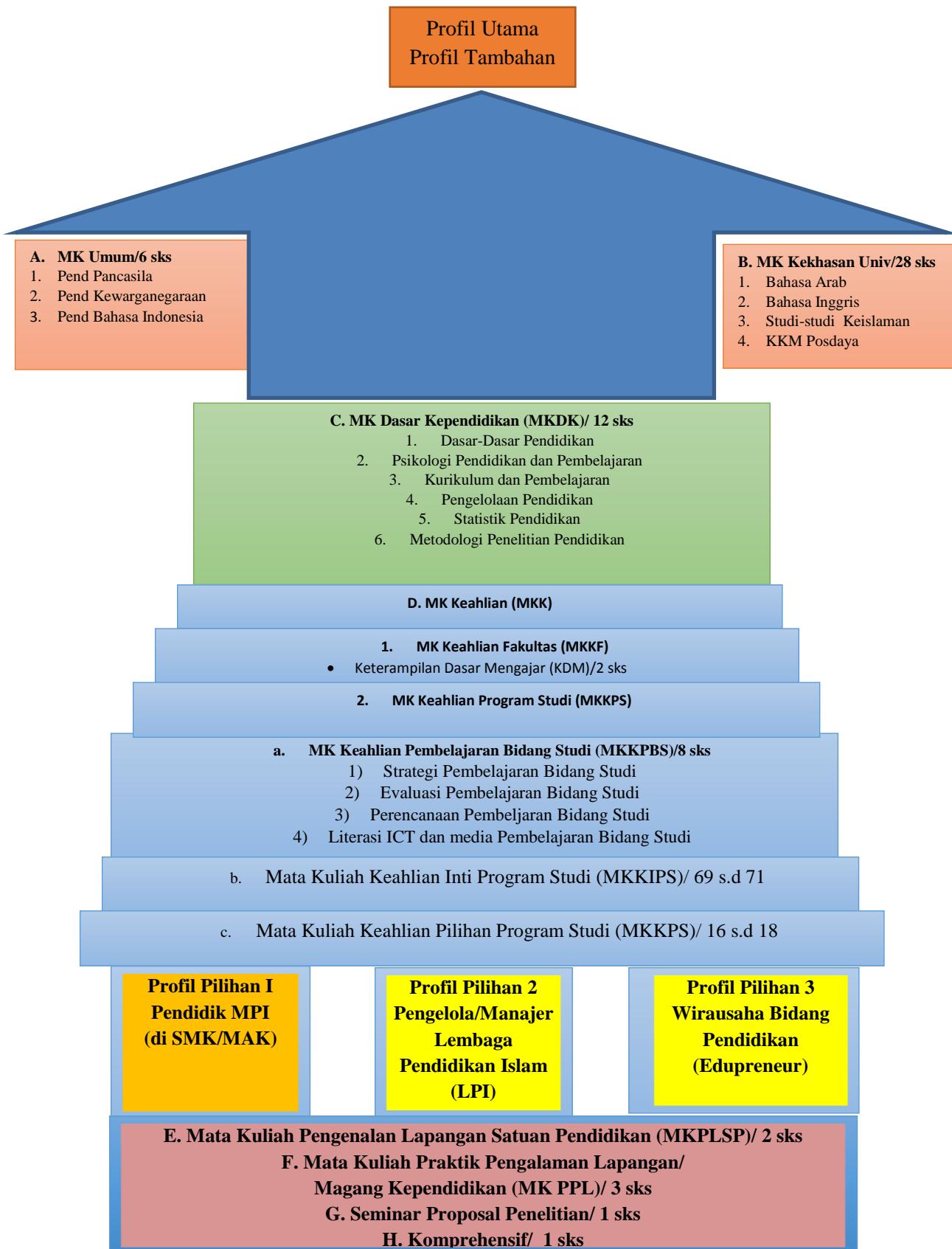
- 1) Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak).
- 2) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks).
- 3) Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks).
- 4) Seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai masa dan beban belajar mahasiswa;
- 5) Proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan keada mahasiswa

untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT

- 6) Dengan kata lain sks yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan (tidak berlaku untuk prodi Kesehatan)
- 7) Setiap sks diartikan sebagai “jam kegiatan” bukan “jam belajar”.
- 8) Definisi “kegiatan”: Belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil
- 9) Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen (dosen ditentukan oleh PT).
- 10) Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar kampus) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.
- 11) Penghitungan Satuan Kredit Semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

d. Skema Struktur Kurikulum Prodi MPI

SKEMA STRUKTUR KURIKULUM PRODI MPI TAHUN 2020



3. Susunan Kurikulum Prodi MPI

Di bawah ini susunan kurikulum Prodi MPI sebagai berikut:

1. Mata Kuliah Umum (MKU)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20000611A01	Pancasila	2
2	20000611A02	Kewarganegaraan	2
3	20000611A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah			6

2. Mata Kuliah Kekhasan Universitas (MKKU)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20000611A04	Bahasa Arab I	2
2	20000611A05	Bahasa Arab II	2
3	20000611A06	Bahasa Arab III	2
4	20000611A07	Bahasa Arab IV	2
3	20000611A08	Bahasa Inggris I	3
4	20000611A09	Bahasa Inggris II	3
5	20000611A10	Filsafat Ilmu	2
6	20000611A11	Sejarah Peradaban Islam	2
7	20000611A12	Teosofi	2
8	20000611A13	Studi Al Qur'an dan Al-Hadist	2
9	20000611A14	Studi Fiqh	2
10	20000611A15	Kuliah Kerja Mahasiswa	2
Jumlah			26

3. Mata Kuliah Keahlian Fakultas (MKKF)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20010511B01	Dasar-Dasar Pendidikan	2
2	20010511B02	Psikologi Pendidikan dan Teori Pembelajaran	3
3	20010511B03	Kurikulum dan Pembelajaran	2
4	20010511B04	Pengelolaan Pendidikan	2
5	20010511B05	Statistik Pendidikan	2
6	20010511B06	Metodologi Penelitian Pendidikan	3
7	20010511B07	Praktik Ketrampilan Mengajar	3
8	20010511B08	Pembelajaran Berbasis Teknologi	2
Jumlah			19

4. Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)

No	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20010611C01	Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan	3
2	20010611C02	Filsafat Manajemen Pendidikan	2
3	20010611C03	Teori Sistem dan Organisasi	3
4	20010611C04	Kepemimpinan Pendidikan	2
5	20010611C05	Manajemen SDM Pendidikan	2
6	20010611C06	Administrasi Perkantoran Pendidikan	2
7	20010611C07	Pengantar Akutansi	2
8	20010611C08	Manajemen dan Analisis Keuangan	2
9	20010611C09	Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran	2
10	20010611C10	Manajemen Diklat dan Event Organizer (EO)	3
11	20010611C11	Manajemen Supervisi dan Evaluasi Pendidikan	3
12	20010611C12	Studi Kebijakan Publik	2
13	20010611C13	Manajemen Humas dan Keprotokolan	2
14	20010611C14	Penelitian Manajemen pendidikan	3
15	20010611C15	Manajemen Mutu Pendidikan	2
16	20010611C16	Inovasi Pendidikan Islam	2
17	20010611C17	Tafsir & Hadits Manajemen Pendidikan	2
18	20010611C18	Manajemen Strategik	3
19	20010611C19	Perilaku dan Budaya Organisasi	3
20	20010611C20	Perencanaan Pendidikan	2
21	20010611C21	Ekonomi Pembangunan dan Pendidikan	2
22	20010611C22	Manajemen Sarana dan Prasarana	2
23	20010611C23	Simulasi dan Komunikasi Digital	2
24	20010611C24	Teknologi Perkantoran	2
25	20010611C25	Korespondensi dan Kearsipan	2
26	20010611C26	Manajemen Stres dan Konflik	2
27	20010611C27	Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran	2
28	20010611C28	Akutansi Sektor Pendidikan	2
29	20010611C29	Manajemen Informasi dan Perpustakaan	2
30	20010611C30	Bimbingan dan Konseling	2
31	20010611C31	Mata Kuliah Pengenalan Lapangan Satuan Pendidikan (MKPLSP)	3
32	20010611C32	Mata Kuliah Praktik Kerja Lapangan/Magang Kependidikan (MKPKL)	3
33	20010611C33	Kewirausahaan Bidang Pendidikan	2
34	20010611C34	Manajemen Perubahan	2

35	20010611C35	Sistim Informasi Manajemen (SIM)	2
36	20010611C36	ICT dalam Manajemen Pendidikan	2
37	20010611C37	Sistem Manajemen Lingkungan Pendidikan	2
38	20010611C38	Seminar Proposal	2
39	20010611C39	Komprehensif	0
40	20010611C40	Skripsi	6
Jumlah			91

5. Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)

A. Profil Pendidik MPI (di SMK dan MAK)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20010612D01	Desain Kurikulum Manajemen Pendidikan	2
2	20010612D02	Pengantar Ekonomi Bisnis	2
3	20010612D03	Perencanaan dan Strategi Pembelajaran	2
4	20010612D04	Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian	2
5	20010612D05	Otomatisasi Tata Kelola Keuangan	2
6	20010612D06	Otomatisasi Tata Kelola Sarana & Prasarana	2
7	20010612D07	Otomatisasi Tata Kelola Humas & Keprotokolan	2
8	20010612D08	Pendidikan Profesi Guru	2
9	20010612D09	Literasi ICT dan Media Pembelajaran	2
10	20010612D10	Evaluasi Pembelajaran Bidang Studi	2
Jumlah			20

B. Pilihan Pengelola / Manajer LPI

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20010612D11	Perundang-Undangan Pengelolaan Pendidikan	2
2	20010612D12	Pengambilan Kebijakan dan Keputusan	2
3	20010612D13	Strategi Pengelolaan Proyek Pendidikan	2
4	20010612D14	Pengelolaan Ekologi dan Tata Ruang Pendidikan	2
5	20010612D15	Ekonomi dan Kewirausahaan Pendidikan	2
6	20010612D16	Manajemen Pemasaran dan Kerjasama Pendidikan	2
7	20010612D17	Manajemen Dakwah dan Jurnalistik	2
8	20010612D18	Perbandingan Sistem Pendidikan	2

9	20010612D19	Pemrograman Web dan Desain Pendidikan	2
10	20010612D20	Tata Kelola Pendidikan Formal dan Nonformal	2
Jumlah			20

C. Pilihan Edupreneur

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	20010612D21	Analisis Ekonomi Makro dan Mikro	2
2	20010612D22	Dasar-dasar Bisnis dan Kewirausahaan	2
3	20010612D23	Inovasi dan Kreativitas dalam Bisnis	2
4	20010612D24	Etika Ekonomi dan Wirausaha Islam	2
5	20010612D25	Akuntansi Bisnis dan Kewirausahaan	2
6	20010612D26	Pengembangan Bisnis Pendidikan (Edupreneur)	2
7	20010612D27	Strategi Pengelolaan Bisnis Berbasis Digital	2
8	20010612D28	Manajemen Investasi dan Perpajakan	2
9	20010612D29	Komunikasi Bisnis dan Konsumen	2
10	20010612D30	Pemrograman Web dan Desain Bisnis	2
Jumlah			20
Total SKS			150

Rekapitulasi Beban SKS bagi mahasiswa program Sarjana MPI

- | | |
|--|-----------|
| 1. MK. Umum (MKU) | = 6 SKS |
| 2. MK. Kekhasan Universitas (MKU) | = 26 SKS |
| 3. MK. Kekhasan Fakultas (MKF) | = 19 SKS |
| 4. MK. Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS) | = 91 SKS |
| 5. MK. Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS) | = 8 SKS + |
| <hr/> Jumlah = 150 SKS | |

Beban Setiap Semester

- | | |
|------------|----------------------------|
| Semester 1 | = 20 SKS |
| Semester 2 | = 20 SKS |
| Semester 3 | = 22 SKS (maksimal 24 SKS) |
| Semester 4 | = 22 SKS (maksimal 24 SKS) |
| Semester 5 | = 20 SKS |
| Semester 6 | = 20 SKS |

Semester 7	=	20 SKS
Semester 8	=	6 SKS
		Jumlah = 150 SKS

4. Pelaksanaan Kegiatan Setara 20 SKS

a. Pilihan Pembelajaran Merdeka Belajar

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan
- 2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Berdasarkan pilihan tersebut maka:

- 1) Mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan
- 2) Mahasiswa memiliki kesempatan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda, dan pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar PT.

b. Pelaksanaan Pembelajaran Merdeka Belajar pada Prodi MPI FITK UIN Maliki Malang

Pada tahun akademik 2020 ini, setiap mahasiswa Prodi MPI yang sudah menempuh minimal semester 4 dapat melakukan merdeka belajar yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut.

- 1) Setiap mahasiswa dapat memprogram mata kuliah maksimal 20 SKS pada prodi lain di dalam FITK maupun Fakultas lain di UIN Malang, yang dilakukan pada semester 5 dengan persetujuan Dosen Wali. Adapun mata kuliah yang diprogram adalah beberapa mata kuliah yang mendukung

pencapaian profil utama dan profil pendukung atau tambahan. Pemrograman mata kuliah hanya dapat dilakukan pada satu semester saja.

Penilaian terhadap mata kuliah yang ditempuh pada Prodi lain (berbeda) di dalam FITK maupun di luar FITK tetapi masih di dalam UIN Malang, adalah diserahkan pada setiap Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan di Prodi MPI berdasarkan pada konversi nilai dari Dosen pengampu mata kuliah yang diikuti pada prodi lain.

- 2) Pada semester 6, setiap mahasiswa prodi MPI WAJIB melakukan kegiatan ASISTENSI atau MAGANG di sekolah/madrasah selama satu semester. Kegiatan magang di sekolah/madrasah diatur dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh unit Micro Teaching yang sudah mendapatkan persetujuan pimpinan FITK. Selama mengikuti kegiatan magang di sekolah/madrasah dalam satu semester, maka setiap mahasiswa dianggap telah melakukan kegiatan setara 20 SKS, dan penilaian dari kegiatan magang tersebut dapat dilakukan konversi terhadap sejumlah mata kuliah dengan jumlah 20 SKS seperti berikut.

Mata Kuliah Keahlian Pembelajaran Bidang Studi (MKKPS)

- | | |
|--|---------|
| 1) Perencanaan dan Strategi Pembelajaran | = 2 SKS |
| 2) Literasi ICT dan Media Pembelajaran | = 2 SKS |
| 3) Evaluasi Pembelajaran Bidang studi | = 2 SKS |
| 4) Desain Kurikulum Manajemen Pendidikan | = 2 SKS |

Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi (MKKIPS)

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Magang / PKL | = 4 SKS |
| 2) Pendidikan Profesi Guru | = 2 SKS |
| 3) Perundang-undangan Pengelolaan Pendidikan | = 2 SKS |
| 4) Tata Kelola Pendidikan Formal dan Nonformal | = 2 SKS |
| 5) Pemograman Web dan Desain Pendidikan | <hr/> = 2 SKS + |
| | Jumlah |
| | = 20 SKS |

Penilaian pada setiap mata kuliah tersebut diserahkan pada masing-masing Dosen Pengampu. Diharapkan bahwa keluaran (*output*) dari pembelajaran setiap mata kuliah tersebut adalah mendukung kegiatan Magang di sekolah/madrasah. Singkatnya bahwa setiap mahasiswa diharapkan dapat

memahami dan menerapkan materi setiap mata kuliah pada kegiatan magang di sekolah/madrasah atau bersifat aplikatif.

Minimal Tagihan yang dibebankan kepada setiap mahasiswa dalam melakukan praktik magang di sekolah/madrasah adalah sesuai kebijakan FITK melalui unit micro teaching yang meliputi:

- 1) Melakukan observasi di lapangan (di kelas dan sekolah/madrasah);
- 2) Melakukan kegiatan administrasi sekolah/madrasah dan atau mengajar bidang MPI di kelas maksimal satu semester;
- 3) Menyusun RPP;
- 4) Menyusun Program Semester (PROSEM);
- 5) Menyusun Program Tahunan (PROTA)
- 6) Menyusun Silabus Pelajaran Bidang MPI dalam satu semester
- 7) Menyusun LKPD setiap materi pembelajaran
- 8) Menyusun Penilaian dan Evaluasi (awal, tengah dan akhir semester)
- 9) Membuat Bahan Ajar
- 10) Membuat Media Pembelajaran
- 11) Merancang Pemecahan Masalah
- 12) Tugas-tugas lainnya dari Dosen Pengampu Mata Kuliah.

Tujuan kegiatan asistensi atau magang di sekolah/madrasah adalah mencapai profil utama yaitu sebagai tenaga kependidikan (TU) pada sekolah/madrasah dan atau instansi pendidikan.

Sasaran kegiatan asistensi atau magang di sekolah/madrasah adalah beberapa sekolah/madrasah setara tingkat menengah baik menengah pertama (SMP atau Tsanawiyah) atau menengah atas (SMA/SMK atau Aliyah), terutama sekolah/madrasah yang sudah memiliki kerjasama dengan FITK dan atau Prodi MPI.

c. Pelaksanaan Kuliah Pada semester 7

Setiap mahasiswa dapat menempuh kegiatan lain yang ditawarkan setara dengan 20 SKS yaitu: 1) MATA KULIAH PENGENALAN LAPANGAN SATUAN PENDIDIKAN (MKPLSP) DAN 2) PENELITIAN. Kegiatan MK-PLSP dilakukan di instansi pendidikan antara lain: DPR/DPRD Komisi Pendidikan dan Keagamaan, Kanwil Kemenag/Diknas, Balai Diklat

Kemenag/Diknas, Pemprop/Pema Bidang Sosial dan Pendidikan, Kemenag/Diknas Kabupaten/Kota, Pengawas Pendidikan, dan sejenisnya. Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan formal mulai tingkat PAUD hingga perguruan tinggi, lembaga pendidikan nonformal serta instansi pendidikan maupun yayasan/ormas pengelola/pembina pendidikan. Untuk kegiatan penelitian ini terlebih dulu mahasiswa melakukan observasi di lokasi penelitian sesuai tema dan keunggulan yang dipilih mahasiswa untuk mencari masalah yang akan diteliti. Pendekatan penelitian yang dapat digunakan adalah kuantitatif atau kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang dapat dilakukan adalah penelitian perilaku dan budaya organiasi, kepemimpinan, administrasi dan manajemen serta penerapan otomatisasi dan penggunaan ICT dalam pengelolaan lembaga/instansi pendidikan, pengelaolaan sarana prasarana pendidikan, pengelolaan tata kelola lingkungan pendidikan, pengelolaan kelas dan pembelajaran. Adapun urutan kegiatan dalam penelitian yang harus dilakukan mahasiswa diatur sebagai berikut.

- 1) Observasi di lapangan untuk mencari masalah yang akan dikaji
- 2) Diskusi hasil observasi (dengan Dosen Pembimbing)
- 3) Seminar hasil observasi (minimal dihadiri 20 mahasiswa)
- 4) Penetapan masalah yang dikaji (Dosen Pembimbing dan Kaprodi)
- 5) Penyusunan Proposal Penelitian
- 6) Penyusunan Instrumen Penelitian
- 7) Validasi Instrumen (secara Statistik atau Expert Judgement)
- 8) Seminar Proposal (minimal dihadiri 20 mahasiswa)
- 9) Pengumpulan Data
- 10) Pemaparan dan Analisis Data
- 11) Penyusunan Diskusi dan Pembahasan
- 12) Seminar Hasil (minimal dihadiri 20 mahasiswa)
- 13) Penyusunan Laporan
- 14) Ujian Hasil Penelitian
- 15) Penulisan Artikel
- 16) Submit artikel ke Jurnal Ilmiah (minimal SINTA 5)

Setelah selesainya kegiatan penelitian tersebut, maka mahasiswa dinyatakan telah menempuh beberapa mata kuliah dengan jumlah 20 SKS sebagai berikut.

Mata Kuliah Keahlian Inti Program Studi

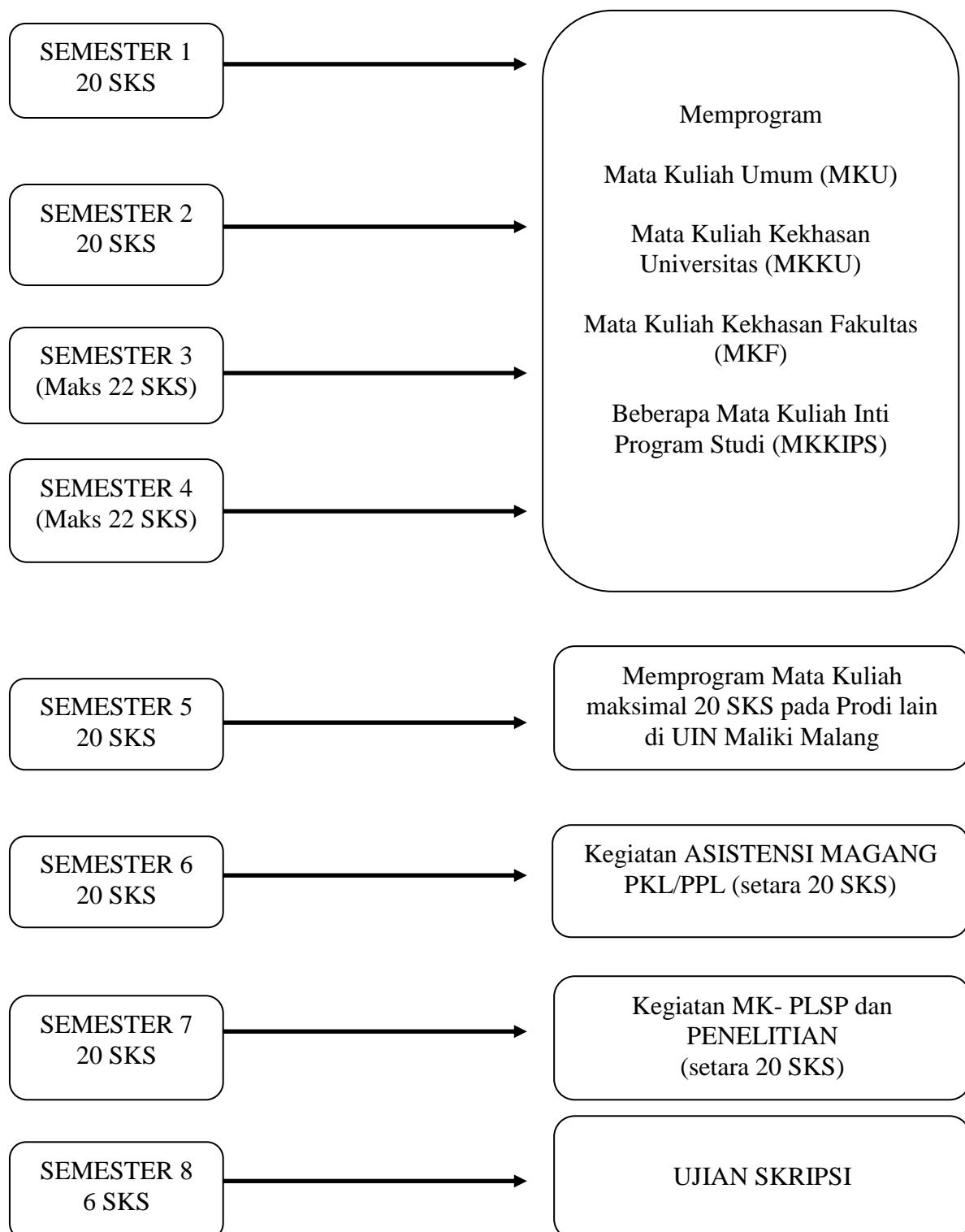
- | | |
|--|---------|
| 1) MK-PLSP | = 2 SKS |
| 2) Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran | = 2 SKS |
| 3) Seminar Proposal | = 1 SKS |
| 4) Komprehensif | = 1 SKS |
| 5) Skripsi | = 6 SKS |

Mata Kuliah Keahlian Pilihan Program Studi (MKKPPS)

- | | |
|---|-----------|
| 1) Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | = 2 SKS |
| 2) Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | = 2 SKS |
| 3) Otomatisasi Tata Kelola Sarana & Prasarana | = 2 SKS |
| 4) Otomatisasi Tata Kelola Humas & Keprotokalan | = 2 SKS + |
- $\overline{\text{Jumlah} = 20 \text{ SKS}}$

Demikian pelaksanaan merdeka belajar di Program Studi MPI.

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN SETARA 20 SKS



E. Nilai Keunggulan Prodi MPI

1. Memiliki Sumber Daya Tim Pengajar yang berkualitas, tercatat ada 4 Profesor dan 60 persen dosen bergelar doktor (Prof. Djunaidi, Prof. Imam Suprayogo, Prof. Mulyadi, dan Prof. Baharuddin);
2. Memiliki Sumber Daya Dosen yang rata-rata berkarya akademik aktif baik sebagai penulis buku, penelitian, artikel jurnal, maupun narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah;
3. Minat masyarakat masih tinggi untuk masuk ke Prodi MPI dari berbagai jalur yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia;
4. Sejak 2016 telah membuka Program ICP yang Sebagian mahasiswa telah mengikuti PPL di luar negeri;
5. Sejak 2015, telah mengelola Jurnal J-MPI dan masuk Dalam kategori Sinta 5;
6. Menjadi pelopor pendirian Asosiasi/Perkumpulan Program Studi MPI (PPMI) dan pernah menjadi Sekretariat Nasional Asosiasi PPMI tahun 2015-2017. Karena meningkatnya jumlah anggota mencapai 140 lebih Prodi MPI serta terbatasnya SDM dan sarpras maka kesekretariatan dipindahkan ke Prodi MPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Menjadi pelopor untuk memperjuangkan ke Kemenag dan Instansi terkait agar ada formasi CPNS khusus lulusan MPI, dan alhamdulillah sudah berhasil, bahkan lulusan MPI UIN Malang pertama yaitu Mas Reza diterima CPNS di Sekjen DPR Pusat.

F. Program Pengembangan Prodi MPI

1. Penataan Prodi MPI secara administrasi, akademik, kelembagaan dan SDM untuk mewujudkan budaya saing tinggi (Motto: Small is beautiful; Small is effective);
2. Memperkuat reputasi Prodi MPI dan lulusannya sehingga mendapat pengakuan secara Nasional menuju ke level Regional dan Internasional;
3. Memperkokoh implementasi integrasi sains dan Islam dalam pengembangan keilmuan MPI;
4. Peningkatan kompetensi bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa, salah satunya membuka Kelas ICP;
5. Peningkatan perngabdian kepada masyarakat pada bidang MPI misalnya pemberahan manajemen TPQ, madrasah diniyah, pesantren dan Lembaga Pendidikan formal lainnya;
6. Optimalisasi manajemen berbasis *information technology*;
7. Membangun sinergitas antara Prodi MPI S1, S2 dan S3, misalnya dalam penyusunan kurikulum, penyusunan Ensiklopedi bidang MPI, pemilihan judul/tema skripsi, tesis dan disertasi maupun dalam kegiatan Asosiasi/Perkumpulan Prodi MPI;
8. Berpartisipasi mewujudkan budaya kampus yang ilmiah religius, asri, indah, dan kondusif.
9. Memantapkan diri untuk menjadi Program studi sebagai salah satu pilar Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*) dan Pusat Peradaban Islam (*Centre of Islamic Civilization*).

G. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

1. Kemampuan Kerja

- a. Mampu melaksanakan tugas keadministrasian pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS sehingga dapat bekerja secara efektif, efesien dan produktif.
- b. Mampu melaksanakan tugas manajemen pendidikan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi,

dengan memanfaatkan IPTEKS yang relevan secara profesional dan proporsional.

- c. Mampu beradaptasi dalam berbagai situasi dan kondisi untuk melaksanakan tugas bidang MPI dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai konsep teoritis bidang manajemen pendidikan secara umum yang meliputi: kepemimpinan, manajemen, dan administrasi pendidikan Islam.
- b. Menguasai substansi kajian (konten) manajemen pendidikan secara mendalam yang meliputi; kepemimpinan, manajemen, dan administrasi pendidikan Islam.
- c. Menformulasikan penyelesaian tugas-tugas bidang manajemen pendidikan secara prosedural yang didukung oleh penguasaan teoritik secara umum dan mendalam serta pemanfaatan IT.

3. Kemampuan Manajerial

- a. Mampu mensinergikan antara tugas manajerial dan kepemimpinan yang meliputi: kepemimpinan, manajemen, dan administrasi pendidikan Islam;
- b. Mampu melaksanakan tugas manajerial dalam bidang-bidang manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, manajemen sarparas, manajemen keuangan, manajemen kelas dan pembelajaran. Manajemen SDM, manajemen humas, manajemen pelayanan khusus, dan administrasi pendidikan Islam;
- c. Mampu melaksanakan tugas kepemimpina dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan IPTEKS untuk mengolah fakta dn data sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

4. Tanggungjawab

- a. Memiliki tanggung jawab yang tinggi pada bidang MPI (Kpemimpinan, Manajemen, dan Administrasi) pendidikan Islam dan instansi yang menangani pendidikan.
- b. Memiliki tanggung jawab secara keilmuan dan profesi atas hasil kerja yang dilakukan pada bidang manjemen pendidikan Islam.

- c. Mampu melaksanakan tugas-tugas MPI dalam penyelesaian masalah yang dilakukan di lembaga pendidikan Islam dan instansi yang menangani Pendidikan.

Profil Tambahan 1

Tenaga Pendidik bidang MPI yang Profesional Berkarakter Ulul Albab serta berdaya saing di tingkat ASEAN dan Internasional.

1. Kemampuan Kerja

- a. Mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran dalam penyusunan perangkat, pelaksanakan dan evaluasi pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam di sekolah Menengah Kejuruan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Mampu memanfaatkan keilmuan Manajemen Pendidikan Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kejuruan.
- c. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kejuruan.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai konsep-konsep teoritis dan landasan keilmuan pendidikan secara mendalam sebagai titik tolak dalam pengembangan potensi peserta didik untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan.
- b. Menguasai substansi kajian keilmuan Manajemen Pendidikan Islam secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
- c. Menguasai teori-teori pendidikan dan pembelajaran serta mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kejuruan.

3. Kemampuan Manajerial

- a. Mampu melaksanakan konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan dan membudayaan pengamalan ajaran Islam dan pembentukan perilaku akhlak mulia peserta didik di Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam di sekolah menengah kejuruan, berdasarkan analisis informasi dan data serta hasil penelitian yang relevan.
- c. Mampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah Manajemen Pendidikan Islam secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil pembelajaran yang bermutu.

4. Tanggungjawab

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam yang efektif, produktif, bermakna, toleran dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat multi kultural baik secara mandiri maupun dengan kemitraan.
- b. Mampu menyesuaikan diri secara tepat dan benar dalam menjalankan tugas pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhhlak mulia secara mandiri.
- c. Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap mutu peserta didik dalam proses pembelajaran Manajemen Pendidikan Islam yang dapat bersaing di tingkat ASEAN dan Internasional.

2. Profil Tambahan 2

Pengelola Lembaga Pendidikan Islam di berbagai jenis, jenjang dan status yang Profesional Berkarakter Ulul Albab berbasis IT dan Kewirausahaan

1. Kemampuan Kerja

- a. Mampu membangun lembaga pendidikan baik formal maupun non formal di berbagai jenis, jenjang dan status pendidikan Islam.
- b. Mampu bekerja secara profesional dalam mengelola lembaga pendidikan Islam sehingga memiliki lulusan yang bermutu.

- c. Mampu memberdayakan dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya baik manusia maupun sumberdaya alam.

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai konsep mutu lembaga pendidikan dengan mengadopsi teori dan praktek yang diterapkan dalam studi ilmu manajemen secara umum maupun berasal dari ajaran Islam.
- b. Menguasai substansi kajian keilmuan terkait pengelolaan Pendidikan Islam secara luas, mendalam, dan mutakhir untuk membimbing dan mengarahkan setiap personil lembaga pendidikan baik internal maupun ekternal dalam menciptakan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas.
- c. Menguasai teori-teori tentang layanan pendidikan dan mampu memformulasikan dan mengimplementasikannya secara prosedural dalam upaya melayani stakeholder baik dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan dengan harapan untuk kemajuan lembaga pendidikan Islam.

3. Kemampuan Manajerial

- a. Mampu melaksanakan konsep kepemimpinan pendidikan dalam rangka menggerakkan setiap personil lembaga pendidikan Islam dalam membentuk budaya mutu yang baik.
- b. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam mengelola lembaga pendidikan Islam berdasarkan analisis informasi dan data serta hasil penelitian.
- c. Mampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah dalam lembaga pendidikan Islam secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil pendidikan Islam yang bermutu.

4. Tanggungjawab

- a. Memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap berlangsungnya lembaga pendidikan Islam yang bermutu dengan mengedepankan pengelolaan manajerial yang baik.
- b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan yang efektif, produktif, bermakna, toleran dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

- c. Memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap mutu lembaga pendidikan dalam kualitas peserta didik, proses pembelajaran sehingga dapat bersaing di tingkat ASEAN dan Internasional.

3. Profil Tambahan 3

Wirausaha bidang pendidikan (Eduentrepreneurship)

1. Kemampuan Kerja

- a. Mampu mengelola bidang bisnis yang terkait dengan bidang pendidikan (Eduentrepreneurship) dalam rangka mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih mandiri.
- b. Mampu menyusun melaksanakan dan mengevaluasi bidang usaha pendidikan (Eduentrepreneurship) sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure), agar usaha yang dijalankan berhasil.
- c. Mampu bekerja secara professional sebagai entrepreneur/wirausahawan muslim bidang pendidikan yang dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat dan lembaga terkait

2. Penguasaan Pengetahuan

- a. Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan pengetahuan manajemen usaha dalam dunia pendidikan.
- b. Menguasai secara mendalam konsep teoritis dan pengetahuan tentang SOP (Standard Operating Procedure), Software Requirement Specification (SRS) dan Quality Assurance (QA) dalam usaha di bidang pendidikan.
- c. Memiliki kemampuan dalam bahasa Indonesia dan asing (Arab atau Inggris) yang menunjang keberhasilan dan kesuksesan usaha bisnis bidang pendidikan yang dijalankan.

3. Kemampuan Manajerial

- a. Mampu melaksanakan konsep manajerial bidang usaha pendidikan agar mencapai keberhasilan yang maksimal.
- b. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan strategis dalam mengelola bidang usaha pendidikan berdasarkan analisis informasi, data dan kebutuhan pasar.

- c. Mampu memberikan petunjuk dan langkah-langkah berbagai pemecahan masalah dalam pengelolaan bisnis bidang pendidikan secara mandiri dan kolektif untuk memperoleh hasil usaha yang maksimal.
- d. Mampu memimpin tim kerja dalam usaha bisnis bidang pendidikan yang dijalankan.

4. Tanggungjawab

- a. Memiliki tanggung jawab yang kuat dalam pelaksanaan tugas, pencapaian hasil kerja dan pelaporan sebagai pimpinan bidang usaha bisnis.
- b. Memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan mengolah informasi untuk pencapaian keberhasilan dan kesuksesan usaha bisnis yang dijalankan.
- c. Memiliki tanggung jawab sosial sebagai entrepreneur/wirausaha muslim yang dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya.

H. LAPORAN HASIL SURVEY KEPEMIMPINAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

LAPORAN HASIL SURVEY

KEPEMIMPINAN UPPS

SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Survey yang dilakukan adalah untuk seluruh mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari instrumen sebagai berikut:

Kuisisioner	Aspek
pengelolaan jurusan yang ada sekarang memang layak dan disegani	Karisma
Pengelolaan jurusan memiliki ide-ide dan rancangan-rancangan yang strategis untuk mengembangkan jurusan	Kemampuan konseptual

Pengelolaan jurusan tampak akrab manakala berinteraksi dengan baik kepada dosen, karyawan, para pimpinan fakultas, dan pimpinan universitas

Kemampuan human relation

Keterampilan pengelolaan jurusan sangat memadai dalam megelola jurusan

Kemampuan teknis

Survey dilakukan secara Online dengan memanfaatkan *google form* yang terdiri dari 5 skala.

1: Sangat kurang

2: kurang

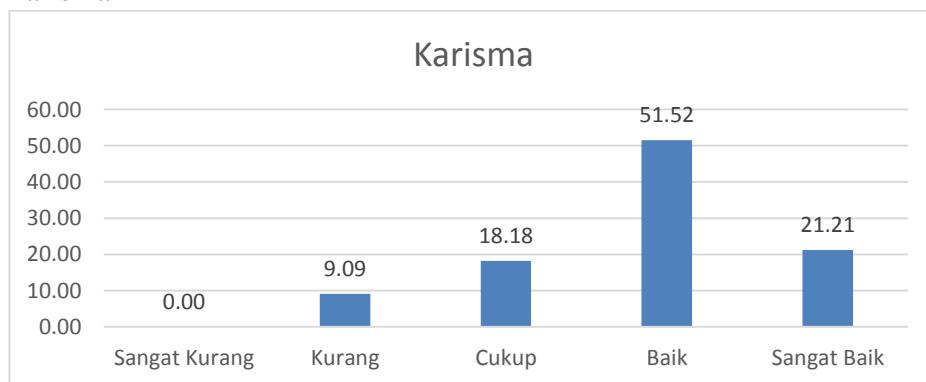
3: cukup

4: baik

5: sangat baik

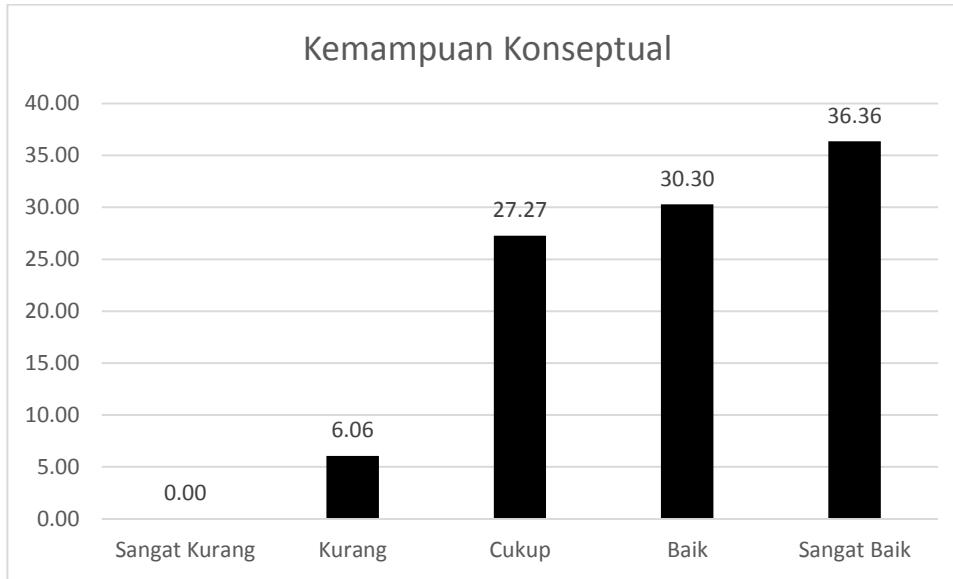
Hasil pengolahan data hasil survey terhadap 33 respoondent adalah sebagai berikut:

1. karisma



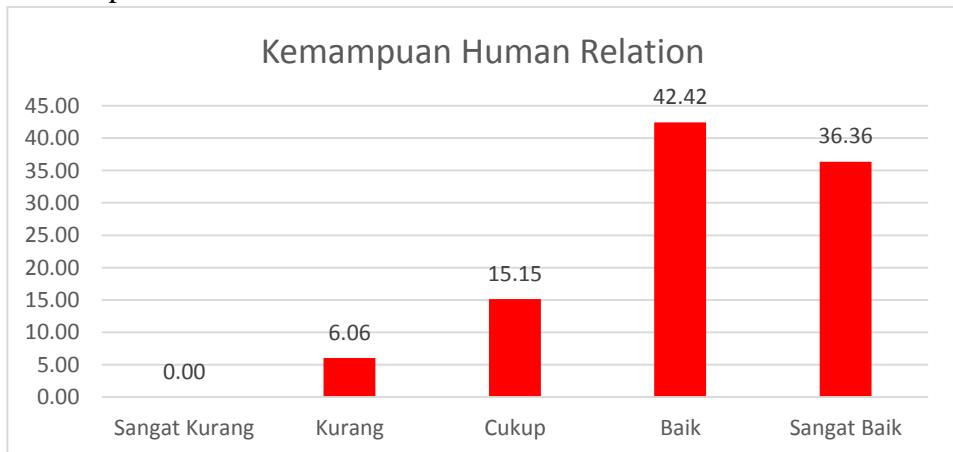
Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa karisma pimpinan berada pada kategori baik yaitu 51,52%. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan UPPS memiliki karisma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi 18,18% menyatakan karisma yang cukup, dan 9,09% menyatakan kurang berkarisma, sehingga berdasarkan survey ini perlu adanya peningkatan kualitas pimpinan UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar kedepan UPPS akan semakin baik lagi.

2. Kemampuan konseptual



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kemampuan konseptual pimpinan berada pada kategori sangat baik yaitu 36,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan UPPS memiliki kemampuan konseptual yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sebaran grafik diatas menunjukkan 27,27% menyatakan kemampuan konseptual yang dimiliki pimpinan adalah cukup dan 6,06% menyatakan kurang mempunyai kemampuan konseptual, sehingga berdasarkan survey ini perlu adanya peningkatan kemampuan konseptual UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar ke depan UPPS akan semakin baik lagi. Peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai workshop atau pelatihan yang menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Kemampuan human relation



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kemampuan human relation pimpinan berada pada kategori baik yaitu 42,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan UPPS memiliki kemampuan human relation yang mumpuni dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sebaran grafik diatas menunjukkan 15,15% menyatakan kemampuan human relation yang dimiliki pimpinan adalah cukup dan 6,06% menyatakan kurang mempunyai kemampuan human relation, sehingga berdasarkan survey ini perlu adanya peningkatan kemampuan human relation pimpinan UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar kedepan UPPS akan semakin baik lagi. Peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai workshop atau pelatihan yang menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Kemampuan teknis



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kemampuan teknis pimpinan berada pada kategori baik yaitu 42,42%. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan UPPS memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa sebaran grafik diatas menunjukkan 30,30% menyatakan kemampuan human relation yang dimiliki pimpinan adalah cukup dan 3,03% menyatakan kurang mempunyai kemampuan teknis, sehingga berdasarkan survey ini perlu adanya peningkatan kemampuan teknis pimpinan UPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar kedepan UPPS akan semakin baik lagi. Peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai workshop atau pelatihan yang menunjang dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan survey di atas, maka Program Studi Manajemen Pendidikan Islam perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan UPPS sehingga tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kinerja fakultas dan program studi.

I. LAPORAN HASIL SURVEY PELAYANAN AKADEMIK DAN SARANA PRASARANA

LAPORAN HASIL SURVEY PELAYANAN AKADEMIK DAN SARANA PRASARANA SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021

Survey yang dilakukan adalah untuk seluruh mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari instrumen sebagai berikut:

Kuisisioner	Aspek
Petugas segera merespon apa yang saya butuhkan	Kecepatan
Mengerti betul apa yang saya inginkan	Akurasi
Prosedur Pengurusan sangat jelas	Akurasi
Prosedur pengurusan serasa berbelit-belit	Kemudahan
Petugas yang melayani terkesan acuh tak acuh	Keramahan dan kepedulian
Petugas mau memberikan penjelasan secara gamblang	Keramahan dan kepedulian
Situasi kerja di ruang pelayanan tampak menyenangkan	Kenyamanan
Penataan atribut di ruang pelayanan yang tampak harmonis	Kenyamanan

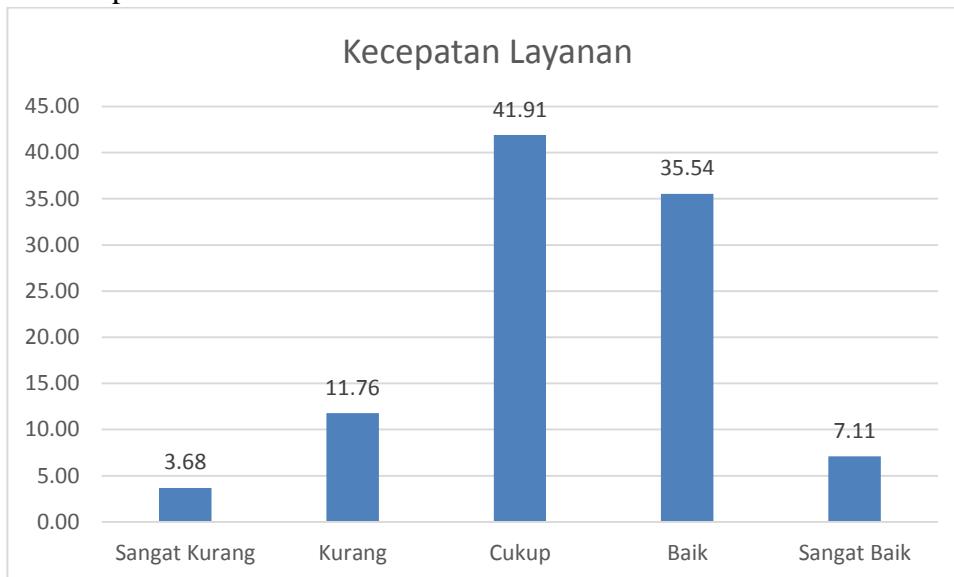
Survey dilakukan secara Online dengan memanfaatkan *google form* yang terdiri dari 5 skala.

1: Sangat kurang

- 2: kurang
- 3: cukup
- 4: baik
- 5: sangat baik

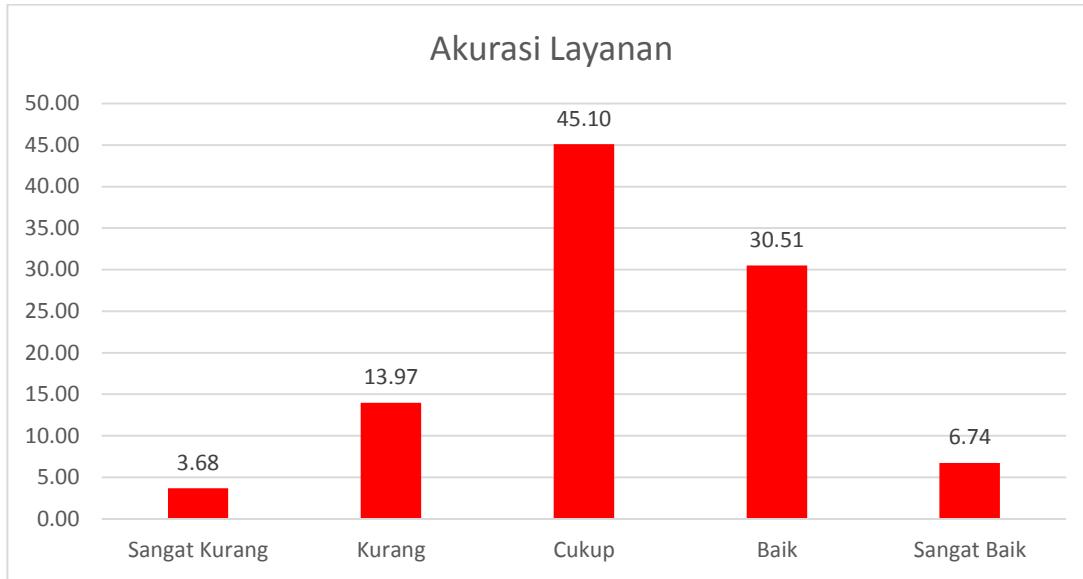
Hasil pengolahan data hasil survey terhadap 408 respoonden adalah sebagai berikut:

1. Kecepatan



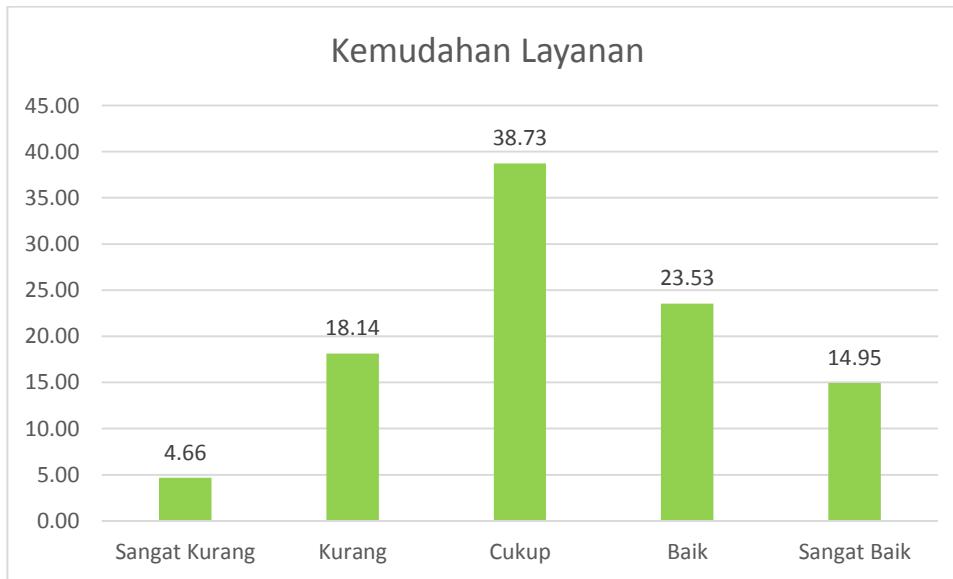
Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kecepatan dalam memberikan pelayanan oleh tenaga kependidikan mayoritas responden merasakan kecepatan yang cukup baik yaitu sebesar 41,91% dari seluruh responden. Walaupun 35,54% responden merasakan kecepatan pelayanan yang baik, titik fokus pada pelayanan yang diberikan belum seluruhnya baik, karena dari 408 responden masih terdapat responden menyatakan bahwa kecepatan pelayanan dalam kategori yang sangat kurang yaitu sebanyak 3,68%, 11,76% responden merasa kurang cepat dalam memperoleh pelayanan, sehingga perlu perbaikan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan cepat.

2. Akurasi



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa akurasi dalam memberikan pelayanan oleh tenaga kependidikan mayoritas responden merasakan akurasi yang cukup baik yaitu sebesar 45,10% dari seluruh responden. Walaupun 30,51% responden merasakan akurasi pelayanan yang baik, titik fokus pada pelayanan yang diberikan belum seluruhnya baik, karena dari 408 responden masih terdapat responden menyatakan bahwa akurasi pelayanan dalam kategori yang sangat kurang yaitu sebanyak 3,68%, 13,97% responden merasa kurang merasakan akurasi dalam memperoleh pelayanan, sehingga perlu perbaikan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan akurasi yang sangat baik..

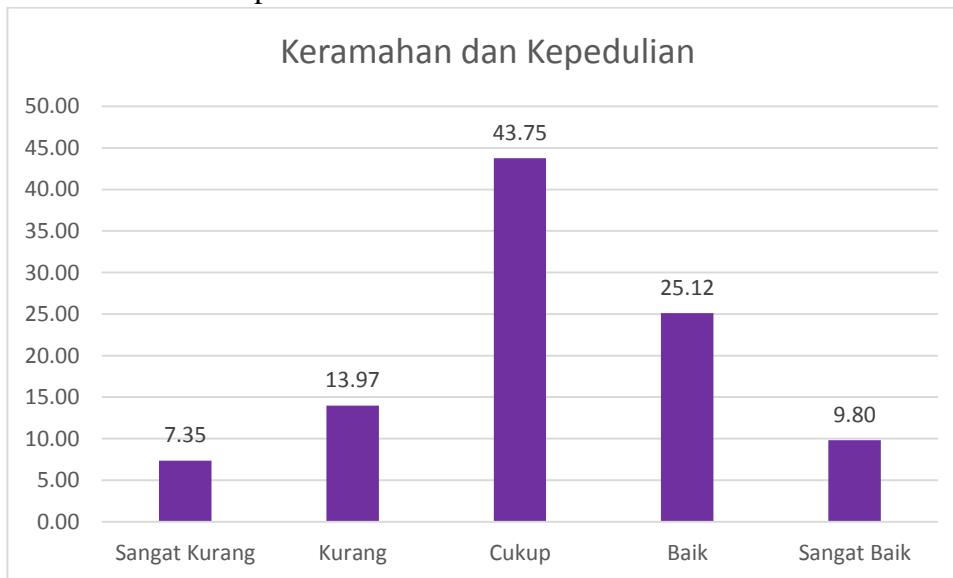
3. Kemudahan



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kemudahan dalam memberikan pelayanan oleh tenaga kependidikan mayoritas responden merasakan

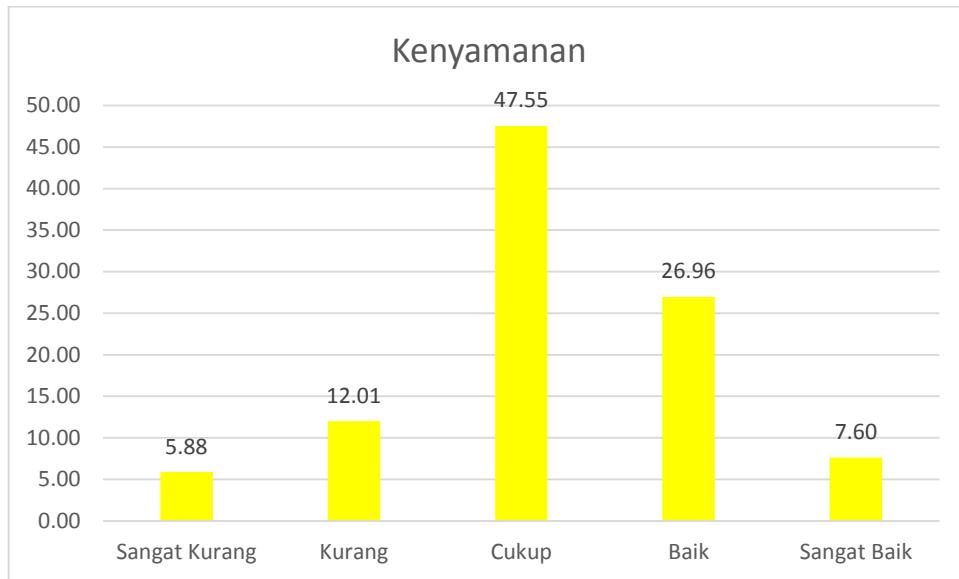
kemudahan yang cukup baik yaitu sebesar 38,73% dari seluruh responden. Walaupun 23,53% responden merasakan kemudahan pelayanan yang baik, titik fokus pada pelayanan yang diberikan belum seluruhnya baik, karena dari 408 responden masih terdapat responden menyatakan bahwa kemudahan pelayanan dalam kategori yang sangat kurang yaitu sebanyak 4,66%, 18,14% responden merasa kurang memperoleh kemudahan dalam menerima pelayanan, sehingga perlu perbaikan agar pelayanan dapat dilaksanakan kemudahan yang sangat baik.

4. Keramahan dan Kepedulian



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa keramahan dan kepedulian dalam memberikan pelayanan oleh tenaga kependidikan mayoritas responden merasakan keramahan dan kepedulian yang cukup baik yaitu sebesar 43,75% dari seluruh responden. Walaupun 25,12% responden merasakan keramahan dan kepedulian pelayanan yang baik, titik fokus pada pelayanan yang diberikan belum seluruhnya baik, karena dari 408 responden masih terdapat responden menyatakan bahwa keramahan dan kepedulian pelayanan dalam kategori yang sangat kurang yaitu sebanyak 4,66%, 18,14% responden merasa kurang memperoleh kemudahan dalam menerima pelayanan, sehingga perlu perbaikan agar pelayanan dapat dilaksanakan kemudahan yang sangat baik.

5. Kenyamanan



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kenyamanan tata ruang maupun di dalam kantor pelayanan mayoritas responden merasakan kenyamanan yang cukup baik yaitu sebesar 47,55% dari seluruh responden. Walaupun 25,12% responden merasakan kenyamanan pelayanan yang baik, titik fokus pada pelayanan yang diberikan belum seluruhnya baik, karena dari 408 responden masih terdapat responden menyatakan bahwa kenyamanan ruangan pelayanan dalam kategori yang sangat kurang yaitu sebanyak 5,88%, 11,01% responden merasa kurang nyaman, sehingga perlu perbaikan agar pelayanan dapat dilaksanakan dengan sangat nyaman.

Berdasarkan survey di atas, maka Program Studi Manajemen Pendidikan Islam perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif pelayanan akademik sehingga mahasiswa dan tenaga pendidik Manajemen Pendidikan Islam memperoleh pelayanan data yang tepat dan akurat. Dengan komunikasi yang baik antara pelayanan akademik dan program Studi Manajemen Pendidikan Islam, maka bagiannya akademik dapat memberikan pelayanan dengan lebih tepat.

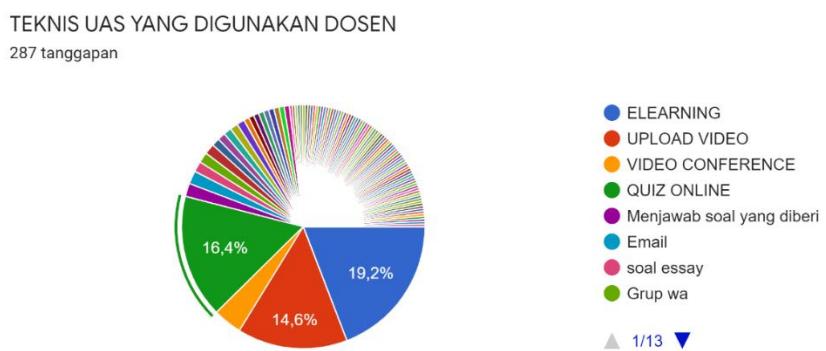
J. LAPORAN HASIL SURVEY PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

LAPORAN HASIL SURVEY PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GENAP TAHUN 2020 PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FITK UIN MALANG

Kondisi wabah covid-19 membuat seluruh roda kehidupan mengalami gejala ketidakstabilan, termasuk berlangsungnya proses pendidikan. Dalam melaksanakan

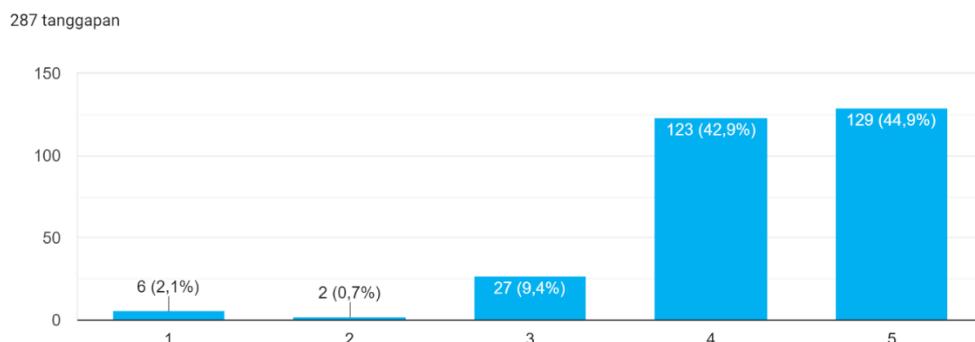
proses pendidikan dengan mode daring tidak menutup kemungkinan menyebabkan perlunya penyesuaian dan akan menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah bagi peserta didik di antaranya adalah kondisi psikis serta mental dan sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pembelajaran daring. Berikut adalah hasil survei dari 287 respon, terdiri dari 261 mahasiswa semester II, 15 mahasiswa semester IV, dan 11 mahasiswa semester VI, yang telah disusun oleh tim UPM FITK UIN Malang. Survey ini disebarluaskan kepada seluruh mahasiswa MPI FITK UIN Malang. Adapun tujuan survei ini adalah untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan Ujian Akhir Semester maupun kondisi peserta didik dalam proses pelaksanaan ujian daring pada situasi wabah covid-19.

E.1 Teknik UAS



Berdasarkan hasil analisis survei bahwa dari 287 respon, data terbesar menunjukkan sebanyak 19,2% respon menyatakan bahwa Teknik UAS yang digunakan adalah E-Learning, 16,4% menggunakan Quiz Online, 14,6% menggunakan Upload Video, sedangkan sisanya 49,8% menggunakan Video Conference dan lain-lain.

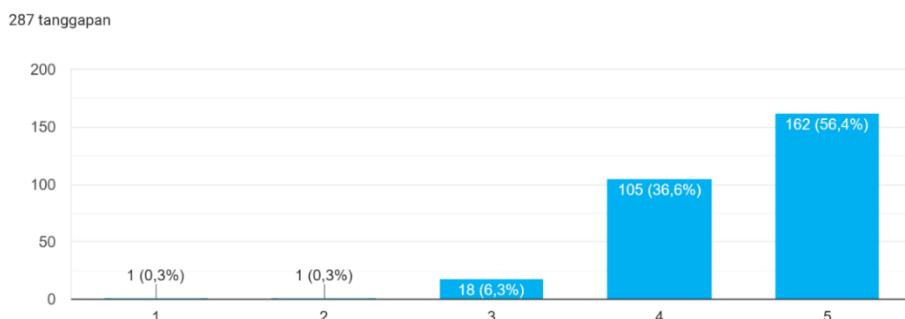
E.2 Sistem Penilaian



Berdasarkan hasil analisis survei bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 129 (44,9%) respon sangat setuju, 123 (42,9%) respon setuju, 27 (9,4%) respon netral, 2 (0,7%) respon tidak setuju, dan 6 (2,1%) respon**

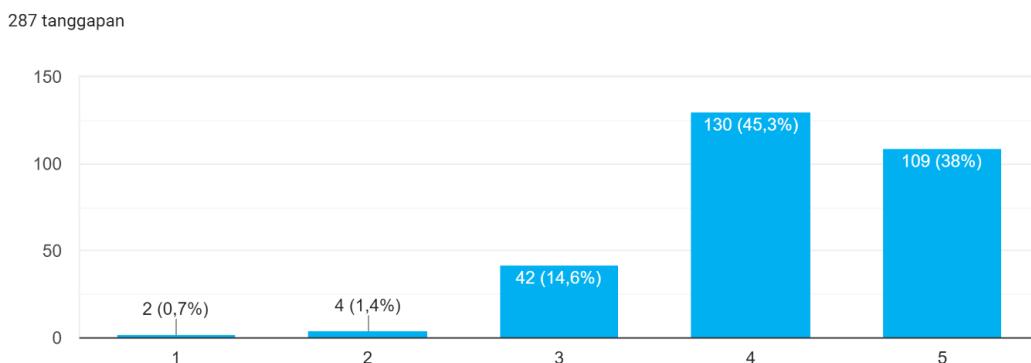
sangat tidak setuju bahwa Sistem penilaian yang diberikan memotivasi diri untuk memperbaiki cara belajar. Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa pada **Grafik E.2 87,6 % respon sudah puas terhadap sistem penilaian yang diberikan oleh dosen.**

E.3 Persentase Bobot Penilaian



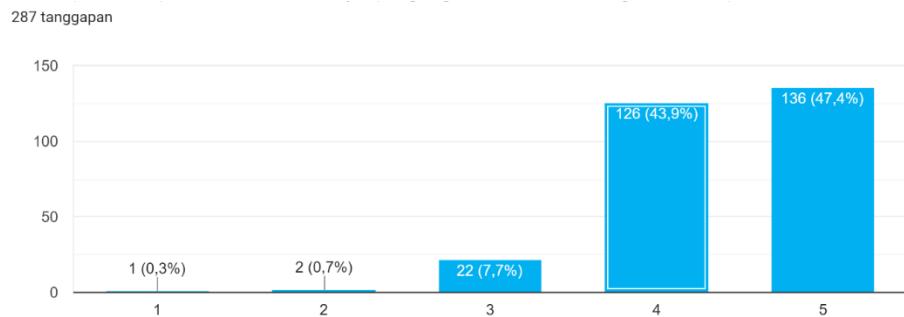
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 162 (56,4%) respon sangat setuju, 105 (36,6%) respon setuju, 18 (6,3%) respon netral, 1 (0,3%) respon tidak setuju, dan 1 (0,3%) respon sangat tidak setuju bahwa persentase bobot penilaian perkuliahan disampaikan pada tahap awal kontrak perkuliahan.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa pada **Grafik E.3 93% respon sudah puas terhadap persentase bobot penilaian.**

E.4 Kesesuaian dengan rencana pembelajaran



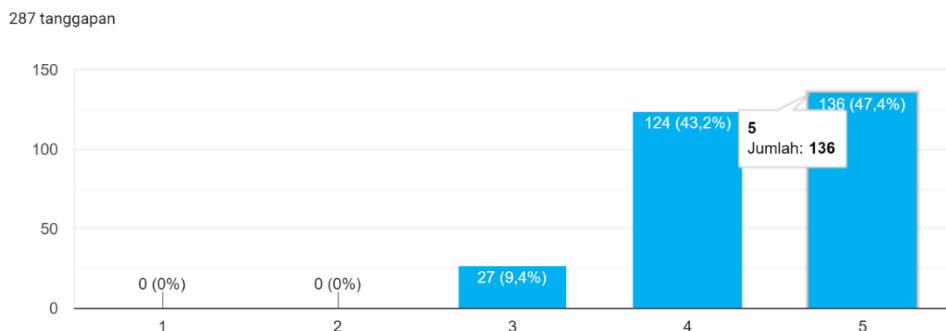
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 130 (45,3%) respon setuju, 109 (38%) respon sangat setuju, 42 (14,6%) respon netral, 4 (1,4%) respon tidak setuju, dan 2 (0,7%) respon sangat tidak setuju bahwa pelaksanaan ujian akhir dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa pada **Grafik E.4 83,3% respon sudah puas terhadap kesesuaian dengan rencana pembelajaran.**

E.5 Kesesuaian Teknik Penilaian



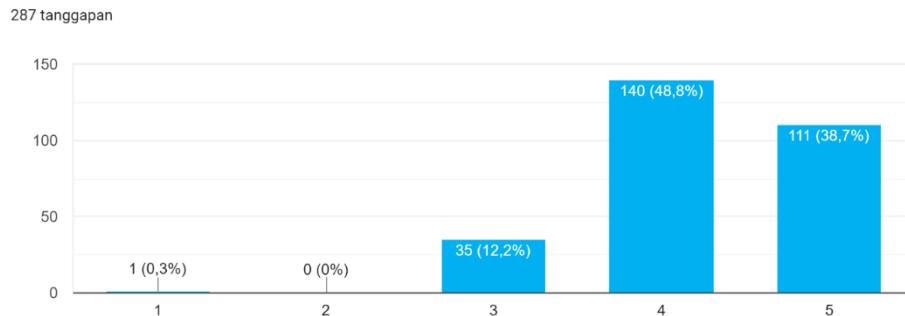
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 136 (47,4%) respon sangat setuju, 126 (43,9%) respon setuju, 22 (7,7%) respon netral, 2 (0,7%) respon tidak setuju, dan 1 (0,3%) respon sangat tidak setuju** bahwa Teknik penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan sesuai dengan kondisi pandemi. Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa pada **Grafik E.5 91,3% respon sudah puas terhadap Kesesuaian Teknik penilaian**

E.6 Kesesuaian Akumulasi Penilaian



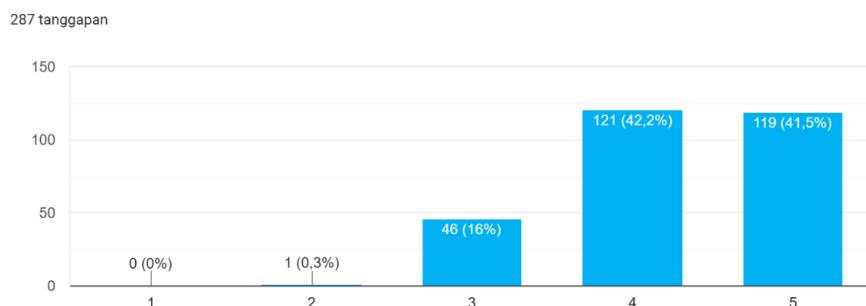
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 136 (47,4%) respon sangat setuju, 124 (43,2%) respon setuju, 27 (9,4%) respon netral, 0 (0,0%) respon tidak setuju, dan 0 (0,0%) respon sangat tidak setuju** bahwa akumulasi penilaian dilakukan berdasarkan nilai ujian dan keaktifan saya pada saat proses perkuliahan offline maupun online. Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa pada **Grafik E.6 90,6% respon sudah puas terhadap Kesesuaian akumulasi penilaian**

E.7 Bobot Penilaian



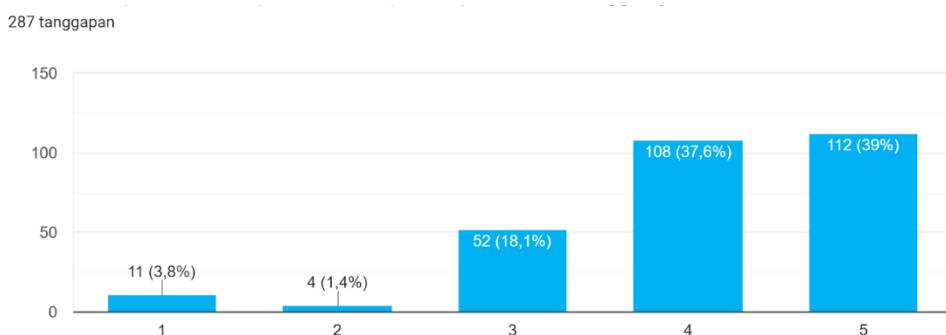
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 140 (48,8%) respon setuju, 111 (38,7%) respon sangat setuju, 35 (12,2%) respon netral, 0 (0,0%) respon tidak setuju, dan 1 (0,3%) respon sangat tidak setuju bahwa bobot penilaian menyesuaikan tipe mata kuliah.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa **pada Grafik E.7 87,5% respon sudah puas terhadap Kesesuaian bobot penilaian**

E.8 Kesesuaian Teknik Penilaian



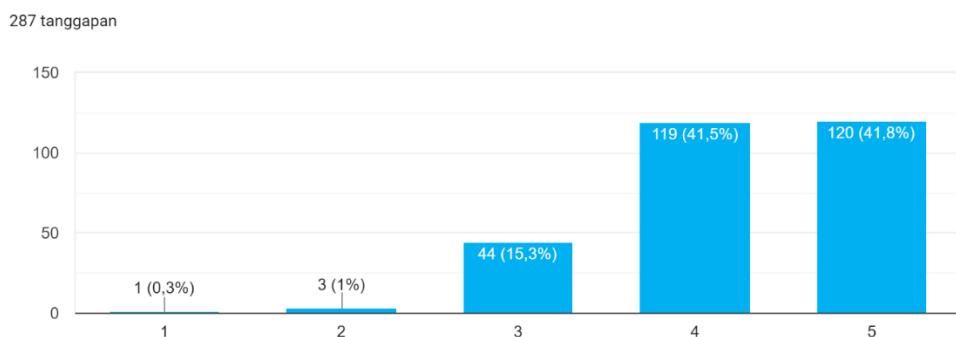
Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 121 (42,2%) respon setuju, 119 (41,5%) respon sangat setuju, 46 (16%) respon netral, 1 (0,3%) respon tidak setuju, dan 0 (0,0%) respon sangat tidak setuju bahwa Teknik penilaian proses dan hasil belajar yang digunakan sudah sesuai dengan karakter mata kuliah.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa **pada Grafik E.8 83,7% respon sudah puas terhadap Kesesuaian teknik penilaian**

E.9 Transparansi Nilai



Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 112 (39%) respon sangat setuju, 108 (37,6%) respon setuju, 52 (18,1%) respon netral, 4 (1,4%) respon tidak setuju, dan 11 (3,8%) respon sangat tidak setuju bahwa dosen transparan terhadap nilai selama proses perkuliahan hingga Ujian Akhir Semester.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa **pada Grafik E.9 76,6% respon sudah puas terhadap transparansi nilai.**

E.10 Ketepatan Waktu Input Nilai



Berdasarkan hasil analisis survey bahwa dari 287 respon, **data terbesar menunjukkan sebanyak 120 (41,8%) respon sangat setuju, 119 (41,5%) respon setuju, 44 (15,3%) respon netral, 3 (1%) respon tidak setuju, dan 1 (0,3%) respon sangat tidak setuju bahwa hasil penilaian telah dimasukkan dalam siakad maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester.** Dengan demikian, secara umum berdasarkan penilaian mahasiswa **pada Grafik E.10 83,3% respon sudah puas terhadap ketepatan waktu input nilai.**

Berdasarkan hasil survey dari setiap instrument, diperoleh data bahwa mayoritas mahasiswa sudah merasa puas terhadap sistem Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan oleh Dosen Manajemen Pendidikan Islam. Hasil survey ini akan dijadikan acuan untuk meningkatkan system dan kinerja dosen dalam melaksanakan proses Evaluasi Akhir Semester.

K. LAPORAN HASIL SURVEY PENGELOLAAN PROGRAM STUDI

**LAPORAN HASIL SURVEY
PENGELOLAAN PROGRAM STUDI
SEMESTER GENAP TAHUN 2020/2021**

Survey yang dilakukan adalah untuk seluruh mahasiswa FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdiri dari instrumen sebagai berikut:

Kuisisioner	Aspek
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan yang prodi lakukan	Kepedulian
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan Sering menanyakan masalah/kendala terkait pekerjaan yang prodi lakukan	Kepedulian
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan sering memotivasi prodi agar bekerja lebih baik	Kepedulian
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan Mengetahui perkembangan kegiatan prodi	Keterbukaan
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan Mudah untuk ditemui dan diajak bicara/diskusi	Kemudahan akses
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan Memberikan penghargaan yang cukup atas apa yang telah prodi lakukan	Penghargaan
UPPS memberikan perhatian pada pekerjaan dan Memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi SDM prodi 5	Perhatian
Sekarang ini kondisi UPPS jauh lebih baik dibanding periode sebelumnya	Kondisi UPPS

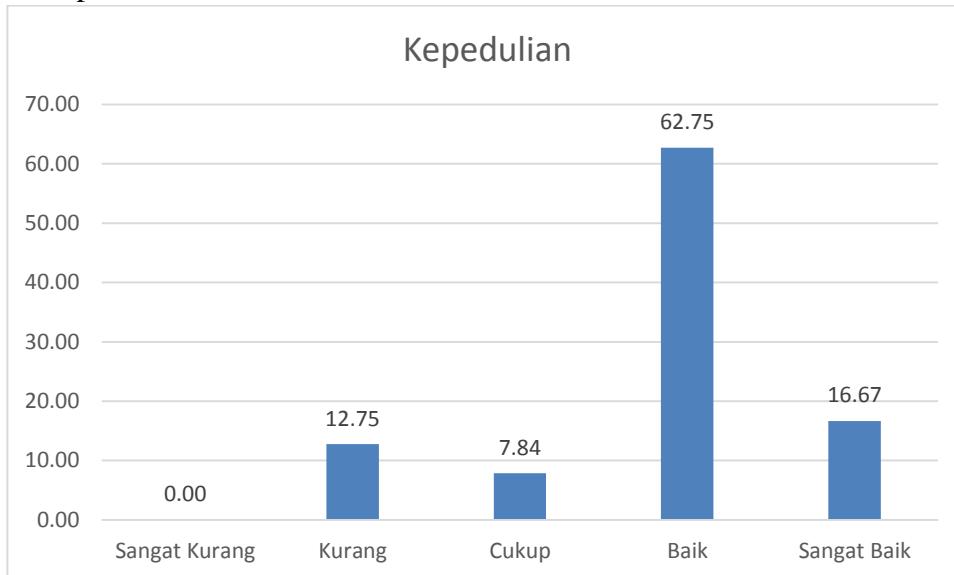
Survey dilakukan secara Online dengan memanfaatkan *google form* yang terdiri dari 5 skala.

1: Sangat kurang

- 2: kurang
- 3: cukup
- 4: baik
- 5: sangat baik

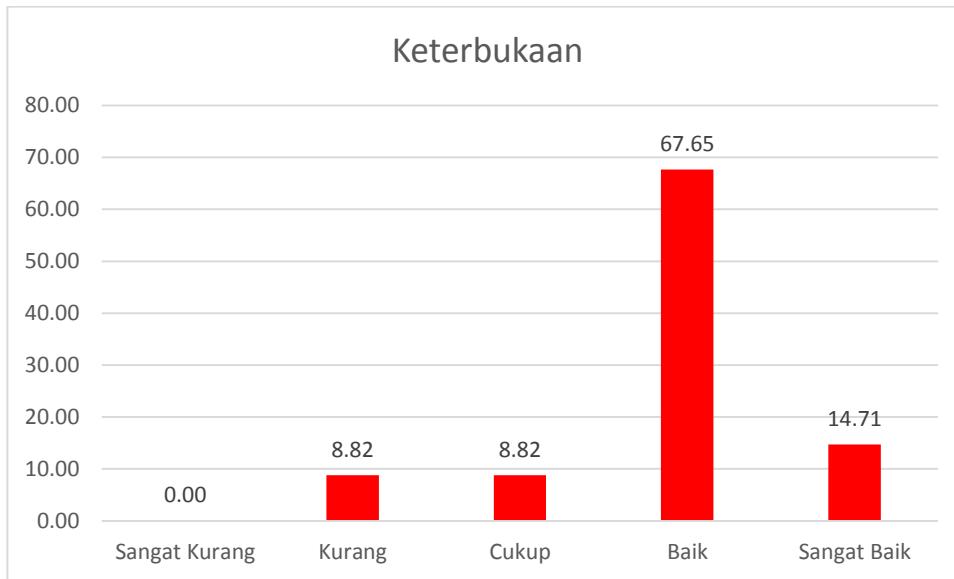
Hasil pengolahan data hasil survey terhadap 408 respoonden adalah sebagai berikut:

1. kepedulian



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kepedulian UPPS kepada program studi berada pada kategori baik yaitu sebesar 62,75% dari seluruh responden. Meskipun demikian fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survei adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan 7,84% cukup kepedulian dan 12,75% kurang. Dengan demikian harapannya kedepan UPPS akan lebih memperdulikan program studi.

2. keterbukaan



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa keterbukaan atas informasi dari UPPS kepada program studi berada pada kategori baik yaitu sebesar 62,75% dari seluruh responden. Meskipun demikian fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survei adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan 8,82% cukup terbuka bagi siapa pun dan 8,82% kurang keterbukaan. Dengan demikian harapannya kedepan UPPS akan lebih menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah hal yang penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam sebuah organisasi.

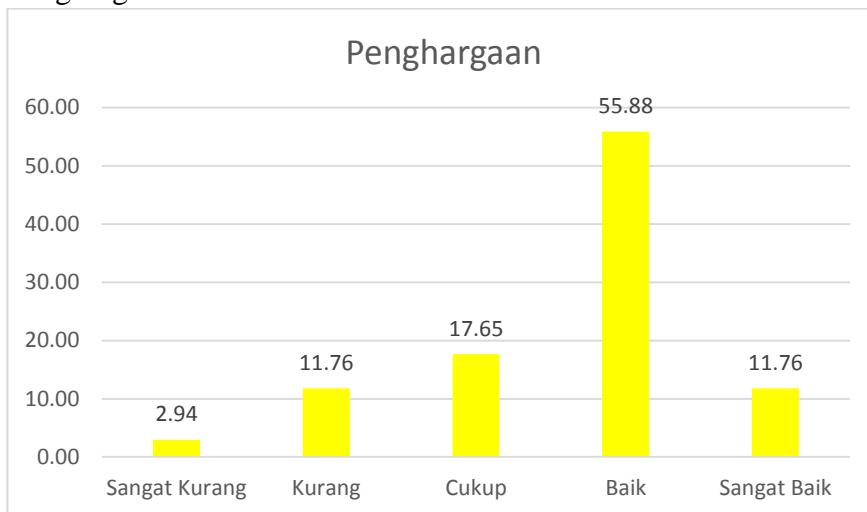
3. Kemudahan akses



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa keterbukaan atas informasi dari UPPS kepada program studi berada pada kategori baik yaitu sebesar 55,88% dari seluruh responden. Meskipun demikian fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survei adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan 14,71% kemudahan

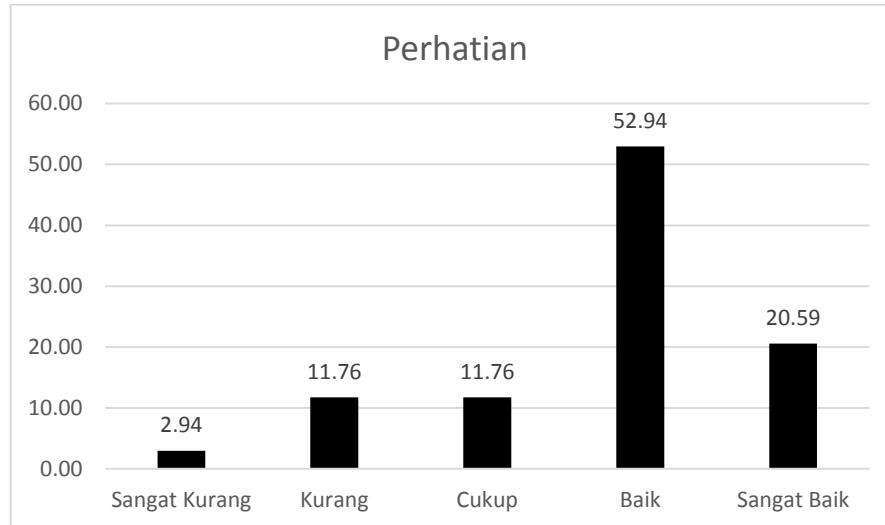
akses berada pada kategori cukup, 5,88% kurang, dan 2,94% sangat kurang untuk dalam menerima kemudahan akses. Dengan demikian dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kemudahan akses perlu perbaikan sehingga harapannya kedepan UPPS akan lebih menegaskan bahwa kemudahan akses adalah hal yang penting dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam sebuah organisasi.

4. Penghargaan



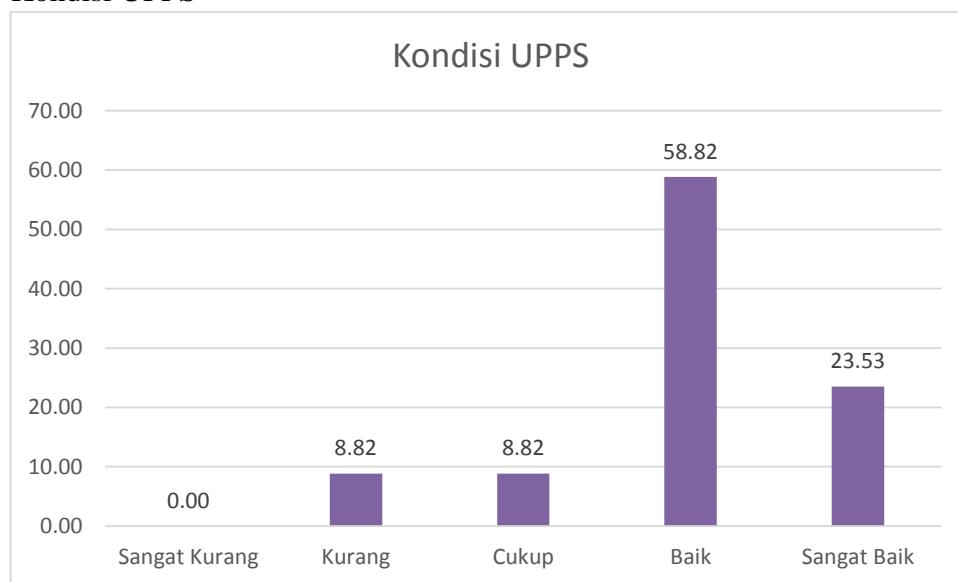
Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa aspek penghargaan dari UPPS kepada program studi berada pada kategori baik yaitu sebesar 55,88% dari seluruh responden. Meskipun demikian fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survei adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan cukup memperoleh penghargaan sebesar 17,65%, 5,88% kurang, dan 2,94% sangat kurang. Penghargaan adalah sesuatu yang sangat penting untuk diberikan kepada seluruh civitas akademik, dalam hal ini akan memicu semangat dan motivasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sebuah lembaga. Dengan demikian dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa UPPS perlu berinovasi dalam mengapresiasi atau memberikan penghargaan agar kualitas pelayanan dapat meningkat secara signifikan.

5. Perhatian



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa aspek perhatian dari UPPS kepada program studi berada pada kategori baik yaitu sebesar 52,94% dari seluruh responden. Meskipun demikian fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survei adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan cukup memperoleh penghargaan sebesar 11,76%, 11,76% kurang, dan 2,94% sangat kurang. Perhatian perlu diberikan secara terus menerus. Perhatian juga salah satu bentuk Monitoring sederhana yang dapat dijadikan sebagai kontrol dalam melaksanakan program kerja yang sudah di susun dan disepakati bersama. Dengan demikian dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa UPPS perlu terus memberikan perhatian agar dalam mengelola prodi dapat berjalan dengan maksimal.

6. Kondisi UPPS



Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa kondisi UPPS pada saat ini berada pada kategori baik yaitu sebesar 58,82% dari seluruh responden. Meskipun demikian

fokus perbaikan dan tindak lanjut dari hasil survey adalah menitik fokuskan pada responden yang menyatakan kondisi cukup sebesar 8,82% dan 8,82% kurang. Kondisi ini secara kontinu harus selalu ditingkatkan agar kedepan semakin baik dan berkualitas dalam mengelola program studi.

Berdasarkan survey di atas, maka Program Studi Manajemen Pendidikan Islam perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan UPPS sehingga tercipta komunikasi dan koordinasi yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kinerja fakultas dan program studi.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

2.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Standar kompetensi lulusan HARUS memenuhi kriteria minimal Profil lulusan dan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki spesifikasi program studi dan dipublikasikan.	Perumusan SKL dan capaian pembelajaran lulusan melalui konsorsium program studi sejenis atau nama lain yang setara.
2.	Standar kompetensi lulusan HARUS dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan dan ditinjau minimal 4 tahun sekali dengan pelibatan para pemangku kepentingan.	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki struktur kurikulum dan disosialisasikan melalui media website, buku pedoman pendidikan fakultas.	Pelaksanaan workshop pengembangan kurikulum dengan mengakomodir standar kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran sesuai KKNI.
		Standar kompetensi lulusan dimonitor dan dievaluasi setiap 4 tahun sekali dengan pelibatan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.	Pembuatan instrumen monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan.
		Terbentuknya konsorsium dosen universitas, fakultas dan Program Studi untuk menetapkan ketrampilan khusus dalam kebijakan akademik universitas.	Pembentukan konsorsium dosen universitas, fakultas dan program studi

2.2. STANDAR RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
----	-------------------------	----------------------------	----------

	Rumusan capaian Pembelajaran lulusan (CPL) wajib mengacu pada: <ol style="list-style-type: none"> a. deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI, Ulul Albab dan World Class University; dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, Ulul Albab dan World Class University. 	Program Studi Manajemen Pendidikan Islam memiliki struktur kurikulum dan disosialisasikan melalui media website, buku pedoman pendidikan fakultas	Pelaksanaan workshop pengembangan kurikulum (CPL) dan updating website
1		Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi HARUS searah dengan pencapaian visi keilmuan program studi, dan visi dan misi fakultas dan universitas berbasis Ulul Albab dan World Class University	Pembuatan matrik capaian Pembelajaran
2	Rumusan CPL HARUS memenuhi Kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan* melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran.	Capaian Pembelajaran yang dicapai lulusan HARUS dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.	Pembuatan profil spesifikasi program studi
3	Sikap sebagai Kualifikasi kemampuan lulusan wajib dimiliki oleh setiap lulusan Program studi.	Kualifikasi kemampuan lulusan Harus meliputi Kedalaman Spiritual	Pembuatan Capaian Pembelajaran yang meliputi kedalaman spiritual
4	Pengetahuan sebagaimana dimaksud diatas HARUS terumuskan dalam capaian : penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran.	Kualifikasi kemampuan lulusan Harus meliputi Pengetahuan Keislaman	Pembuatan Capaian Pembelajaran yang meliputi Pengetahuan Keislaman
5	Program studi wajib merumuskan capaian Ketrampilan umum dan Ketrampilan khusus lulusan (kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen)	Kualifikasi kemampuan lulusan Harus meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan	Pembuatan Capaian Pembelajaran yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan khusus lulusan
6	CPL HARUS mengakomodir Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.	Lulusan mengakomodir Pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang Manajemen Pendidikan Islam berbentuk Magang dan PKL	Pembuatan Pembelajaran berbasis pengalaman praktik berbentuk Magang dan PKL

2.3. STANDAR KUALITAS LULUSAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Mahasiswa HARUS memiliki standar kualitas yang diekuvalensikan dengan angka dan tingkat kualitas	Mahasiswa memiliki rata rata IPK 3,00	
2	Lulusan S1 HARUS menyusun tugas akhir dan mempublikasikan karya ilmiah	Lulusan S1 HARUS menyusun tugas akhir dan mempublikasikan karya ilmiah	
3	Lulusan S2 HARUS menyusun tesis, menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karya ilmiah	Lulusan S2 HARUS menyusun tesis, menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah.	
4	Lulusan S3 HARUS menyusun tesis, menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karya ilmiah	Lulusan S3 HARUS menyusun disertasi, menghasilkan karya ilmiah dan mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal ilmiah.	
5	Lulusan memiliki kompetensi ketrampilan umum yang menjadi penciri Program Studi/ Universitas	Lulusan memiliki ketrampilan BTQ (Baca Tulis Quran) memiliki sertifikat Tahsin dengan nilai B, praktek ibadah dan wawasan keislaman yang baik	Penyusunan dan sosialisasi kompetensi keterampilan.
		Lulusan S1 memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan atau Arab yaitu dengan skor minimal 400 TOEFL	Penyusunan dan sosialisasi kompetensi pengetahuan keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi.
		Lulusan S2 memiliki ketrampilan berbahasa Inggris dan atau Arab yaitu dengan skor minimal 450 TOEFL	
6	Waktu tunggu lulusan terserap pasar	Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 bulan	Pelaksanaan telaah hasil <i>Tracer Study</i>
7	Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek Integritas (etika dan moral), keahlian berdasarkan bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris/arab, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri	Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan adalah baik dan/atau baik sekali. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi lebih dari 80%.	Pelaksanaan telaah hasil <i>Tracer Study</i>

Ketersediaan pendataan aktif Prodi dalam mendata dan mengadakan kegiatan yang melibatkan minimal 20% alumni untuk berpartisipasi secara aktif

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

2.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran HARUS mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan (CPL) berbasis KKNI, Ulul Albab dan WCU.	Ketersediaan perangkat pembelajaran yang mengacu pada CPL berbasis KKNI, Ulul Albab dan WCU.	
2	Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran pada program profesi, magister dan doctor wajib memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	Ketersediaan perangkat pembelajaran pada program profesi, magister dan doctor yang memanfaatkan hasil Penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	Ketersediaan perangkat pembelajaran yang memuat konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.	
4	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	Ketersediaan perangkat pembelajaran untuk lulusan program profesi yang memuat teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.	

<p>5</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</p>	<p>Ketersediaan perangkat pembelajaran untuk lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis yang memuat teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.</p>
<p>6</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran untuk lulusan program doktor, dan spesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p>	<p>Ketersediaan perangkat pembelajaran untuk lulusan program doctor yang memuat filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p>

2.2. STANDAR KURIKULUM

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	<p>Kurikulum HARUS memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi. b. kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi. c. kompetensi lainnya yang bersifat khusus. 	<p>1. Program Studi memiliki rancangan, implementasi dan evaluasi kurikulum</p> <p>2. Program Studi memiliki Pedoman Kurikulum</p> <p>3. Kurikulum HARUS disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, program studi.</p> <p>4. Prosentsenya maksimal 30% untuk mata kuliah universitas dan fakultas, sedangkan program studi minimal 70%.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan workshop Pedoman Kurikulum 2. Identifikasi stakeholder 3. Pembentukan kelompok keilmuan (konsorsium) dosen universitas 4. Monitoring dan evaluasi kurikulum setiap tahun
2	<p>Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur peninjauan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu, industry, asosiasi serta perkembangan IPTEK pengguna</p>		
3	<p>Kurikulum HARUS sesuai dengan visi, misi fakultas dan universitas serta berorientasi ke depan.</p>	<p>Ketersediaan dokumen analisis internal dan eksternal Fakultas</p>	

	Penyelenggara program studi HARUS melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.	Ketersediaan prosedur monitoring dan peninjauan kurikulum
4		Kurikulum dirancang dan direview oleh tim yang terdiri dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni dan pengawasan implementasinya dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu
5	Kurikulum HARUS dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan.	Program Studi dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran HARUS memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2.3. STANDAR STUKTUR KURIKULUM

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.	Program Studi memiliki struktur kurikulum yang mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum untuk membentuk integrasi nilai-nilai keislaman.	
2.	Output implementasi kurikulum HARUS mencakup produk lulusan dan kinerja mahasiswa, yang meliputi indeks prestasi kumulatif; masa studi; kegiatan dan prestasi mahasiswa lainnya; masa tunggu dan employment serta dampak lulusan pada masyarakat lokal, regional, nasional atau internasional sesuai program studi	Seluruh Program Studi mempunyai struktur kurikulum yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan	
3.	Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.	Setiap mata kuliah HARUS dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.	
4.	Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.	1. Rasio mata kuliah pilihan yang wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:2.	
5.	Mata kuliah pilihan minimum 9 SKS.		

2.3. STANDAR STUKTUR KURIKULUM

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
6.	Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.	<p>2. Komposisi Mata Kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80% b) Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60% c) Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10% <p>Komposisi mata kuliah wajib 90 – 93% dan mata kuliah pilihan 7%– 10% dari jumlah seluruh mata kuliah.</p>	

2.4. STANDAR PENGEMBANGAN MATERI

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Materi HARUS dikembangkan oleh dosen serumpun.	Teori, nilai dan praktik (kognitif, afektif dan psikomotorik) yang HARUS diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir integrasi nilai-nilai keislaman.	
2	Standar kompetensi HARUS memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan se HARUS nya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu	Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak HARUS mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.	

2.5. STANDAR MODUL PERKULIAHAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Modul perkuliahan HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 kali pertemuan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pembuatan modul perkuliahan 2. Modul perkuliahan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu.
2	Modul perkuliahan HARUS disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu	Tersedia kebijakan tentang perkuliahan dengan system modul	
3	Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan		

2.6. STANDAR MODUL PRAKTIKUM

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Modul praktikum HARUS mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester minimal sebanyak 12 kali pertemuan	Mahasiswa wajib melaporkan kegiatan praktikum sebagai tugas akhir praktikum.	Pembuatan modul praktikum
2	Setiap modul pertemuan praktikum HARUS terdiri dari: tugas pendahuluan praktikum, tujuan praktikum, teori, prosedur pelaksanaan praktikum, dan tugas akhir praktikum.		

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

2.1. STANDAR INTEGRASI

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Proses pembelajaran HARUS dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama (Islam)	Proses pembelajaran di kelas minimal HARUS dimulai dengan salam, menata niat, membaca basmalah, membaca doa, membaca al-Quran dan diakhiri dengan hamdalah.	Penyusunan SOP/ instruksi kerja pembelajaran
2	Proses pembelajaran diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an dan/ al-Hadits	Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran HARUS selalu diarahkan untuk mengenal Allah SWT.	

2.2. STANDAR KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Karakteristik pembelajaran memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Proses pembelajaran menggunakan e learning maksimal 40% dari total pertemuan interaktif. Materi mata kuliah wajib ditampilkan pada digital locker (sistem elearning) oleh setiap pengampu mata kuliah.	Penyusunan SOP/ instruksi kerja pembelajaran e-learning
2.	Mata kuliah yang bersifat adaptif terhadap softskill wajib menerapkan metode <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning (PBL)</i> , dimana pelaksanaan PBL setara dengan 3 kali tatap muka		

2.3. STANDAR PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	<p>Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) HARUS dilengkapi dengan RPS mata kuliah paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) deskripsi mata kuliah c) capaian pembelajaran kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; e) terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f) metode pembelajaran; g) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; h) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang HARUS dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; j) daftar referensi yang digunakan. 	<p>1) Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada semua mata kuliah dengan memperhatikan integrasi ilmu umum dan nilai-nilai keislaman.</p> <p>2) Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p>	<p>1) Penguatan kelompok keilmuan dosen program studi.</p> <p>2) Sosialisasi standar SPMI</p>
2.	Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Satu Mata Kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, HARUS dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama.	

2.4. STANDAR PELAKSANAAN DAN BENTUK PEMBELAJARAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan co kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.	Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.	<p>1) Penguatan kelompok keilmuan dosen program studi.</p> <p>2) Sosialisasi standar SPMI</p>
2.	Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dan co kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum/matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan		

3. Pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
-
4. a) Kelas ICP wajib menggunakan Bahasa asing (inggris atau arab) sebagai bahasa perkuliahan.
b) Kelas regular, dari 16 pertemuan, minimal 4 pertemuan menggunakan Bahasa asing (inggris atau arab)
-
5. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
- a) Kuliah (offline dan online);
 - b) responsi dan tutorial;
 - c) seminar;
 - d) praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e) penelitian, perancangan atau pengembangan
 - f) pelatihan militer;
 - g) pertukaran pelajar;
 - h) magang;
 - i) wirausaha; dan/atau
 - j) bentuk lain PkM
-
6. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di luar Program Studi:
Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.
-
7. *Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda
.....
-
8. **Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda
.....
-
9. **Pembelajaran pada non-perguruan tinggi
.....
-
10. Proses pembelajaran untuk program sarjana **seHARUSnya** berbasis penelitian, perancangan, atau pengembangan Terdapat mata kuliah yang mendukung penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat. 1) Penguatan kelompok keilmuan dosen program studi.
2) Sosialisasi standar SPMI

* Berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

* Merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.

* Dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.

** Dilaksanakan hanya bagi program sarjana di luar bidang kesehatan.

2.5. STANDAR BEBAN BELAJAR

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).		1) Review pedoman pendidikan
2.	Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.		2) Sosialisasi standar SPMI
3.	1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan semester antara.		
4.	Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.		

2.6. STANDAR SEMESTER ANTARA

1.	Semester Antara diselenggarakan: <ol style="list-style-type: none"> selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 	Tersedia ketentuan Rektor tentang semester antara yang disosialisasikan oleh program studi	Penyusunan ketentuan dan sosialisasi
2.	Semester Antara sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan		
3.	Semester antara dapat diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.		
5.	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;		
6.	Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;		
7.	Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister atau program spesialis, dengan beban belajar		

	mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.		
8.	Program profesi dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.		
9.	Perguruan Tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum.		
10.	Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi		
11.	Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran : Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;		
12.	1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;		
13.	Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: 1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; 2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau 3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.		

2.7. STANDAR SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	

	per minggu per semester.		
2.	<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. 		
3.	<p>1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, minimal 100 (seratus) menit perminggu per semester.</p>	<p>Tersedia peta kurikulum untuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain</p>	<p>Pemetaan peta kurikulum praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain</p>

2.8. STANDAR MAHASISWA BERPRESTASI AKADEMIK TINGGI

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.		
2	Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan senat universitas, dapat mengikuti program magister bersamaan dengan penyelesaian program sarjana.		
3	Mahasiswa program magister yang memiliki prestasi luar biasa sebagaimana ditetapkan senat, dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister.	Tersedia ketentuan Rektor tentang Mahasiswa berprestasi akademik tinggi	Penyusunan ketentuan dan sosialisasi
4	Mahasiswa program sarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam kompetisi ilmiah nasional sebagaimana ditetapkan rektor, dapat lulus tanpa melewati ujian tugas akhir.		
5	Mahasiswa program pascasarjana yang memiliki prestasi luar biasa dalam publikasi internasional sebagaimana ditetapkan Rektor, dapat lulus tanpa ujian tugas akhir.		
6	Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi untuk tingkat sarjana setelah dua semester pada tahun pertama dapat menempuh hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.		

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

2.1. STANDAR PRINSIP PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi*.	Ketersediaan kebijakan akademik tertulis oleh senat universitas	Penyusunan prinsip standar penilaian Universitas

* Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.

* Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

* Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

* Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

* Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

2.2. STANDAR TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Teknik penilaian terdiri atas: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.		Penyusunan Standar Instrumen penilaian sesuai dengan spesifikasi rodi asing
2	Instrumen penilaian terdiri atas penilaian praktikum terdiri dari Penugasan, Partisipasi/praktikum (unjuk kerja), Kuis, UTS (lisan/tertulis), dan UAS (lisan/tertulis) dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.		
3	Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.		
4	Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.		
5	Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan		

2.3. STANDAR MEKANISME PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Mekanisme penilaian terdiri atas:		Penyusunan SOP

2.2. STANDAR TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.		dalam melaksanakan penilaian
2	Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.		
3	Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.		

2.4. STANDAR PELAKSANAAN PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.		
2	Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: dosen pengampu atau tim dosen pengampu; a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Terdapat dokumen SK tim penilai/ pelaksana dan pengawas ujian	

2.5. STANDAR PENILAIAN MATA KULIAH

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Item Penilaian mata kuliah tanpa praktikum terdiri dari Penugasan, Partisipasi, Kuis, UTS, dan UAS		
2	Item Penilaian mata kuliah dengan praktikum terdiri dari Praktikum (30%), Partisipasi, Kuis, UTS, dan UAS		
3	Komposisi Nilai tugas dapat diambil sebesar 20% dari nilai UAS. tugas dapat berupa Kuis, Makalah, Pembuatan Program, Presentasi dan diskusi, Pekerjaan Rumah,		
4	Bobot Penilaian Mata kuliah Utama adalah 50%		

2.2. STANDAR TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	Nilai UTS + 50% Nilai Ujian Utama		

2.6. STANDAR PELAPORAN PENILAIAN

- | | |
|--|---|
| <p>1 Metode penilaian dikomunikasi ke mahasiswa ketika perkuliahan dimulai dalam bentuk kontrak perkuliahan.</p> <p>2 Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam Penilaian hasil belajar:</p> <p>Untuk program sarjana dinyatakan dengan menggunakan skala 8 yang dinyatakan dengan huruf: A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing bobot nilainya (<i>tertuang dalam ketentuan akademik fakultas asing-masing</i>). Mahasiswa dinyatakan lulus minimal C (2,0)</p> <p>Untuk program magister dan doktor dinyatakan dengan menggunakan skala 8 yang dinyatakan dengan huruf: A, B+, B, C+, C, D+, D dan E yang masing-masing bobot nilainya (<i>tertuang dalam ketentuan akademik fakultas asing-masing</i>). Mahasiswa dinyatakan lulus minimal B (3,0)</p> <p>3 Huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>5 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>6 Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>7 Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>8 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara online melalui student site setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> | <p>Dokumen penilaian dalam SIAKAD sesuai dengan teknik, kriteria, dan bobot penilaian.</p> <p>Transkrip nilai semester dan atau KHS sementara dapat diakses secara online di SIAKAD</p> <p>Hasil penilaian telah dimasukkan dalam SIAKAD maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester diselenggarakan</p> |
|--|---|

2.7. STANDAR STANDAR KELULUSAN

- 1 Mahasiswa program sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang

- ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- 2 Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
 - 3 Kelulusan mahasiswa dari program magister dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
 - a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)

Ketersediaan Kebijakan Akademik (Senat Universitas)

2.8. STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

- 1 Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 25 mahasiswa tiap semester.
- 2 Jumlah pertemuan pembimbingan akademik minimum empat (4) kali tiap semester.
- 3 Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik

Pembimbingan akademik mahasiswa terlaporkan oleh dosen setiap semester melalui buku kendali pembimbingan akademik

- a. Pedoman Pembimbingan akademik
- b. Penyusunan buku bimbingan akademik

2.9. STANDAR PEMBIMBING TUGAS AKHIR

- 1 Kualifikasi akademik pembimbing tugas akhir:

1. Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman

Penyusunan kartu kendali bimbingan

- a) Pembimbing tugas akhir program sarjana (S1) minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) yang sesuai bidang ilmu.
 - b) Pembimbing tugas akhir program magister (S2) minimum memiliki jabatan fungsional Lektor bergelar Doktor (S3) yang sesuai bidang ilmu.
 - c) Pembimbing tugas akhir program Doktor (S3) minimum memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala bergelar Doktor yang sesuai bidang ilmu.
- 2 Jumlah pembimbingan tugas akhir minimum 10 kali dan dilengkapi dengan buku jurnal kendali bimbingan tugas akhir

2.10. STANDAR SIDANG TUGAS AKHIR SKRIPSI

- | | |
|--|---|
| <p>1 Sidang tugas Akhir Skripsi dilakukan oleh 2 (dua) penguji dan dosen pembimbing.</p> <p>2 Kualifikasi akademik penguji tugas akhir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguji tugas akhir program sarjana (S1) minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli bergelar Magister (S2). 2) Penguji tugas akhir program magister (S2) minimum Lektor dan bergelar Doktor (S3). 3) Penguji tugas akhir program Doktor (S3) minimum Lektor Kepala bergelar Doktor (S3). <p>3 Penilaian tugas akhir mencakup: Isi Penulisan, Penguasaan Materi, dan Presentasi.</p> | <p>pembimbingan Tugas Akhir tugas akhir</p> <p>2. Jumlah mahasiswa Pembimbing TA sesuai dengan Pedoman Akademik Dosen</p> <p>Mahasiswa dinyatakan lulus sidang apabila memperoleh minimal rata-rata 70.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses Pengujian mengikuti buku pedoman Tugas Akhir 2) Jumlah mahasiswa yang diuji TA sesuai dengan Pedoman Akademik Dosen. |
|--|---|

2.11. STANDAR SIDANG KOMPREHENSIF

- | | |
|--|---|
| <p>1 Program Sarjana (S1) dapat menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai syarat mengikuti sidang skripsi</p> <p>2 Pelaksanaan Sidang Komprehensif dilakukan secara tertulis maupun lisan.</p> | <p>Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mempunyai nilai minimal 60.</p> <p>Ujian Komprehensif terdiri dari bidang studi sesuai program studi dan bidang studi keagamaan</p> |
|--|---|

2.12. STANDAR DOKUMEN KELULUSAN

- | | |
|---|---|
| <p>1 Dokumen yang diterima oleh lulusan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Ijazah; b) sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi; c) gelar; dan surat keterangan SKPI (surat | <p>Ketersediaan kebijakan tentang ijazah dan SKPI</p> |
|---|---|

Keterangan Pendamping Ijazah)

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

2.1. STANDAR KUALIFIKASI DOSEN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta berakhlak mulia dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dosen berkualifikasi magister dan doktor yang memiliki kemampuan bahasa Arab/Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat; 2. Kompetensi dosen sesuai dengan mata kuliah yang diampu 3. Dosen tetap adalah tenaga pendidik melalui tes dengan formasi dosen 4. Dosen pada program doktor (S3) HARUS melakukan rekognisi dosen pada setiap tahun dan menulis secara aktif pada jurnal terakreditasi satu kali dalam setahun 5. Terdapat pedoman rekrutmen dosen yang transparan dan akuntabel 	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembekalan kepada dosen dengan pelatihan kemampuan berbahasa untuk meningkatkan nilai TOEFL/TOAFL b) Pelaksanaan pengangkatan dosen tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. c) Pelaksanaan rekrutmen dosen secara transparan, akuntabel dan professional d) Pemberian fasilitas dosen untuk melakukan rekognisi dalam bentuk keikutsertaan sebagai <i>speaker</i> atau <i>presenter</i> seminar Internasional atau nasional
2	Dosen prodi sarjana (S1) HARUS berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan, atau bersertifikat paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi		<ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan pengangkatan dosen tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi b) Penempatan dosen sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu.
3	Dosen program magister (S2) HARUS berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. atau bersertifikat paling rendah setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI yang relevan dengan		<ul style="list-style-type: none"> a) Pengangkatan dosen tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi b) Peningkatan kompetensi dosen dilaksanakan setiap

2.1. STANDAR KUALIFIKASI DOSEN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	program studi		<p>tahun</p> <p>c) Penempatan dosen sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu.</p>
4	Dosen program doktor (S3) HARUS berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi atau bersertifikat paling rendah setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi.		<p>a) Pengangkatan dosen tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi</p> <p>b) Peningkatan kompetensi dosen dilaksanakan setiap tahun</p> <p>c) Penempatan dosen sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu.</p>
5	Pengangkatan dosen baru di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai dosen tetap PNS, HARUS memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat Sangat Baik untuk akreditasi prodi atau institusi.	Untuk dosen tidak tetap mencantumkan portofolio prestasi akademik dan penilaian dari teman sejawat	Pengangkatan dosen tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
6	Dosen pada program studi terdiri atas dosen tetap PNS, dosen tetap Non PNS, dan dosen tidak tetap.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK Rektor tentang <i>Homebased Dosen</i> 2. Dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS terdata pada FORLAP DIKTI 3. Terdapat aturan rekrutmen yang jelas mengenai dosen tidak tetap 4. Terdapat profil dosen pada website Fakultas. 	Pengangkatan dosen tidak tetap melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
7	Dosen tetap PNS merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.		
8	Jumlah dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.	Terdapat 80 % jumlah dosen tetap di setiap program studi.	Pengusulan rekrutmen dosen PNS berdasarkan asesmen dari setiap program studi dengan mempertimbangkan rasio kecukupan dosen dan mahasiswa
9	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang dan memenuhi rasio jumlah mahasiswa dengan dosen tetap (RMD), yaitu untuk program studi bidang ilmu eksakta ($RMD \leq 30$) dan bidang studi non eksakta ($RMD \leq 45$).	Menetapkan Rasio Dosen dan Mahasiswa 1 berbanding 45 bagi prodi non eksakta dan 1 berbanding 30 bagi prodi eksakta	Pemenuhan jumlah rasio dosen dan mahasiswa 1 berbanding 30 bagi prodi eksakta dan 1 berbanding 45 bagi prodi non-eksakta

2.1. STANDAR KUALIFIKASI DOSEN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
10	Dosen tetap PNS dan dosen tidak tetap non PNS serta Dosen luar Biasa wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi atau mata kuliah yang diampu.	1. Terdapat bukti fisik yang menunjukkan linieritas antara bidang ilmu dosen dengan mata kuliah yang diampu (gap analisis kompetensi dosen) 2. Terdapat daftar urutan kepangkatan dan perencanaan pengembangan karier dosen	1. Pemberian fasilitas oleh LP2M dalam proses akselerasi guru besar dan lektor kepala dalam hal publikasi penelitian 2. Bagian kepegawaian proaktif dalam hal membantu proses administrasi
11	Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi lektor kepala/ profesor adalah 10% dari seluruh jumlah dosen program studi.		
12	Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi doktor adalah 40% dari seluruh jumlah dosen program studi.	Terdapat program atau kegiatan yang mendorong para dosen untuk studi lanjut	Pelaksanaan sosialisasi kegiatan yang dapat membantu para dosen studi lanjut
13	Prosentase dosen prodi yang berkualifikasi Magister 100 % dari seluruh jumlah dosen program studi	Terdapat <i>digital profiling</i> yang terbaru	1) Penerbitan edaran WR-2 tentang <i>digital profiling</i> . 2) Pelaksanaan sosialisasi standar SPMI
14	Prosentase jumlah dosen tidak tetap maksimal 20%		Pelaksanaan rekrutmen dosen tidak tetap sesuai dengan kebutuhan.

2.2. STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

1	Penetapan Beban Kerja Dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Keputusan Rektor tentang Pedoman Beban Kerja Dosen.		
2	Penghitungan beban kerja dosen di dasarkan antara lain pada: a) kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	Ketersediaan kebijakan beban kerja dosen dan minimal setiap 2 (dua) tahun dilakukan peninjauan.	Pelaksanaan sosialisasi oleh LPM tentang Pedoman Beban Kerja dosen minimal satu semester sebelum pemberlakuan
3	Penetapan beban kerja dosen adalah sebagai berikut; a) Dosen tetap sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit	Terdapat pedoman BKD yang mengatur tentang Beban kerja dosen tetap (baik PNS dan Non PNS), maupun dosen tidak tetap	

2.2. STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

	<p>semester.</p> <p>b) Dosen tidak tetap sebanyak-banyaknya 8 satuan kredit semester.</p>		
4	Beban akademik bagi dosen yang menduduki jabatan struktural diatur oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terdapat Pedoman BKD yang mengatur tentang Dosen dengan tugas tambahan	Penyusunan Pedoman BKD yang mengatur tentang Dosen dengan tugas tambahan
5	Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen.	Ketersediaan kebijakan tentang beban kerja dosen wajib mengajar Dosen dengan tugas tambahan mengikuti PAD.	
6	Dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor HARUS telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir.	Dosen pembimbing utama pada program doktor HARUS mempublikasikan karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional satu kali dalam setahun atau jurnal internasional yang bereputasi satu kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun	Pemberian fasilitas oleh LP2M pada setiap dosen untuk mempublikasikan karya ilmiahnya

2.3. KUALIFIKASI TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan D3 atau S1 yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Universitas memiliki kebijakan pengelolaan tenaga kependidikan	Penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan tenaga kependidikan
2	Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		

2.4. STANDAR PEREKRUTAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Teknis pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan PNS mengikuti petunjuk yang ditetapkan oleh Kementerian Aparatur Negara dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.		Pembentukan tim pengadaan dosen dan tenaga kependidikan PNS
2	Teknis pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS dan pegawai tidak tetap mengikuti pedoman kepegawian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Universitas memiliki kebijakan pengelolaan Tenaga kependidikan	Penyusunan kebijakan pengelolaan Tenaga kependidikan dan mensosialisasikannya
3	Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan bukan PNS UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HARUS melalui tahapan:	Terdapat proses dan tahapan rekrutmen yang transparan dan akuntabel diawali proses pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman dan	Pelaksanaan sosialisasi proses seleksi pada website resmi universitas

2.2. STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

	2) pendaftaran; 3) seleksi; 4) pengumuman hasil seleksi; dan 5) pengangkatan.	pengangkatan	
--	--	--------------	--

2.5. STANDAR MASA ORIENTASI – PRAJABATAN

1	Masa orientasi diberlakukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.	1) Ketersediaan modul orientasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS 2) Masa orientasi diberlakukan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS yang dilaksanakan setiap tahun	Penyusunan modul orientasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS
2	Masa orientasi tenaga pendidik bukan PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.		
3	Masa orientasi tenaga kependidikan tetap bukan PNS dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.		
4	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS telah menjalani masa orientasi dan dinyatakan berkinerja baik, akan tetapi tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai universitas, diberikan kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai universitas periode berikutnya.		
5	Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS telah menjalani masa orientasi dan dinyatakan lulus pendidikan pelatihan prajabatan pegawai Universitas, tetapi tidak berkinerja baik, diberhentikan sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS.		
6	tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS yang telah memenuhi masa orientasi, berkinerja baik, dan dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan pegawai Universitas dapat diusulkan untuk mendapat hak, kewajiban, dan konsekuensi administratif secara penuh sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap bukan PNS.		
7	Rektor merencanakan program untuk memfasilitasi dosen sebagai tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam atau luar negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses	1. Terdapat program rekognisi dosen 2. Menyediakan anggaran untuk rekognisi dosen	Pengalokasian anggaran minimal satu kali setahun bagi setiap dosen untuk melakukan

2.2. STANDAR BEBAN KERJA DOSEN

	pembelajaran setiap tahunnya		rekognisi dosen
2.6. STANDAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Tersedia blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.	Teknis pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap dan pegawai tidak tetap mengikuti pedoman kepegawaian yang ditetapkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Penyusunan blue print pembinaan karir dosen
2	Tenaga kependidikan kecuali tenaga administrasi HARUS memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	Laboran, pustakawan, operator minimal berpendidikan S1 sedangkan tenaga teknis minimal D3.	Pelaksanaan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

2.1. STANDAR SARANA

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1.	Standar sarana pembelajaran minimal terdiri atas: a) perabot, b) peralatan pendidikan, c) media pendidikan, d) buku, buku elektronik, dan repositori; e) sarana teknologi informasi dan komunikasi; f) instrumentasi eksperimen; g) sarana olahraga; h) sarana berkesenian; i) sarana fasilitas umum; j) bahan habis pakai; dan k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.	1) Tersedia dokumen tentang Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. 2) Ma'had HARUS dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlak, pendalamann spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa. 3) PTIPD dan Pusat Bahasa universitas HARUS	1) Pengadaan sarana pembelajaran yang memadai 2) Penyusunan dokumen pengendalian barang 3) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran
2.2. STANDAR PRASARANA			
1.	Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: 1) Lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan total luas minimum 10.000 meter persegi. 2) Total luas ruang tidak kurang dari 20 m ² serta dilengkapi alat pendingin ruangan/ventilasi, papan tulis, lcd viewer, listrik, akses Internet;		

2.1. STANDAR SARANA

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	<p>3) Ruang kelas yang dapat menampung maksimum 40 mahasiswa dengan luas minimum 1,5 m²/mahasiswa.</p> <p>4) Ruang Auditorium yang dapat menampung minimal 100 sivitas akademika untuk kegiatan seminar, maupun diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>5) Perpustakaan dengan luas minimal 1,5 m²/orang pengunjung</p> <p>6) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.</p> <p>7) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal</p> <p>8) Perpustakaan universitas memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan</p> <p>9) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas HARUS dilengkapi dengan perpustakaan elektronik</p> <p>10) Perpustakaan universitas HARUS bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik</p> <p>11) Perpustakaan universitas HARUS menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.</p> <p>12) Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi</p> <p>13) Bahan pustaka berupa jurnal terakreditasi minimal 5 judul</p> <p>14) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai dengan kurikulum dan jumlah pemakaian yang direncanakan serta kebutuhan dan pemanfaatan ruang.</p> <p>15) Universitas, Fakultas, Program studi dan semua unit HARUS dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kapasitas bandwith minimal sebesar 2 Mbs per orang.</p> <p>16) Universitas HARUS menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus</p> <p>17) tersedia tempat berolahraga dengan sarana yang representatif, minimal tersedia lapangan futsal, badminton, basket, dan tenis meja</p>	<p>memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi</p> <p>4) PTIPD universitas HARUS dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses</p>	

2.1. STANDAR SARANA

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	18) Universitas menyediakan prasarana: masjid, kantin, bank, poliklinik dan lainnya.		
	19) Universitas menyediakan ruang kesenian untuk latihan dan melakukan pentas seni		
	20) Universitas menyediakan ruang unit kegiatan mahasiswa untuk memenuhi rencana dan jenis kegiatan mahasiswa (teater, seni tari, ruang senat mahasiswa).		
	21) Universitas menyediakan ruang pimpinan perguruan tinggi dengan minimum luas 12 (dua belas) m ² per orang, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, peralatan kantor, peralatan komunikasi, peralatan penunjang sistem informasi mutu pendidikan.		
	22) ruang tata usaha dan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga privasi HARUS disediakan dengan luas minimum 4 (empat) m ² per dosen, dilengkapi dengan perabot kerja, perabot penyimpanan, dan akses informasi dan komunikasi.		
	23) Universitas HARUS menyediakan fasilitas umum meliputi: jalan; tempat parkir, petunjuk jalan, trotoar penghubung antar gedung yang beratap, fasilitas yang ramah untuk difabel, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data		
	24) Semua gedung HARUS dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai.		
	25) Bangunan kampus HARUS memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.		
	26) Prasarana HARUS dipelihara secara berkala dan berkesinambungan sehingga dapat digunakan sesuai masa pakai.		

2.3. STANDAR PERAWATAN

	1) Perawatan sarana dan prasarana HARUS dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.		
	2) Universitas HARUS memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelengaraan program dan kegiatan akademik.		
	3) Universitas HARUS menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.		

2.1. STANDAR SARANA

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	4) Semua peralatan HARUS dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan		
	5) Untuk mencegah kerusakan dan mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana HARUS tersedia gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Program studi dan unit.		
	6) Semua fasilitas fisik dan peralatan HARUS dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.		

2.4. STANDAR PEROLEHAN SARANA DAN PRASARANA

	1) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat. 2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Universitas, kecuali ada perjanjian tertentu. 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HARUS digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Universitas. 4) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi hak milik negara.	1) Dalam hal-hal tertentu, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan. 2) Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.	Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan
	Standar kepuasan sarana dan prasarana pembelajaran		
	1) Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali. 2) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah 3) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 80%.		Sosialisasi dan pelaksanaan audit mutu internal

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
--	-------------------------	----------------------------	----------

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.1. RENCANA KOMPETENSI LULUSAN			
1	<p>1) Senat Universitas menyusun kebijakan akademik.</p> <p>2) Universitas menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.</p>	<p>1) Tersedianya dokumen Kebijakan Akademik</p> <p>2) Terbentuk konsorsium dosen</p>	<p>1) Penyusunan kebijakan akademik yang melibatkan ahli dari internal maupun eksternal</p> <p>2) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan akademik.</p>
2	Universitas menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum dan kebijakan suasana akademik terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> dan berorientasi masa depan	<p>1) Penyusunan kebijakan pengembangan kurikulum yang melibatkan ahli dari internal maupun eksternal</p> <p>2) Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengembangan kurikulum.</p>
2.2. RENCANA ISI PEMBELAJARAN			
1	Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan berbasis integrasi ilmu dan agama.	100% Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester pada setiap mata kuliah	Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan RPS
2	Program Studi HARUS melakukan penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.	Ketersediaan kebijakan dan operasional monitoring dan evaluasi kurikulum dan RPS.	Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan pedoman monitoring serta evaluasi kurikulum dan RPS
3	Ketersediaan kebijakan tentang Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur.	Tersedia kalender akademik per tahun akademik	Penyusunan dan sosialisasi kalender akademik
4	Program Studi pada setiap semester menawarkan mata kuliah sesuai dengan Kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Pengelola prodi HARUS melakukan registrasi mata kuliah pada SIAKAD setiap awal semester	
5	Jumlah dan kualifikasi dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan standar dosen	Tersedia gap analisis kelompok dosen sesuai	1) Pelaksanaan analisis kebutuhan dosen

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
		rumpun keilmuan	2) Pengusulan rekrutmen dosen berdasarkan hasil analisis kebutuhan
6	Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar tenaga kependidikan.	1) Tersedianya jumlah tenaga kependidikan yang memadai 2) Tersedianya Anjab dan ABK 3) Pengusulan rekrutmen tenaga kependidikan	1) Pemetaan jumlah tenaga kependidikan 2) Penyusunan Anjab dan ABK 3) Pengusulan rekrutmen tenaga kependidikan

2.3. RENCANA PRASARANA DAN SARANA

1	Tersedianya prasarana dan sarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan Standar sarana dan prasarana Pendidikan.	Tersedianya anggaran investasi pembelajaran Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala	Penyusunan anggaran investasi pembelajaran Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran secara berkala
2	Tersedianya jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Adanya jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Penyusunan jadwal pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran

2.4. PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMBELAJARAN

1	Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;	1) Tersedian pedoman pembelajaran. 2) Tersedia dokumen monitoring perkuliahan 3) Tersedia dokumen kurikulum	1) Penyusunan pedoman pembelajaran 2) Pelaksanaan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, dan standar penilaian. 3) Pelaksanaan monitoring perkuliahan
2	Program Studi HARUS melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik bernuansa Islami dengan mengimplementasikan budaya mutu.	Tersedia dokumen pengembangan suasana akademik	Penyusunan pedoman kegiatan akademik yang menciptakan suasana Islami berdasarkan budaya mutu.
3	Program Studi HARUS menyediakan modul perkuliahan, modul praktikum, dan dokumen RPS yang memuat metode pembelajaran dan capaian pembelajaran.	Tersedianya modul perkuliahan, modul praktikum, dan metode pembelajaran lain yang sesuai	1) Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan modul perkuliahan dan praktikum 2) Pelaksanaan <i>workshop</i> penyusunan RPS.

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.5. PENGENDALIAN PEMBELAJARAN			
1	Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri.		Pelaksanaan workshop kurikulum pada tingkat prodi, fakultas dan universitas dengan
2	Prosentase kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%.		Pelaksanaan <i>tracer study</i> pada tingkat prodi, fakultas dan universitas
3	Prosentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%.		Pelaksanaan <i>review</i> materi perkuliahan dan praktikum oleh tim konsorsium
2.6. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN			
1	Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dilaksanakan secara online dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 2 kali tiap semester yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> RPS tiap matakuliah kehadiran dosen dan mahasiswa kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum kegiatan pengembangan suasana akademik, kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, Rencana tindak lanjut 	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya kebijakan tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran dilaksanakan secara online dan terdokumentasi sekurang-kurangnya 2 kali tiap semester. Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program studi dalam kegiatan pembelajaran. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan workshop penyusunan kebijakan tentang Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap program studi dalam kegiatan pembelajaran oleh UPM di tingkat Fakultas
2.7. PELAPORAN PEMBELAJARAN			
1	Fakultas atau Program Studi HARUS membuat pelaporan setiap semester atau tahun ajaran akademik yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan, pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk bila dilakukan peninjauan/ perbaikan, pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait, pelaporan dosen dan tenaga kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan dari pihak terkait, pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam 	Tersedianya laporan kinerja program studi dalam pelaksanaan program pembelajaran melalui SIAKAD	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pelatihan operator/admin SIAKAD tingkat fakultas dan prodi di bawah koordinasi UTIPD di tingkat universitas Pelaksanaan rapat/koordinasi rutin tim operator /admin SIAKAD tingkat fakultas dan prodi di bawah koordinasi UTIPD di tingkat universitas

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.		
2.8. STANDAR TATAKELOLA PEMBELAJARAN			
1	Universitas HARUS menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.		
2	Universitas HARUS menjamin dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi.	Universitas HARUS menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran	1) Pelaksanaan workshop penyusunan pedoman pembelajaran 2) Pelaksanaan workshop metodologi pembelajaran
3	Pimpinan universitas, fakultas, HARUS melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.		
4	Setiap fakultas atau Program Studi HARUS memiliki pedoman yang mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"> Kurikulum pendidikan dan RPS Struktur organisasi satuan pendidikan; Pembagian tugas di antara dosen; Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; Peraturan/ Pedoman pendidikan; Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; Biaya operasional satuan pendidikan. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang- kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik; Rencana anggaran pendapatan dan 		Penyusunan Pedoman Pembelajaran

	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	<p>belanja fakultas untuk masa kerja satu tahun anggaran;</p> <p>m. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja fakultas untuk satu tahun anggaran.</p>		
5	<p>Program Studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jadwal monitoring, evaluasi dan perubahan kurikulum, b. Pemasaran matakuliah dan jadwal perkuliahan setiap semester, c. Jadwal pelaksanaan seminar proposal, ujian komprehensif dan ujian skripsi, d. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran. 		Pelaksanaan rencana tindak lanjut tinjauan manajemen tiap tahunan
6	Rencana kerja tahunan HARUS mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya.		
7	Pelaksanaan pengelolaan pendidikan HARUS diperlengkung-jawabkan oleh ketua Program Studi kepada Dekan dan Rektor secara berjenjang.		

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.1. BIAYA INVESTASI PENDIDIKAN TINGGI			
1	Universitas HARUS menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	Tersusunnya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.	Penyusunan pedoman penggalangan dana yang berisi kebijakan, mekanisme dan prosedur penggalangan dana lain secara akuntabel dan transparan
2	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan Renstra.	Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi yang besarnya ditentukan berdasarkan RKAKL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan persentase biaya investasi pendidikan dalam RKAKL 2) Pelaksanaan koordinasi dengan seluruh fakultas, lembaga, dan unit-unit dalam hal perencanaan,

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
			pengelolaan, dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana.
3	Universitas HARUS melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.	Tersedia dokumen penetapan fix cost dan variable cost oleh Kabiro	Pelaksanaan raker analisis biaya operasional pendidikan tinggi
4	Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.		Penetapan biaya investasi pada sarana dan prasarana pembelajaran sekurang-kurangnya memenuhi kriteria minimal pada RKAKL
5	Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/ lokakarya/magang.		Penetapan biaya investasi pengembangan dosen yang meliputi studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang pada RKAKL
6	Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pengembangan tenaga pendidikan yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya.		Penetapan biaya investasi pengembangan tenaga kependidikan yang meliputi studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang pada RKAKL

2.2. BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

1	Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.		<ol style="list-style-type: none"> 1) Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan per mahasiswa per tahun 2) Pelaksanaan sosialisasi hasil penetapan anggaran biaya operasional pendidikan. 3) Pelaksanaan evaluasi ketercapaian standar biaya operasional pendidikan
2	Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 20		<ol style="list-style-type: none"> 1) Perhitungan jumlah biaya operasional setiap unit. 2) Perencanaan

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	juta/mahasiswa/ tahun untuk program Sarjana (S1).		pembiayaan secara matang dan sesuai regulasi.
3	Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 10 juta per dosen tetap per tahun		1) Peningkatan alokasi dana penelitian 2) Pelaksanaan pelatihan untuk mendapat hibah dana penelitian
4	Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 5 juta per dosen tetap per tahun.		3) Peningkatan alokasi dana pengabdian 4) Pelaksanaan pelatihan untuk mendapat hibah dana pengabdian
5	Pendanaan operasional pendidikan dapat diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti: hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta baik dalam dan luar negeri.		Peningkatan dan perluasan jaringan/ mitra melalui berbagai kerjasama dengan berbagai pihak
6	Universitas HARUS mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar UKT mahasiswa.		Pembentukan badan usaha dan penggalangan hibah dari berbagai pihak

2.3. MONITORING ANGGARAN PEMBIAYAAN

1	Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabel dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran.	Universitas HARUS mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terlaporkan secara on-line	1. Penyusunan pedoman pembiayaan pembelajaran 2. Penyusunan dan penyampaian laporan pemanfaatan anggaran pembiayaan secara berkala kepada pihak terkait
2	Universitas HARUS melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Tersusunnya laporan keuangan secara berkala	Pemantauan tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran oleh pihak terkait
3	kebijakan pengelolaan keuangan HARUS berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.	Rektor HARUS membentuk badan pengawas internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI).	1. Penyelenggaraan audit keuangan oleh SPI 2. Penetapan kriteria anggota SPI 3. Pelaksanaan rekrutmen tim SPI
4	Rektor, dekan, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan		1. Pelaksanaan analisis kebutuhan anggaran berdasarkan program

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	HARUS berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA).		yang telah ditetapkan 2. Penetapan SOP Perencanaan dan Keuangan
5	Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HARUS disosialisasikan kepada sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel dan transparan.		Pelaksanaan sosialisasi dokumen yang terkait dengan prosedur pengelolaan keuangan
6	Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja HARUS mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HARUS mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat fakultas, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas, program studi di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pelaksanaan sosialisasi sumber dan jumlah dana yang dikelola UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
7	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang HARUS mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.		Penetapan SOP pencairan anggaran

B. STANDAR PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.4. HASIL PENELITIAN DOSEN-TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.	<ol style="list-style-type: none"> Setiap prodi harus memiliki minimal 30% penelitian yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan agama secara integratif yang proposisional sesuai Rencana Induk Penelitian. Setiap prodi harus memiliki minimal 20% penelitian yang 	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman terkait penelitian dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya. Pelaksanaan sosialisasi pedoman terkait penelitian dosen yang sesuai dengan bidang ilmunya.

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
		terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara integratif yang proposional sesuai Rencana Induk Penelitian.	
2	Hasil penelitian tenaga kependidikan harus diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.	Setiap prodi harus memiliki minimal 10% penelitian yang melibatkan tenaga kependidikan terkait dengan pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya. sesuai Rencana Induk Penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan pedoman terkait penelitian dosen yang melibatkan tenaga kependidikan. Pelaksanaan sosialisasi pedoman terkait penelitian dosen yang melibatkan tenaga kependidikan
3	Semua penelitian mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.		Penyusunan penelitian yang mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
4	Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan keilmuan, proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.		Penerbitan SK Rektor terkait pelaksanaan penelitian berdasarkan pengembangan keilmuan, proses pendidikan dan pengabdian masyarakat.
5	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.		Publikasi hasil penelitian melalui jurnal atau buku baik secara online ataupun offline.
6	Jumlah penelitian yang terlibat dalam keikutsertaan sebagai pemakalah minimal 5 % di tingkat internasional dan 30% nasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya	Menyediakan bukti keikutsertaan sebagai pemakalah di tingkat internasional dan di tingkat nasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya	Pelaksanaan diseminasi hasil penelitian sebagai pemakalah di tingkat internasional dan di tingkat nasional pada tahun anggaran atau maksimum tahun berikutnya
2.5. PUBLIKASI, PEROLEHAN PATEN, PEROLEHAN HAK CIPTA DOSEN-TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	Hasil Penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus termuat minimal 50% di jurnal nasional	Civitas akademika menyediakan bukti penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang termuat di jurnal nasional tidak	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan penulisan ilmiah di di jurnal nasional tidak terakreditasi Pemberian reward bagi civitas akademika yang

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	dalam setiap tahunnya.	terakreditasi dalam setiap tahunnya.	hasil penelitiannya termuat di jurnal nasional tidak terakreditasi dalam setiap tahunnya.
2	Hasil Penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus termuat minimal 25% di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahunnya.	Civitas akademika menyediakan bukti penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang termuat di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahunnya.	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan penulisan ilmiah di jurnal nasional terakreditasi Pemberian reward bagi civitas akademika yang hasil penelitiannya termuat di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahunnya.
3	Hasil Penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus termuat minimal 10% di jurnal internasional dalam setiap tahunnya.		
4	Hasil Penelitian individu/regular/ kolaboratif MPI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus termuat minimal 5 % di jurnal internasional berreputasi dalam setiap tahunnya.	Dosen harus mendapatkan kesempatan pelatihan writing skill untuk meningkatkan produktivitas publikasi internasional berreputasi (RBT)	Pelaksanaan pelatihan writing skill untuk meningkatkan produktivitas publikasi internasional berreputasi (RBT)
5	<ol style="list-style-type: none"> Tersusun draft hak paten pada akhir periode pendanaan penelitian. Perolehan paten minimal 3% pertahun. 	Penyediaan unit pendampingan penyusunan draft hak paten	Percepatan pendaftaran hak paten melalui bantuan dana DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
6	Mendapatkan SK pendaftaran minimal 5 HAKI pada akhir periode pendanaan.	Menyediakan dokumen dokumentasi untuk pendaftaran HAKI	Pelaksanaan inventarisasi HAKI yang dimiliki oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.6. HASIL PENELITIAN MAHASISWA			
1	100% Judul penelitian mahasiswa sesuai dengan kompetensi program studi mahasiswa	Menghasilkan penelitian/ skripsi yang sesuai dengan kompetensi program studi	<p>Penerbitan pedoman penulisan skripsi oleh Dekan/Fakultas</p> <p>Pelaksanaan sosialisasi pedoman penulisan Skripsi secara efektif dan efisien kepada mahasiswa</p>

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2	1) Bagi mahasiswa S1 (skripsi) selesai dalam waktu minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan. 2) Bagi mahasiswa S2 (tesis) selesai dalam waktu maksimal 1 tahun. 3) Bagi mahasiswa S3 (disertasi) selesai dalam waktu maksimal 2 tahun.	1. Mahasiswa S1 menyelesaikan skripsi dalam waktu min.3 bulan dan max.12 bulan 2. Mahasiswa S2 menyelesaikan tesis maksimal 1 tahun 3. Mahasiswa S3 menyelesaikan disertasi maksimal 2 tahun	1. Penerbitan pedoman penulisan skripsi oleh Dekan/Fakultas 2. Penerbitan pedoman penulisan tesis dan disertasi oleh pimpinan pascasarjana
3	Bagi mahasiswa S1 (skripsi) mengikuti sidang skripsi yang diuji oleh minimum 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70.		1. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan ujian skripsi 2. Penerbitan aturan ujian skripsi
4	Bagi mahasiswa S2 (tesis) mengikuti sidang tesis yang diuji oleh 3 orang dosen dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70.		1. Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan ujian tesis 2. Penerbitan aturan ujian tesis
5	Bagi mahasiswa S3 (disertasi) mengikuti: a) sidang tertutup dan terbuka yang diuji oleh tim terdiri minimum 7 orang (termasuk penguji luar, promotor dan ko-promotor, penguji dalam), dan mendapatkan nilai rata-rata minimum 70. b) sidang terbuka yang diuji oleh tim terdiri 7 orang (termasuk penguji luar, promotor dan ko-promotor, penguji dalam) dan mendapatkan nilai minimum memuaskan.	Ketersediaan SOP Ujian Tugas Akhir dan alat ukur penilaian ujian tugas akhir	Penerbitan kebijakan terdokumentasi oleh Pascasarjana dalam hal ujian disertasi
6	Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan kolaboratif antara dosen dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri setiap program studi setiap tahun.	Prodi menghasilkan penelitian kolaboratif Dosen dan mahasiswa dalam minimal 2 penelitian setiap tahunnya	1. Penyediaan anggaran oleh pihak pimpinan untuk peneitian kolaboratif. 2. Pelaksanaan sosialisasi oleh pihak pimpinan tentang adanya peluang-peluang penelitian kolaboratif.
7	Prodi menghasilkan minimal 1 penelitian kompetitif mahasiswa setiap tahunnya	Mengikutsertakan mahasiswa dalam seleksi penelitian kompetitif	1. Pimpinan menerbitkan kebijakan adanya pemilihan penelitian kolektif

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
			2. Pimpinan menyediakan anggaran untuk penelitian kompetitif.

2. STANDAR ISI PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
2.1. STANDAR ISI PENELITIAN			
1	Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Melaksanakan penelitian yang mengacu kepada filosofi integrasi sains dan islam khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seperti: integrase medis dengan nilai-nilai al-quran; integrasi Islam dan kebangsaan; integrase nilai-nilai islam dengan kearifan lokal; dan lain sebagainya yang penerapannya diatur tersendiri oleh program studi.	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan dokumen penelitian oleh LP2M yang meliputi Rencana Strategis, Rencana Induk Penelitian, Pedoman Penelitian, dan Pedoman Pengelolaan Penelitian. Pelaksanaan sosialisasi oleh LP2M kepada sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . Pemantauan dan pengendalian terhadap baku mutu isi penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2	Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	Minimal 10% penelitian dasar dan terapan yang terpetakan sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi ketentuan tentang penelitian dasar dan terapan Perluasan jaringan kerja sama penelitian dengan stakeholder
3	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	Pemantauan dan pengendalian terhadap baku mutu isi penelitian di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2.2. PENELITIAN PEMBINAAN/ PENINGKATAN KAPASITAS (PPK)			

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
1	Penelitian PPK harus diarahkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .	Aspek luaran penelitian, 70% terpublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan minimal 30% terindeks moraref.	Pelatihan metodologi penelitian oleh LP2M untuk kelompok Penelitian Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas (PPK)
2.3. PENELITIAN DASAR PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI (PDPS)			
1	Penelitian PDPS harus diarahkan untuk pengembangan keahlian (profesionalisme) berdasarkan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi.	1) Semua penelitian ini menghasilkan output berupa laporan (naskah akademik) dan terpublikasikan pada jurnal terilmiah nasional dan atau proceeding. 2) Tersedianya pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. 3) Hasil penelitian dasar pengembangan program studi dijadikan sebagai pengayaan bahan ajar dalam proses pembelajaran.	1. Pelatihan berkesinambungan terkait kompetensi peneliti 2. Penyediaan media publikasi jurnal yang terindeks moraref 3. Penyediaan pedoman terkait integrasi penelitian ke dalam proses pembelajaran
2	80% outcome penelitian berupa publikasi pada jurnal nasional terindeks moraref dan doaj	Tersedia kebijakan pendanaan pada setiap outcome penelitian	1. Penyusunan perencanaan outcome penelitian 2. Penyusunan kebijakan pengembangan publikasi ilmiah berbasis outcome berikut pendanaan.
2.4. PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER			
1	Penelitian ini harus diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun dengan pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan multidisipliner.	Penelitian ini wajib mengeluarkan outcome berupa publikasi ilmiah pada jurnal Nasional Terakreditasi dan atau proceeding terindeks internasional.	1. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah 2. Penyediaan media publikasi jurnal yang terindeks moraref dan doaj 3. Penyediaan seminar internasional
2	Penelitian ini wajib mengeluarkan output berupa laporan (naskah akademik).		
2.5. PENELITIAN DASAR INTEGRASI KEILMUAN (PDIK)			
1	Jenis penelitian ini harus diarahkan untuk menumbuhkan kajian	50% diorientasikan untuk menghasilkan luaran (output) penelitian yang berupa	1. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah 2. Penyediaan media

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	integrasi keilmuan antara ilmu agama Islam dan ilmu umum.	penemuan untuk antisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	publikasi jurnal yang terindeks moraref dan doaj serta terakreditasi sinta 6-5
2	50% outcome penelitian ini terpublikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi		
2.6. PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI			
1	penelitian terapan dan pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus diarahkan untuk menemukan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi penguatan Intitusi berdasarkan skala prioritas pada rencana strategis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang .	1) Tersedianya kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional. 2) Tersedianya produk penelitian yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat 3) Tersedianya hasil penelitian dengan prinsip-prinsip kemanfaatan bagi mitra kerjasama 4) Tersedianya hasil penelitian yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan taraf hidup masyarakat	1. Pelatihan penulisan jurnal ilmiah 2. Penyediaan media publikasi jurnal yang terindeks moraref dan doaj serta terakreditasi sinta 4-3
2	Keluaran 100% terpublikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi		
2.7. PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN NASIONAL			
1	Jenis penelitian harus diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.	Satuan ukur keluaran (output) jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama (sosialhumaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek. Outcome penelitian 90% terpublikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi Outcome penelitian 10% HAKI	1. Penyediaan media publikasi jurnal yang terindeks moraref dan doaj serta terakreditasi sinta 2 2. Penyediaan sentra HAKI oleh LP2M yang mengkoordinir pengurusan HAKI oleh masing-masing peneliti
2.8. PENELITIAN TERAPAN DAN PENGEMBANGAN GLOBAL/INTERNASIONAL			
1	Penelitian harus diarahkan untuk penerapan dan pengembangan keilmuan berdasarkan issu-issu strategis internasional yang melibatkan akademisi luar negeri.	Tersedia kebijakan penelitian kolaboratif internasional	1. Perluasan lecture exchange dan visiting professor 2. Penguatan sentra HAKI oleh LP2M yang mengkoordinir pengurusan HAKI oleh masing-masing peneliti
2	Penelitian diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha,	Outcome penelitian kategori ini minimal 90% terpublikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi.	

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	dan atau industri		
2.9. PENELITIAN UNGGULAN/ COLLABORATIVE RESEARCH			
1	Penelitian kolaboratif luarannya 100% dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks reputasi global.	Penelitian harus menghasilkan LoA (Letter of Agreement) atau yang lazim dikenal dengan Letter of Guarantee 100%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan academic writing untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi 2. Perlauasan akses Penelitian secara kolaborasi antar-PTKIN atau kolaborasi (kemitraan, kerjasama) dengan perguruan tinggi, institusi penelitian dan lembaga di luar negeri.

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
4.1. STANDAR PENGUSULAN PROPOSAL			
1	Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (<i>desk evaluation</i>) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan seleksi pada seluruh proposal yang masuk dan mengajukan minimal 25 % dari jumlah keseluruhan proposal ke pendanaan 2. Menyediakan reviewer Internal dan atau External untuk seleksi proposal. 3. Mengalokasikan kuota untuk proposal kompetitif mahasiswa minimal 3 judul pertahun dengan alokasi dana sebesar satu juta rupiah per judul yang terpilih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penugasan oleh Rektor kepada LP2M untuk membuat <i>grand design/road map</i> (rencana induk pengembangan penelitian). 2. Pembuatan pedoman dan juknis bagi reviewer
2	Proses penelitian yang dibiayai dari luar universitas mengikuti ketetapan dari lembaga yang membiayai	Seluruh program studi harus melibatkan Dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan pedoman penelitian oleh LP2M 2. Pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian
3	Dosen tetap yang mengajukan proposal minimal 50% dari jumlah dosen tetap di program studi	Fakultas melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen untuk terlibat dalam penelitian	Pelaksanaan sosialisasi oleh LP2M berbentuk himbauan tertulis kepada seluruh dosen

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
		Fakultas mewajibkan seluruh dosen untuk mengajukan proposal penelitian baik secara individu maupun tim	
4.2. EVALUASI PROPOSAL			
1	Proposal penelitian yang berkualitas diukur dari kebaruan, manfaat, novelty, ketersediaan metode dalam penyelesaiannya, kesesuaian dengan kualifikasi peneliti, dan ketataan dalam mengikuti pedoman yang ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan cek plagiasi Proposal penelitian berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan. Proposal penelitian harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan cek similarity maksimal 20% 	Pelaksanaan cek similarity dilakukan dengan menggunakan aplikasi plagiasi online berbayar.
2	Proposal penelitian harus diseminarkan di hadapan reviewer	Mengumumkan proposal hasil seleksi	Penjadwalan dan pelaksanaan seminar proposal oleh LP2M dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan pemangku kebijakan
4.3. EVALUASI SEMENTARA PELAKSANAAN PENELITIAN			
	Kualitas pelaksanaan penelitian harus diukur dari ketercapaian, yaitu penyelesaian aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.	<p>Menyiapkan agenda rencana penelitian dan rekam jejak kegiatan dalam bentuk logbook dan laporan akhir</p> <p>Melaksanakan progress seminar untuk melaporkan kemajuan penelitian</p>	<p>Pembuatan Laporan progress dan laporan akhir dalam bentuk FGD yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa dan pemangku kebijakan</p>
4.4. MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN			
	Data pengukuran harus menggunakan standar alat dan metode yang baku.	<ol style="list-style-type: none"> Reviewer melakukan pengujian data yang diperoleh pada laporan progress penelitian. Melakukan validasi instrument oleh validator ahli dan atau empiris Membuat berita acara hasil monitoring dan evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendokumentasian hasil monitoring dan evaluasi Juknis instrument penelitian oleh LP2M
4.5. SEMINAR HASIL PENELITIAN			
	Hasil penelitian berupa draft laporan didiseminasikan dalam seminar yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta	Membuat berita acara hasil desiminasi	Pembuatan dokumen hasil desiminasi
4.6. PELAPORAN HASIL PENELITIAN,			
	1) Kualitas pelaporan harus diukur dari ketepatan penyelesaian	Melaporkan hasil akhir penelitian dalam bentuk draf	1. Pelaporan hasil kegiatan desiminasi penelitian

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	<p>semua aktivitas sesuai dengan yang direncanakan pada proposal penelitian.</p> <p>2) Kualitas penilitian juga diukur berdasarkan output penelitian yang dapat berupa publikasi ilmiah atau paten.</p>	<p>laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar akhir dan harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan hasil cek similarity maksimal 15%.</p>	<p>oleh LP2M melalui rapat evaluasi</p> <p>2. Pengkoordinasian pembuatan HAKI oleh LP2M</p>
4.7. PUBLIKASI HASIL PENELITIAN			
	Hasil penelitian harus dipublikasikan pada kegiatan seminar (Di dalam atau di luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), jurnal publikasi ilmiah, Buku atau paten	<p>1. Mewajibkan kepada peneliti di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk mempublikasikan hasil penelitian terakreditasi nasional dan atau internasional.</p> <p>2. Mewajibkan kepada seluruh Dosen untuk mencitasi jurnal ilmiah yang telah dipublikasi oleh dosen Prodi minimal 10 % dari jumlah dosen Prodi.</p>	<p>1. Pemberian bantuan publikasi hasil penelitian</p> <p>2. Penugasan dari LP2M kepada seluruh prodi untuk membuat form citasi bagi dosen yang melakukan penelitian.</p>
4.8. PELAKSANAAN PENELITIAN MAHASISWA			
	Kriteria yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah ketepatan waktu mengikuti semua tahapan, yaitu pengajuan proposal, seminar hasil, dan seminar akhir.	<p>1. Mewajibkan kepada seluruh mahasiswa tingkat akhir untuk mencitasi jurnal ilmiah yang telah dipublikasi oleh dosen Prodi minimal 10 % dari jumlah mahasiswa tingkat akhir</p>	<p>Penugasan dari LP2M kepada seluruh prodi untuk membuat form citasi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian.</p>
Mahasiswa S1 (Skripsi)			
	<p>1) Jangka waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (1 Tahun) dari seminar proposal.</p> <p>2) Bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu akan diatur oleh fakultas.</p>	<p>1. Prodi mewajibkan kepada Dosen Pembimbing untuk Membuat jadwal konsultasi dan target penyelesaian secara berkala</p> <p>2. Ketersediaan system informasi pembimbingan secara on-line</p> <p>3. Prodi wajib menyediakan kartu pembimbingan skripsi/tesis/disertasi</p> <p>4. Membuat seminar antara/perkembangan penelitian (skripsi,tesis, disertasi)</p> <p>5. Setiap mahasiswa yang sedang/telah menyelesaikan</p>	Pembuatan aplikasi Pembimbingan penelitian secara online bagi mahasiswa tingkat akhir
Mahasiswa S2 (Tesis)			
	<p>1) Jangka waktu penyelesaian tesis minimal 6 bulan dan maksimal 18 bulan (3 semester) dari seminar proposal.</p> <p>2) Bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu akan diatur oleh</p>		

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	Sekolah Pascasarjana. 3) Harus Mengikuti sidang tesis	skripsi/tesis/disertasi wajib mempublikasikan karya ilmiah nya dengan ketentuan sbb a. Skripsi = submit jurnal b. Tesis = terpublikasi nasional c. Disertasi = terpublikasi internasional	
	Mahasiswa S3 (Disertasi)	1) Jangka waktu penyelesaian disertasi minimal 12 bulan (2 semester) dan maksimal 36 bulan (6 semester) dari seminar proposal. 2) Bagi mahasiswa yang melebihi batas waktu akan diatur oleh Sekolah Pascasarjana. 3) Harus lulus ujian kualifikasi 4) Mahasiswa harus mempresentasikan perkembangan hasil penelitiannya pada seminar perkembangan minimal 1 tahun sekali. 5) Pelaksanaan seminar perkembangan diatur oleh sekolah pascasarjana 6) Harus lulus sidang tertutup 7) Harus lulus sidang terbuka	

4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
4.1. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
1	Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan serta dipublikasikan yang dilakukan secara terintegrasi.	Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan, yaitu dengan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LP2M untuk memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Bekerja sama dengan pengelolaan jurnal untuk dipublikasikan
2	Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan	1) Seluruh proposal penelitian telah direview dan diseminarkan mendapatkan nilai minimal 75. 2) Seluruh hasil penelitian direview dan diseminarkan	Pembuatan SOP penilaian Penelitian dosen dan mahasiswa oleh LP2M agar sesuai dengan ketentuan peraturan yang

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ universitas.	dan mendapatkan nilai minimal 75. 3) Proposal harus lulus cek plagiasi	ditetapkan fakultas/ pascasarjana/ universitas. Pembuatan unit cek plagiasi
3	Perancangan penilaian penelitian harus disusun pada saat pembuatan program penelitian	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasi. Tersedianya Pedoman penulisan karya tulis ilmiah	Pembuatan Pedoman Penelitian dan pendokumentasian bukti sosialisasinya oleh LP2M
4	Instrumen penilaian penelitian harus sahih dan handal Kejelasan publikasi di jurnal dan repositori oleh peneliti.	Ketersediaan bukti pelaksanaan proses penelitian mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring, evaluasi dan dokumentasi output penelitian	Pendokumentasian bukti proses penelitian oleh LP2M, yang mencakup tata cara penilaian dan review, legalitas pengangkatan reviewer, bukti tertulis hasil penilaian usul penelitian, legalitas penugasan peneliti, berita acara hasil monitoring, evaluasi dan dokumentasi output penelitian Mendatangkan ahli dalam meriew hasil penelitian dari kampus luar
4.2. PROPOSAL PENELITIAN			
1.	Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi (desk evaluation) oleh reviewer yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu.	Penilaian usul proposal dan hasil penelitian harus mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Puslit, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Penugasan oleh Rektor kepada LP2M untuk membuat <i>grand design/road map</i> (rencana induk pengembangan penelitian). Pembuatan pedoman dan juknis bagi reviewer Reviewer dari kampus luar
2.	Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen dan seminar proposal.	Membuat jadwal untuk kegiatan penilaian dokumen dan seminar proposal	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dan kegiatan seminar proposal
3.	Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2	Membuat jadwal dan	Pembuatan jadwal dan

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	orang reviewer secara terpisah	menyediakan tempat yang Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah	Penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer secara terpisah. Satu orang Reviewer dari kampus luar
4.	Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara bersamaan	Memilih riviewer yang kompeten dan sesuai dengan judul proposal	Pemilihan riviewer bisa diambil dari luar PT yang bersangkutan Reviewer mempunyai cv jelas dalam kompetensi dan keilmuannya
4.3. PELAKSANAAN PENILAIAN			
1.	Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir.	Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	Pelaksanaan pelatihan bagi tim penilai Penilain dilakukan secara rahasia dan berbasis program
2.	Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer.	Penggunaan blind review internal dan antar Perguruan Tinggi Blind review berbasis program komputer	Penyusunan dan implementasi pedoman penilaian bagi reviewer Berbasis program komputer
3.	Reviewer berasal dari lingkungan internal lembaga yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional.	Permohonan kesediaan untuk menjadi reviewer	Identifikasi nama-nama reviewer sesuai bidang keahlian baik internal ataupun eksternal/nasional
4.	minimal 80% Mendapatkan nilai rata-rata kelulusan	Seluruh penelitian memenuhi persyaratan administrasi sesuai pedoman penelitian	Pelatihan Penelitian bagi peneliti
	Menyerahkan laporan kemajuan dan akhir pada batas waktu yang ditentukan	Pemberitahuan batas waktu pelaporan penelitian secara online	Pelaksanaan pelatihan pelaporan penelitian
4.4. HASIL			
1.	Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti	Ketersediaan Prosedur dan hasil penilaian diumumkan di	Penyediaan Website

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	melalui buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk menjalankan prinsip transparan dan akuntabel	website/ dipublikasikan.	untuk publikasi hasil penilaian
2.	Hasil penelitian akhir berupa draft laporan yang didiseminasi dalam seminar akhir yang dihadiri oleh reviewer dan sekurang-kurangnya 10 peserta.	Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi: 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam pedoman penelitian; 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN; 3) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat	1. Penyusunan dan penetapan Kriteria penilaian hasil penelitian 2. Melaksanakan seminar diseminasi
3.	Laporan akhir penelitian adalah draft laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar akhir dan harus bebas dari plagiasi yang dibuktikan dengan hasil cek similarity maksimal 15%.	Penggunaan cek plagiasi yang berstandar untuk laporan hasil penelitian	Pelaksanaan aplikasi cek plagiasi yang berstandar Penentuan program cek plagiasi yang disepakati bersama
4.	100% penelitian menghasilkan output sesuai dengan yang direncanakan di proposal	Penilaian kesesuaian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian	Menetapkan tim ahli sesuai bidang keilmuan
4.5. REVIEWER			
1.	Reviewer harus memenuhi syarat kompetensi bidang ilmu dan/atau reviewer nasional.	Reviewer memiliki legalitas sebagai reviewer tingkat nasional.	Pembuatan MoA antara reviewer tingkat national dengan LPM
2.	Reviewer harus memiliki Track record dalam penelitian sesuai bidang ilmunya	1) Mengoptimalkan standar seleksi reviewer 2) Reviewer harus bisa menunjukkan bukti rekam jejak penelitiannya 3) Mengharuskan kepada Reviewer untuk memiliki rekam jejak penelitian tingkat nasional minimal 25% dari keseluruhan jumlah penelitian yang sudah dilakukan	Pembuatan Pedoman Penentuan Reviewer oleh LPM Collecting cv dan hasil penelitian dari calon reviewer tingkat nasional.
	Reviewer harus memiliki Jumlah publikasi di jurnal nasional/	Mewajibkan reviewer untuk memiliki jurnal nasional/	Pembuatan Juknis Penentuan Reviewer oleh

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	internasional.	internasional. minimal 25% dari keseluruhan Jumlah publikasi ilmiah yang dimiliki	LPM
4.6. PEMBIMBING DAN PENGUJI TUGAS AKHIR			
1.	Pembimbing dan penguji harus mengacu kepada pedoman penulisan karya ilmiah/tugas akhir dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi	1) Pembuatan Pedoman penulisan karya ilmiah yang terupdate sesuai dengan tema. 2) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah di setiap program studi. 3) Tersedia Pedoman penulisan karya ilmiah sesuai dengan jenjang perkuliahan berdasarkan kriteria KKNI.	Penetapan standar penilaian penelitian / laporan tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

5. STANDAR PENELITI

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
5.1. STANDAR PENELITI			
1	Penelitian Pemula Persyaratan yang harus dipenuhi: a) berstatus sebagai dosen tetap mempunyai NIDN; b) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti; c) Mengikuti etika peneliti; d) Peneliti wajib membuat laporan hasil penelitian e) Peneliti wajib memuat hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah terakreditasi.	Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal lektor kepala untuk kualifikasi pendidikan S2 dan lektor untuk kualifikasi pendidikan minimal S3	Pelaksanaan sosialisasi persyaratan penelitian bagi peneliti
2	Penelitian Madya Persyaratan yang harus dipenuhi: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti b) jumlah peneliti maksimal 3(tiga) orang untuk penelitian kelompok. c) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN d) pernah melakukan penelitian minimal 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis, dan		

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	<p>disertasi</p> <p>e) Mengikuti etika peneliti.</p> <p>f) Peneliti harus membuat buku dari hasil laporan penelitian.</p> <p>g) Peneliti wajib memuat hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah terakreditasi.</p>		
3	<p>Penelitian Kolaboratif</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi:</p> <p>a) ketua tim adalah dosen tetap dengan jabatan lektor s.d. lektor kepala</p> <p>b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi</p> <p>c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN</p> <p>d) anggota peneliti jabatan minimal asisten ahli</p> <p>e) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal tiga orang dan salah satunya dapat berasal dari disiplin ilmu yang berbeda</p> <p>f) Mengikuti etika peneliti.</p> <p>g) Peneliti harus membuat buku dari hasil laporan penelitian.</p> <p>h) Peneliti wajib membuat hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan atau jurnal bereputasi internasional.</p>		
4	<p>Penelitian mandiri (nonreguler)</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi:</p> <p>a) memiliki jabatan fungsional dari asisten ahli s.d. lektor kepala.</p> <p>b) Untuk penelitian kelompok jabatan ketua minimal lektor kepala.</p> <p>c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN.</p> <p>d) Mengikuti etika peneliti.</p>	<p>Adanya dokumen pelaksanaan penelitian mandiri bagi para peneliti di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p>	
5	<p>Peneliti dalam penentuan kewenangan melaksanakan penelitian merujuk pada pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian</p>	<p>50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk</p> <p>Penelitian (RIP) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbasis integrasi nilai keislaman</p>	

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
5.2. KOMPETENSI			
1	Dosen memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, unsur kebaruan (novelty), serta tingkat kompleksitas dan tingkat kedalaman penelitian;	Peneliti memiliki cara pandang (paradigma) ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).	Penyusunan alat ukur cara pandang (paradigma) ilmiah dalam mengintegrasikan antara ilmu dan agama (Islam).
5.3. CAPAIAN PENELITI			
1.	Dosen diwajibkan melakukan penelitian setiap tahun minimal setara dengan 1 sks.		
2.	Jumlah peneliti dengan jabatan fungsional lektor kepala 70% per tahun		
3.	Jumlah peneliti dengan pendidikan tertinggi S3 70% per tahun		
4.	Jumlah peneliti dengan jabatan asisten ahli sd. lektor 90% per tahun		
5.	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional >50% per tahun		
6.	Persentase dosen yang menjalankan penelitian sebanyak >80% pertahun	Terlaksananya Peninjauan dan penetapan kebijakan Beban kinerja Penelitian dosen	1. Pelaksanaan Sosialisasi beban kinerja dosen 2. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen
7.	Jumlah dosen yang berperan sebagai penyaji oral atau penyaji poster pada pertemuan ilmiah internasional >4 pertahun		
8.	Jumlah dosen yang berperan sebagai invited speaker pada pertemuan ilmiah internasional >4 per tahun		
9.	Persentase publikasi buku dosen yang diterbitkan oleh penerbit >15% pertahun.		
10.	Persentase publikasi artikel ilmiah dosen pada jurnal internasional bereputasi >10% pertahun.		
11.	Jumlah pertemuan ilmiah internasional yang diselenggarakan universitas sebanyak >5 per tahun.		
12.	Jumlah dosen yang mengintegrasikan hasil penelitian dalam pengembangan		

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	pembelajaran >1 dosen per tahun pada tiap PS.		

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
6.1. STANDAR TATAKELOLA SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN			
1.	Universitas harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.	Ketersediaan roadmap pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian	Pembuatan kebijakan sarana dan prasarana penelitian oleh Rektor
2.	Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	1. Dokumen keselamatan dan kesehatan Kerja 2. Tersedianya Fasilitas kesehatan berupa klinik.	
3.	90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.	Ketersediaan kebijakan tentang penggunaan sarana dan prasarana untuk penelitian internal dan eksternal	1. Pelaksanaan analisis keterpenuhan sarana dan prasarana penelitian internal. 2. Pengadaan keterpenuhan sarana dan prasarana penelitian
4.	50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.		
5.	30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.		
6.	Ketersediaan perencanaan dan pengembangan fasilitas/ revitalisasi sarana dan prasarana penelitian.	perencanaan dan pengembangan fasilitas/ revitalisasi sarana dan prasarana penelitian dilakukan minimal 2 tahun sebelum penetapan pagu.	Perencanaan dan pengembangan fasilitas/revitalisasi sarana dan prasarana penelitian
7.	Tersedianya program penelitian tentang pengembangan keilmuan dan pengelolaan di tingkat prodi minimal 2 judul penelitian	Tersedianya program penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa di setiap fakultas / prodi	Penyediaan dana untuk program penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa di setiap

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
			fakultas/prodi
6.2. STANDAR LABORATORIUM DAN PUSAT STUDI			
8.	Jumlah laboratorium yang ada di setiap program studi minimal 3 laboratorium.	Jumlah laboran minimal 1 (satu) orang setiap laboratorium di setiap program studi	Penyediaan laboratorium di setiap program studi
9.	Ketersediaan jumlah laboratorium terpusat minimal tersedia laboratorium bahasa dan pusat studi.	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional	Penyediaan Unit layanan Bahasa dan pusat studi
10.	Kelengkapan hardware dan software di masing-masing laboratorium memenuhi standar minimal kebutuhan program studi		Penyediaan perangkat laboratorium
6.3. STANDAR BAHAN PUSTAKA			
11.	Perbandingan jumlah buku referensi yang sesuai dengan spesifikasi program studi dengan jumlah mahasiswa 1: 7.	Adanya perencanaan dan pengembangan bahan pustaka setiap tahun.	Perencanaan dan Pengembangan bahan pustaka
12.	Jumlah akses ke jurnal elektronik internasional minimal 10 akses.	Meningkatkan frekuensi peminjaman buku referensi penelitian	Pemberian fasilitas akses jurnal elektronik
6.4. STANDAR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
13.	Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet	Kapasitas Bandwidth memenuhi standar minimal BAN-PT.	Penyediaan fasilitas jaringan internet dan intranet
14.	Kelengkapan hardware dan sofeware di masing-masing laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi memenuhi standar minimal kebutuhan program studi	Tersedianya anggaran untuk perawatan semua fasilitas teknologi informasi dan komunikasi secara berkala.	Penyediaan anggaran untuk perawatan semua fasilitas teknologi informasi dan komunikasi secara berkala
6.5. STANDAR RUANG BACA DAN DISKUSI			
15.	Rasio ruang baca dengan jumlah rata-rata pengguna minimal 1: 2 M ²	Adanya ruang baca yang representatif	Penyediaan fasilitas ruang baca yang representatif
16.	Tersedia ruangan yang memadai dan nyaman untuk diskusi:	Adanya anggaran untuk perawatan semua fasilitas di ruang baca dan diskusi Lembaga Penelitian secara berkala.	Penyediaan anggaran untuk perawatan fasilitas ruang baca dan diskusi
	a) luas ruangan minimal 15 m ² b) meja-kursi kapasitas minimal 10 orang c) LCD dan AC/ Kipas angin		

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	d) white board e) speaker aktif f) jaringan internet/wifi		
6.6. STANDAR KANTOR KELEMBAGAAN PENELITIAN			
17.	Tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang reperesentatif	Adanya anggaran untuk perawatan semua fasilitas di kantor kelembagaan penelitian secara bertahap.	Penyediaan anggaran untuk perawatan semua fasilitas kelembagaan penelitian
18.	Kantor pimpinan yang reperesentatif		
19.	Kantor staff yang reperesentatif		
20.	Ruang rapat yang reperesentatif		
21.	Kelengkapan fasilitas ruang arsip dokumen seperti proposal penelitian, laporan, dan jurnal		

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
7.1. STANDAR KEBERADAAN KELEMBAGAAN			
1.	Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di tingkat Universitas	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mensosialisasikan diri secara offline maupun online	Pembuatan website khusus LPPM
2.	Kelembagaan Penelitian harus mengkoordinasikan penelitian monodisipliner dan interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan atau perguruan tinggi		Pembuatan kluster penelitian untuk penelitian monodisipliner dan interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan atau perguruan tinggi
7.2. STANDAR RENCANA PROGRAM PENELITIAN TAHUNAN			

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
3.	Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas	1. LP2M memiliki dokumen formal rencana program penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan. 2. Transparansi : Memastikan kemudahan akses renstra dan dokumen	Pelaksanaan Workshop penyusunan dan pengembangan Rencana Induk Penelitian yang sesuai dengan Renstra Universitas
4.	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sumber pendanaan minimal 3 kali setiap tahun		Penganggaran kegiatan sosialisasi sumber pendanaan
5.	Tingkat pemahaman pendanaan penelitian minimal nilai 3 dari skala 5	Tersedia instrumen dan sarana umpan balik pemahaman pendanaan penelitian	Pembuatan instrument umpan balik dan SOP kegiatan sosialisasi sumber pendanaan
7.3. STANDAR KERJA SAMA PENDANAAN DAN PENGGUNA HASIL			
6.	Kelembagaan Penelitian harus menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.	1. Ketersediaan kebijakan dan SOP Kerjasama 2. Persentase MOU dengan sumber pendanaan eksternal yang ditindaklanjuti minimal 70% 3. Tersedia umpan balik keuntungan bekerjasama antar lembaga yang terlibat MOU	1. Penandatangan MOU dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian 2. Publikasi jumlah Kerja sama pendanaan dan pengguna hasil penelitian secara offline maupun online 3. Pembuatan list umpan balik keuntungan bekerjasama antar lembaga yang terlibat MOU
7.	Jumlah MOU dengan sumber pendanaan eksternal yang ditindaklanjuti		
8.	Jumlah penelitian yang didanai sumber pendanaan eksternal		
9.	Jumlah penelitian yang dapat memberikan manfaat secara timbal balik, baik oleh internal lembaga maupun mitra.		
7.4. STANDAR KEBERADAAN DOKUMEN TATA KELOLA PENELITIAN			
10.	Kelembagaan Penelitian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.	Tersedia dokumen mutu penelitian mencakup: Pedoman penelitian, Standar penelitian dan SOP	Pelaksanaan workshop penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
7.5. STANDAR PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN, PEMBUATAN ARTIKEL ILMIAH, DAN PENCAPAIAN HAKI			
11.	Kelembagaan Penelitian harus	1. Kompetensi narasumber	Pelaksanaan

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti dan pemenuhan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan	minimal pernah mempublikasikan artikel pada jurnal bereputasi 2. Pembuatan SOP pemenuhan berbagai kelengkapan yang dibutuhkan dalam penyusunan proposal penelitian, pembuatan artikel ilmiah, dan pencapaian HAKI 3. LP2M memiliki pedoman pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi	workshop/pelatihan penyusunan proposal penelitian, pembuatan artikel ilmiah, dan pencapaian HAKI secara berkala
12.	Semua calon peneliti pernah mengikuti pelatihan literasi <i>research skill</i> atau pernah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal terakreditasi		Pembuatan database dosen yang pernah mengikuti pelatihan literasi research skill atau pernah mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal terakreditasi
13.	100% judul proposal yang diajukan, diketuai oleh dosen tetap		Publikasi secara offline maupun online pada website resmi LPPM
14.	Pelaksanaan pelatihan pembuatan artikel ilmiah minimal 2 kali setiap tahun	Penganggaran pelatihan pembuatan artikel ilmiah minimal 2 kali setiap tahun	Pelaksanaan pelatihan pembuatan artikel ilmiah
15.	35% Jumlah judul artikel yang layak diajukan ke jurnal nasional dan jurnal internasional	1. Persentase judul artikel 30% diterima di jurnal nasional dan 5% diterima di jurnal internasional 2. Ketersediaan kebijakan Pemberian penghargaan bagi artikel yang terbit di jurnal nasional dan jurnal internasional.	1. Pempublikasian secara offline maupun online pada website resmi LPPM 2. Pendampingan oleh LPPM dalam pembuatan jurnal Nasional dan jurnal internasional
7.6. MONITORING DAN EVALUASI PROPOSAL PENELITIAN DAN ARTIKEL ILMIAH			
16.	Kelembagaan Penelitian harus menyediakan klinik proposal penelitian dan artikel ilmiah	Ketersediaan kebijakan tentang unit klinik proposal penelitian dan artikel ilmiah	Penganggaran kegiatan klinik proposal penelitian dan artikel ilmiah
17.	70% Jumlah judul proposal yang lolos seleksi, dan artikel ilmiah yang terpublikasi	Persentase judul proposal yang lolos seleksi, dan artikel ilmiah yang terpublikasi minimal 70% dari jumlah proposal yang diajukan	1. Publikasi secara offline maupun online pada website resmi LPPM 2. Pembuatan kebijakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
7.7. STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENELITIAN			
18.	Transparansi hasil penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian yang terdokumentasikan dan dikirimkan kepada fakultas	Ketersediaan kebijakan penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	
19.	Semua peneliti harus mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian		
7.8. FASILITASI, PENGAJUAN HAKI SECARA BERKELANJUTAN			
20.	Jumlah pelaksanaan pelatihan drafting dan pengumpulan HAKI minimal 2 kali setiap tahun yang sepenuhnya didanai oleh Lembaga	Jumlah HAKI yang daftarkan setiap tahun	Penganggaran pelatihan drafting dan pengumpulan HAKI minimal 2 kali setiap tahun

8. STANDAR PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN PENELITIAN

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
8.1. STANDAR PENDANAAN PENELITIAN			
1.	Universitas harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengalokasikan dana penelitian yang bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan pedoman standar pendanaan dan pembiayaan penelitian oleh Rektor melalui LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sosialisasi pedoman standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2.	Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus didanai oleh Universitas, Mandiri, Universitas bersama Lembaga Pemerintah, Masyarakat dan Swasta sejalan dengan Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Tersedianya pedoman dan mekanisme penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian serta sumber pendanaan penelitian	
3.	Penelitian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak sesuai	Pemberian penghargaan bagi peneliti mandiri yang	Peningkatan kerjasama dengan Swasta dan/atau

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
	dengan Rencana Induk Penelitian dimungkinkan didanai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mandiri oleh Peneliti, Swasta dan/atau lembaga pemerintahan namun tetap sesuai dengan Visi dan Misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional.	lembaga pemerintahannya melalui MOU
4.	Pendanaan setiap kegiatan penelitian yang dibiayai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengikuti klasifikasi yang ditetapkan oleh rektor.	Tersusunnya Daftar Satuan Komponen Biaya Penelitian (meliputi: bahan, honor dan biaya perjalanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sosialisasi oleh LP2M mengenai rencana anggaran dan biaya penelitian serta laporan realisasi akhir anggaran dan biaya penelitian. 2. Pembuatan pedoman penyusunan Daftar Satuan Komponen Biaya Penelitian berdasarkan SBM
5.	Persentase penggunaan anggaran Universitas (kuota) untuk penelitian sebesar 35% dari total BOPTN, 10% dari total PNBP dan 2% dari total RM.	Terdapat pendanaan penelitian dari sumber lainnya minimal 250 juta setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Kebijakan oleh Rektor dalam hal penggunaan anggaran Universitas (kuota) untuk penelitian 2. Peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga/ organisasi luar kampus
6.	Tersedianya SOP dan petunjuk teknis kerjasama hibah penelitian dari lembaga dalam dan luar negeri		Penyusunan SOP dan petunjuk teknis kerjasama hibah penelitian dari lembaga dalam dan luar negeri
7.	Universitas menyediakan dana penelitian minimal 20 juta perdosen pertahun		Penganggaran pendanaan penelitian
8.2. STANDAR PENDANAAN MANAJEMEN PENELITIAN			
8.	Universitas menyediakan dana manajemen penelitian sebesar minimal 10% dari dana penelitian		Penganggaran dana manajemen penelitian sebesar minimal 10% dari dana penelitian
8.3. STANDAR PENDANAAN PENINGKATAN KAPASITAS PENELITI			
9.	Universitas menyediakan dana peningkatan kapasitas untuk semua peneliti.	Menyediakan dana peningkatan kapasitas untuk semua peneliti minimal 5%	Penganggaran dana peningkatan kapasitas untuk semua peneliti.

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan	Strategi
		dari dana penelitian.	
8.4. STANDAR PENDANAAN INSENTIF PUBLIKASI			
10.	Universitas menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.	Pemberian penghargaan bagi peneliti mandiri yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional	Penganggaran dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
8.5. STANDAR PENDANAAN HAKI			
11.	Universitas menyediakan dana perolehan HAKI bagi 5 dosen perprodi		Penganggaran dana perolehan HAKI bagi 5 dosen perprodi
8.6. STANDAR PELAPORAN PENDANAAN PENELITIAN			
12.	Penggunaan dana dalam bentuk laporan keuangan setiap pelaksanaan penelitian.		Pembuatan Standar Pelaporan Pendanaan Penelitian
13.	Persentase Penyerapan pendanaan penelitian minimal 95%.	Tersedianya tim Pendampingan dan monitoring keterserapan pendanaan penelitian dengan pelaporan progress penelitian secara berkala	Pelaksanaan Sosialisasi Pendanaan Penelitian

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	STRATEGI
1.1. STANDAR PENYELESAIAN MASALAH YANG DIHADAPI MASYARAKAT			
1.	Harus memiliki program PkM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berbasis integrasi.	Ketersediaan kebijakan PkM berbasis integrasi	Penyusunan kebijakan PkM yang berbasis integrasi
2.	Fakultas harus memiliki >50 mitra/Desa yang mendapatkan manfaat dari program PkM	Ketersediaan MoU dengan mitra/ Desa oleh tiap-tiap fakultas	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Tim kerjasama PkM dan penyusunan pedoman pelaksanaan di tingkat fakultas Pembuatan standar capain PkM
3.	Harus memiliki >10 institusi mitra kerjasama program PkM baik internal maupun eksternal yang memiliki bukti sahih, memenuhi 3 aspek dan menunjukkan peningkatan hasil setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan MoU dengan institusi mitra Tersedia laporan evaluasi berkala terkait kerja sama program PkM baik internal maupun eksternal 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim kerjasama PkM baik internal maupun eksternal Pembentukan tim evaluasi berkala terkait kerjasama PkM baik internal maupun eksternal
4.	Dosen harus memiliki minimal 1 judul PkM dalam 1 tahun agar program PkM terlaksana dengan baik. (RB)	Dosen wajib melakukan PkM minimal 1 kegiatan setara dengan 1 sks per tahun	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan PkM Pengadaan anggaran untuk pelaksanaan PkM dosen
1.2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
1.	Terdapat >10 teknologi tepat guna yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setiap tahun	LP2M harus mempunyai peta upgrade teknologi tepat guna bagi dosen sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Pengadaan program Pelatihan bagi dosen dalam meningkatkan kemampuan teknologi tepat guna
1.3. PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI			
1.	10% program PkM menghasilkan publikasi ilmiah nasional bereputasi, dan atau 2% publikasi ilmiah	Lembaga harus memfasilitasi publikasi PkM secara nasional maupun	Pemberian reward bagi dosen yang mempublikasikan <u>program</u> hasil PkM pada

internasional berbasis integrasi	internasional yang berbasis integrasi	tingkat nasional maupun internasional yang berbasis integrasi.
----------------------------------	---------------------------------------	--

1.4. BAHAN AJAR UNTUK PENGAYAAN SUMBER BELAJAR PERKULIAHAN

1. 10% program PkM menghasilkan bahan ajar dan atau 10% bahan ajar berbasis integrasi.	Persentase bahan ajar berbasis integrasi 10% MK prodi untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan.	1. Pengadaan angaran dana untuk menghasilkan bahan ajar yang berbasis integrasi untuk pengayaan sumber belajar perkuliahan. 2. Pemberian reward bagi dosen yang menghasilkan bahan ajar dari PkM
--	---	---

1.5. MODUL PELATIHAN

1. 20% program PkM menghasilkan modul pelatihan dan atau 10% modul pelatihan berbasis integrasi	Lembaga harus memfasilitasi pembuatan modul berbasis integrasi	Pemberian fasilitas kepada dosen untuk membuat modul pelatihan berbasis integrasi.
---	--	--

1.6. TATA LAKSANA HASIL PKM

1. Harus memiliki pedoman penulisan laporan dan artikel publikasi ilmiah	Tersedianya pedoman penulisan laporan dan artikel publikasi ilmiah	Pembuatan pedoman penulisan laporan dan artikel publikasi ilmiah
2. Harus memiliki pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan	Tersedianya pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan	Pembuatan pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan
3. Harus memiliki bank data riset yang dapat ditindaklanjuti	Terlaksananya Pemeliharaan dan monev bank data riset yang dapat ditindaklanjuti.	Revitalisasi bank data riset secara berkala dan sistematis sesuai kapasitas dan bidang keilmuan dosen
4. Harus memiliki aturan penulisan modul atau bahan ajar	Tersedianya kebijakan/aturan penulisan modul atau bahan ajar	Penyusunan aturan penulisan modul atau bahan ajar
5. Harus memiliki Renstra, Evaluasi hasil, dan dokumen kerjasama	Renstra, Evaluasi hasil, dan dokumen kerjasama pengabdian kepada	Penyusunan Renstra, Evaluasi hasil, dan dokumen kerjasama pengabdian kepada

pengabdian kepada masyarakat

masyarakat minimal
dilaksanakan monev setiap
tahun sekali

masyarakat

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
2.1. KEBERTERIMAAN HASIL PENELITIAN			
1.	Harus memiliki >30% program PkM yang merupakan penerapan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat.	Ketersedian kebijakan program PkM dalam penerapan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan anggaran dana dalam program PkM penerapan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembentukan TIM pada program PkM dalam penerapan langsung hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2.2. PENGEMBANGAN IPTEK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1.	Harus memiliki >30% program PkM yang merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.	Ketersedian kebijakan program PkM dalam upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan atau pengembangan IPTEK	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan anggaran dana untuk pemberdayaan masyarakat Pembentukan TIM program PkM dalam upaya pemberdayaan masyarakat Pemanfaatan IPTEK minimal berupa TIK
2.3. PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA			
1.	Harus memiliki >30% program PkM yang merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	Ketersedian kebijakan program PkM dalam penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Pengadaan anggaran dana untuk penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Pembentukan TIM program PkM dalam penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
2.4. MODEL PEMECAHAN MASALAH, REKAYASA SOSIAL, DAN/ATAU REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DAPAT DITERAPKAN LANGSUNG OLEH MASYARAKAT, DUNIA USAHA, INDUSTRI, DAN/ATAU PEMERINTAH			

1. Harus memiliki >30% program PkM yang merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- Mengadakan program PkM yang dapat langsung digunakan dalam pemecahan masalah yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- Pembentukan Tim yang memastikan pemenuhan kebutuhan civitas akademik dalam merealisasikan program PkM

2.5. CAKUPAN ISI PKM

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Isi dari materi pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur kejelasan sesuai standar dan akuntabilitas sehingga bisa meningkatkan mutu lembaga. | Memastikan isi dari materi pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur kejelasan sesuai standar dan akuntabilitas. | Pembentukan Tim khusus yang bertugas untuk memeriksa isi dan materi PkM |
| 2. Aktivitas PkM harus berdampak pada proses pembelajaran. | Memastikan kegiatan PkM harus berdampak pada proses pembelajaran | Pelaksanaan evaluasi berkala pada proses PkM oleh pihak terkait |
| 3. Produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa program studi harus diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif). | Memastikan produktivitas dan mutu pengabdian kepada masyarakat dosen dan atau mahasiswa program studi diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen dan karya inovatif). | Publikasi kegiatan PkM pada website uin Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau masing-masing Fakultas dan atau program studi |

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
3.1. PERENCANAAN PROGRAM PKM			
1)	Program studi harus berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi dan peningkatan mutu PkM, yang mendukung keunggulan yang diharapkan pada visi dan misi program studi dan institusi.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelaksanaan <i>workshop</i> pedoman PkM yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus
2)	Setiap program PkM harus dibuatkan rencana kegiatan yang jelas dengan mengikuti panduan		

	pelaksanaan PkM.		pelaksanaan
3)	Kepala Pusat Pengabdian menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka		Sosialisasi pedoman PkM yang memuat proses pelaksanaan PkM

3.2. PENILAIAN RENCANA PROGRAM PKM

1)	Setiap proposal program PkM harus terkait dengan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.	Ketersediaan dokumen PkM bagi dosen yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan serta integrasi keilmuan secara terarah, terukur, dan terprogram dalam satu siklus pelaksanaan	Peninjauan proposal sesuai pedoman PkM yang memuat proses pelaksanaan PkM
2)	Kepala Pusat Pengabdian mengadakan seleksi proposal dan mengumumkan hasil seleksi secara transparan dan akuntabel	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Penyampaian pengumuman hasil seleksi melalui web
3)	Pelaksana pengabdian menandatangani kontrak pengabdian sesuai peraturan/ pedoman.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelaksanaan kegiatan Penandatanganan kontrak pengabdian

3.3. PELAKSANAAN KEGIATAN PKM HARUS DISELENGGARAKAN SECARA TERARAH, TERUKUR, DAN TERPROGRAM

1)	Kegiatan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan, panduan dan peraturan Institusi.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pembuatan laporan kemajuan pkm dan Membuat Log Book Kegiatan PkM
2)	Proses pelaksanaan PkM didukung oleh institusi pada program studi dalam bentuk pendanaan secara internal, dan fasilitas yang sesuai dengan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pembuatan laporan kemajuan pkm
3)	Dosen dan mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelibatan dosen dan mahasiswa dalam PkM
4)	Setiap Program studi melaksanakan minimal satu kegiatan PkM mahasiswa sebagai salah satu dari	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan	Pelibatan dosen dan mahasiswa dalam PkM

	bentuk pembelajaran yang harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan	kegiatan PkM	
--	--	--------------	--

3.4. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN

1)	Minimal 50% hasil PkM diintegrasikan ke kurikulum sebagai sumber belajar dalam perkuliahan	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelaksanaan Workshop kurikulum
2)	Kepala Pusat Pengabdian mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan kontrak setiap tahunnya.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelaksanaan seminar kemajuan PkM
3)	Setiap pelaksana wajib mempresentasikan hasil pengabdian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pelaksanaan seminar
4)	Setiap pelaksana wajib melaporkan kegiatan akademik dan keuangan paling lambat pada akhir bulan Oktober.	Ketersediaan pedoman dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PkM	Pembuatan laporan dan publikasi PkM baik melalui media cetak maupun media elektronik

3.5. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PKM.

1.	Adanya dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Adanya dokumen tindak lanjut hasil MONEV	Pelaksanaan diseminasi monev PkM
----	--	--	----------------------------------

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
4.1. TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT			
1.	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 4 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat	Tersedianya dokumen PkM yang mencakup 6 aspek (tatacara penilaian dan review, legalitas, pengangkatan	Pembuatan instrument survey dan pelibatan mahasiswa PkM

	sebagai penerima PkM setiap tahunnya.	reviewer, hasil penilaian usul pengabdian, legalitas penugasan pengabdian/kerjasama pengabdian, berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi luaran PkM) serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti	sebagai pelaksana dan atau surveyer.
2.	Tercapainya tingkat kepuasan pada level 4 (skala1-5) dari hasil survei kepuasan pelaksana (dosen-mahasiswa) PkM terhadap kegiatan Pkm setiap tahunnya.		
4.2. TERJADINYA PERUBAHAN SIKAP, PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN PADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN SASARAN PROGRAM			
1.	>70% penerima kegiatan meningkat pengetahuannya	1. Tersedianya Pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM 2. Tersedianya Modul PkM sesuai Program yang dilaksanakan 3. Tersedianya laporan kegiatan PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Ketua LP2M secara berkala terhadap kegiatan PkM 2. Pembentukan tim oleh Ketua LP2M untuk melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengabdian kepada masyarakat 3. Publikasi hasil PkM oleh LP2M untuk dijadikan sebagai pengayaan sumber belajar 4. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Modul Program
2.	>70% penerima kegiatan mengalami perubahan sikap		
3.	>50% penerima kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan.		
4.	Tercapainya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat pada level 4 (skala1-5) dari hasil survei perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan)		
4.3. DIMANFAATKANNYA IPTEK DIMASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN			
1.	>20% penerima kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya.	1. Tersedianya Pedoman dan instrumen monitoring serta evaluasi kegiatan PkM 2. Ketersediaan analisis survei penerima kegiatan PkM	1. Pelaksanaan Workshop Penyusunan Pedoman dan Instrumen Monitoring serta Evaluasi kegiatan PkM 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh LP2M terhadap kemanfaatan hasil PkM
2.	(Tercapainya pemanfaatan IPTEK secara berkelanjutan pada level 3(skala1-5) dari hasil surveypemanfaatan IPTEK)		

			3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara transparan dan kredibel
4.4. TERCIPTANYA PENGAYAAN SUMBER BELAJAR DAN/ATAU PEMBELAJARAN SERTA PEMATANGAN SIVITAS AKADEMIKA SEBAGAI HASIL PENGEMBANGAN IPTEK			
1.	Terdapat umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK dimasyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM 2. Ketersediaan analisis monitoring dan evaluasi kegiatan PkM 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran Angket kepada mitra/desa dan Masyarakat 2. Pelaporan hasil umpan balik secara transparan dan kredibel
2.	Pengelola LP2M menghasilkan minimal 5 sumber belajar bagi masyarakat dalam setiap tahunnya.	Tersedianya Pedoman dan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan PkM	Pelaksanaan Workshop Modul Sumber Belajar bagi Masyarakat.
4.5. TERATASINYA MASALAH SOSIAL DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN			
1.	Terdapat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laporan kegiatan PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu 2. Adanya pengumuman atau kegiatan secara terbuka hasil rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan penilaian kegiatan PkM yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 	Pelaksanaan diskusi Publik yang dihadiri oleh Pemangku Kepentingan

5. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
5.1. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK PELAKSANA			
1.	1) Pelaksana PkM berpendidikan	Pelaksana PkM menunjukkan bukti karya ilmiah yang pernah	1. LP2M mendorong dan memotivasi

	minimal S2	terbuat, terkait dengan pengabdian kepada Masyarakat	dosen untuk menyelesaikan studi S3
2)	Pelaksana PkM mempunyai NIDN atau NUPN;		2. LP2M melakukan pendataan terhadap seluruh dosen sesuai dengan kompetensi akademik dan bidang keilmuan
3)	Pelaksana PkM memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;		3. Mendorong dan memotivasi para dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan workshop dan pelatihan sesuai dengan rumpun bidang keilmuannya masing-masing
4)	Mempunyai tanggung jawab, berintegritas, mematuhi kode dosen pelaksana, sanggup melaksanakan tugas sesuai kompetensi dengan bidang keahliannya.		
2.	≥20% Pelaksana kegiatan PkM Memiliki Jabatan akademik asisten ahli.		
3.	>60% Pelaksana kegiatan PkM Memiliki Jabatan akademik lektor-Lektor Kepala.	Ketersediaan bukti pelaksana PkM memiliki kualifikasi jabatan akademik asisten ahli yang diketahui atau disetujui oleh ketua LP2M.	4. LP2M melaksanakan pelatihan metodologi PkM untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM

5.2. KOMPETENSI PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | >60% Pelaksana kegiatan PkM Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian. | 1) Adanya kesesuaian antara objek pengabdian dan bidang keilmuan yang dimiliki oleh pelaksana PkM.
2) Pelaksana PkM reguler memiliki bukti telah melakukan pengabdian sebelumnya dan atau karya pengabdian yang bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat | LP2M melaksanakan pelatihan metodologi PkM untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM. |
| 2. | Pelaksana PkM menghasilkan karya/hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan PkM/jurnal/buku/HaKI | | |

5.3. DOSEN DALAM PKM SESUAI DENGAN BIDANGNYA DAN MELIBATKAN MAHASISWA

- | | | | |
|----|---|---|-----------------------------------|
| 1. | 1) Pelaksana PkM yang terlibat harus sesuai dengan kompetensi | 1. Adanya bukti SK keterlibatan mahasiswa dalam pengabdian yang | 1. Membentuk UKM terkait kegiatan |
|----|---|---|-----------------------------------|

<p>dan bidang keahliannya.</p> <p>2) Pelaksana PkM dalam penyelenggaraan kegiatan PkM melibatkan mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap tahun.</p>	<p>dilaksanakan oleh dosen.</p> <p>2. Adanya bukti sertifikat lulus kompetensi keagamaan dari Fakultas dan LP2M</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat di setiap Fakultas.</p> <p>2. LP2M memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang terlibat berupa sertifikat yang memiliki nilai SKK</p> <p>3. LP2M membentuk kelompok Pelaksana PkM di tingkat universitas</p>
---	---	---

5.4. TATALAKSANA STANDAR PELAKSANA PKM

<p>1. Penentuan kuota jumlah pengabdian oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap kategori pelaksana sesuai dengan anggaran yang ada.</p> <p>2. Peningkatkan kualitas kemampuan calon pelaksana sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Penentuan besar anggaran dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kategori Pengabdian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.</p>	<p>Adanya proposal jumlah kuota pengabdian kepada masyarakat untuk setiap kategori pelaksana</p> <p>Terlaksananya uji kompetensi keterampilan keagamaan oleh LP2M minimal 1 tahun sekali</p> <p>Adanya perencanaan anggaran yang dialokasikan oleh ketua LP2M sesuai dengan kategori bidang pengabdian</p>	<p>Membuat proposal tentang besaran jumlah kuota bagi setiap kategori pelaksana pengabdian</p> <p>Pelaksanaan program uji kompetensi keterampilan keagamaan oleh LP2M</p> <p>1. Ketua LP2M mengadakan workshop tentang penganggaran.</p> <p>2. Ketua LP2M membuat perencanaan anggaran yang besarannya sesuai dengan bidang pengabdian dengan mengacu pada anggaran dan peraturan yang ada</p>
--	--	--

4. Pemberian fasilitas oleh Ketua LP2M kepada pelaksana individu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- Tersedia kebijakan Pemberian fasilitas kepada pelaksana individu
- Sosialisasi dan terpublikasikan pada web LP2M

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
6.1. SARANA DAN PRASARANA PKM UNTUK AREA SASARAN KEGIATAN			
1.	Perguruan tinggi memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI	Tersedianya prasarana dan sarana untuk menfasilitasi PkM yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan area sasaran kegiatan, seperti unit mobil pelayanan, klinik pelayanan, lab. School, dan lainnya.	1. Penyusunan kebijakan perencanaan mengenai pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
2.	Universitas menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian sesuai dengan karakteristik PkM	Tersedianya sarana dan prasarana Pengabdian sesuai dengan karakteristik PkM	2. Penyusunan program berkesinambungan untuk pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
3.	Universitas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian secara berkala tiap tahun.	Adanya jaminan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengabdian secara berkala tiap tahun.	
4.	Pelaksana mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.	Ketersediaan SOP pengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian	
6.2. KESESUAIAN DAN TUJUAN PENGGUNAAN BERBAGAI RUANGAN (PRASARANA)			
1.	1) Berbagai ruangan dirancang sesuai dengan penggunaan yang khusus. 2) Ruangan sesuai dengan tujuan penggunaannya. 3) Ada berbagai laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. 4) Bentuk/disain ruangan yang sesuai kegunaannya. 5) Lokasi mudah dicapai	Tersedia Intruksi Kerja penggunaan laboratorium khusus yang memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.	3. Pelaporan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam

6.3. SUASANA RUANGAN

1. Suasana ruangan harus:
 - 1) Menyenangkan
 - 2) Pembagian ruangan baik.
 - 3) Suhu ruangan dan ventilasi baik.
 - 4) Penerangan baik.

rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

6.4. PERABOTAN KANTOR DAN RUANG KELAS (MEJA, KURSI, PAPAN TULIS DAN ALAT BANTU KEGIATAN LAINNYA)

1. 1) Tempat duduk nyaman. Perlengkapan kantor/ruangan modern.
- 2) Peralatan kuliah/pembelajaran (LCD, proyektor slide, proyektor film, papan tulis putih dan hitam) cukup dan baik
1. Ada kebijakan perencanaan mengenai pemenuhan kebutuhan perabotan untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
2. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan perabotan.

6.5. PERPUSTAKAAN (BAHAN PUSTAKA : BUKU, JURNAL, DSB)

2. 1) Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya.
- 2) Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.
- 3) Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup.
- 4) Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan.
- 5) Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan.
- 6) Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang baik. Jam buka 12 jam.
- 7) Pemeliharaan perpustakaan baik.
- 8) Pelayanan perpustakaan modern dan efisien.
- 9) Mempunyai banyak komputer yang dihubungkan dengan jaringan internet
1. Ada kebijaksanaan perencanaan mengenai pemenuhan kebutuhan bahan pustaka untuk masa kini dan di masa yang akan datang.
2. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka.

6.6. PERALATAN LABORATORIUM DAN STUDIO

1. 1) Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi mahasiswa/ kegiatan PkM dan sering dimanfaatkan oleh program studi atau instansi lain.
- 2) Ada model untuk kebutuhan dana di masa yang akan datang.
- 3) Tersedia dana untuk pemeliharaan dan upgrading peralatan.

6.7. FASILITAS KOMPUTER

1. 1) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang cukup mutakhir, dan ditempatkan dalam ruang khusus komputer.
- 2) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya selama 24 jam.
- 3) Ruang komputer modern dan luas, menyenangkan.
- 4) Pemakaian komputer sangat tinggi, rata-rata > 8 per hari. Ada kebijaksanaan pemeliharaan dan modernisasi komputer yang didukung dananya.
- 5) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet.

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
7.1. PENETAPAN PERATURAN, PANDUAN, DAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PKM			
1.	Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas .	Tersedianya panduan tentang pembuatan usulan pengabdian, panduan tentang seleksi usulan pengabdian, panduan tentang pelaksanaan pengabdian, panduan tentang monitoring dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LP2M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. LP2M melakukan sosialisasi kepada sivitas akademika

evaluasi (monev), serta panduan tentang penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

terkait pedoman pengabdian kepada masyarakat.

7.2. PENETAPAN PERENCANAAN STRATEGIS PKM YANG SELARAS DENGAN RENSTRA UNIVERSITAS

1. Tersedia dokumen Rencana Induk dan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Adanya program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana strategis institusi.	5% Pelaksanaan PkM berbasis riset dosen	1. LP2M menyusun rencana program pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . 2. LP2M melakukan sosialisasi rencana program pengabdian kepada masyarakat ke sivitas akademika.
2. Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksanaan pelatihan /Workshop minimal 1 kali tiap semester	LP2M melakukan pelatihan/workshop, menyediakan dana, dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Adanya fasilitas pelaksanaan kegiatan PkM	Menyediakan dana untuk kegiatan PkM minimal 3 juta perdosen pertahun	LP2M mendorong dan memberikan dana dan fasilitas pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa.

7.3. STANDAR MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PKM

1.	Adanya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal satu kali dalam tiap semester	1. LP2M melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. 2. LP2M menyampaikan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara berkala kepada Rektor.
----	---	--	---

7.4. STANDAR DAN PROSEDUR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

1. Penetapan kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.	LP2M melakukan evaluasi dan penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta memberikan penghargaan kepada pelaksana
--	--

pengabdian kepada masyarakat yang dinilai berprestasi.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN STRATEGI PENCAPAIAN

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Strategi
8.1. STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN			
1.	Universitas menyediakan dana Pengabdian minimal 1,5 juta perdosen pertahun.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengalokasikan dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku	1) Rektor melalui LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan PkM. 2) Sosialisasi pedoman
8.2. PEMBIAYAAN MANAJEMEN PENGABDIAN			
1.	Adanya dana manajemen di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis pembiayaan manajemen PkM	Penyusunan dan sosialisasi SOP
2.	Universitas menyediakan dana manajemen Pengabdian untuk minimal 250 ribu bagi 20% dosen setiap tahunnya		
8.3. PENDANAAN PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA			
1.	Universitas menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk minimal 300 ribu bagi 10% dosen setiap tahunnya.	Tersedianya SOP atau petunjuk teknis Pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM.	1) Penyusunan dan sosialisasi SOP 2) Penganggaran dana peningkatan kapasitas untuk semua peneliti.
2.	Adanya dana peningkatan kapasitas pelaksana di institusi untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat > Rp 50 Juta setiap tahun.		
8.4. PENDANAAN INSENTIF PUBLIKASI			
1.	Universitas menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya	Pemberian reward bagi Pelaksana PkM yang mempublikasikan hasil PkM di jurnal nasional dan atau PkM yang monumental	Penganggaran dana Pemberian reward bagi Pelaksana PkM
8.5. PENDANAAN HAKI			
1.	Universitas menyediakan dana perolehan HAKI bagi 2 dosen		Penganggaran HAKI dan

- perprodi setiap tahun
2. Universitas memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional yang berkaitan dengan hasil pengabdian dan atau peningkatan kapasitas pengabdian
- konferensi/ seminar tingkat nasional/ internasional hasil PkM

8.6. STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN MASYARAKAT

- | | | |
|---|--|--------------------------------|
| 1. Persentase jumlah Pelaksana kerjasama kegiatan PkM dengan instansi di DALAM negeri >10% dari jumlah dosen tetap. | Tersedianya SOP atau petunjuk teknis kerjasama kegiatan PkM dengan instansi di dalam negeri. | Penyusunan dan sosialisasi SOP |
| 2. Persentase rata-rata jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan DALAM negeri >5% | | |

D. Rencana Strategis Pengelolaan J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

Rencana Strategis Pengelolaan J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) menuju Jurnal Terakreditasi SINTA 2 Dan Menuju Jurnal bereputasi Internasional (2020-2030)

A. Latar Belakang

Setiap universitas pasti berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Salah satu parameter kinerja universitas adalah produktivitas publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal. Semakin banyak artikel jurnal yang diterbitkan maka semakin baik pula kinerja dari suatu universitas, dan sebaliknya semakin sedikit publikasi ilmiah suatu universitas menandakan kinerjanya kurang baik.

Reputasi perguruan tinggi selain dihitung dari kuantitas publikasi ilmiahnya, juga dinilai dari kualitas dari lembaga publikasinya. Kualitas lembaga publikasi jurnal di Indonesia dinilai dengan standar akreditasi jurnal ilmiah yang dikelola oleh Dirjen DIKTI. Dengan adanya standar penilaian tersebut kemudian menjadi pedoman bagi pengelola jurnal untuk menjaga dan meningkatkan kualitas publikasinya. Setiap jurnal yang sudah merasa memenuhi standar bisa mendaftarkan jurnalnya untuk diakreditasi oleh DIKTI. Setelah proses pendaftaran dan penilaian, maka Ristekdikti akan mengumumkan peringkat suatu jurnal melalui web ARJUNA dan SINTA. Tingkat akreditasi jurnal ada 6 tingkatan mulai dari SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3, SINTA 4, SINTA 5 dan SINTA 6.

Masih banyak peneliti baik dari untuk dosen ataupun mahasiswa yang kesulitan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya di penerbit jurnal yang berkualitas. Hal ini dikarenakan jumlah penerbit jurnal yang ada di Indonesia masih terbatas. Selain itu jumlah artikel yang diterbitkan dalam satu edisi juga dibatasi jumlah dan temanya. Proses review artikel juga dianggap sulit oleh sebagian peneliti khususnya peneliti pemula. Hal ini menjadi suatu peluang sekaligus tantangan sendiri bagi pengelola jurnal.

J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) merupakan jurnal ilmiah yang bernaung di dalam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. J-MPI melakukan penerbitan artikel penelitian

dan kajian ilmiah dengan fokus dan *scope* terkait Manajemen Pendidikan Islam. J-MPI menerbitkan secara berkala setiap 6 bulan sekali yaitu terbit di bulan Juni dan bulan Desember sejak tahun 2016. Pengelolaan dan penerbitan J-MPI menggunakan Open Journal System (OJS) dengan nomer Print ISSN: 2477-4987 dan nomer Online ISSN : 2477-6467.

Pengelola J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) meningkatkan kompetensi demi peningkatan kualitas jurnal melalui kegiatan pelatihan dan workshop pengelolaan jurnal serta belajar tentang prosedur penerbitan jurnal. Pada periode awal berdiri, pengelola J-MPI belum memenuhi kebutuhan tim editor, reviewer, maupun staf bidang IT untuk mengelola penerbitannya. Namun dengan semangat belajar pengelola, J-MPI mampu menjawab tantangan dalam meningkatkan kapabilitas personal tim. Pada Juni 2016 J-MPI berhasil menerbitkan jurnal volume 1 nomor 1. Kemudian pada tahun 2017, pengelola J-MPI mendaftarkan jurnal untuk indeksasi di tingkat nasional maupun internasional, yaitu: Moraref, Google Scholar, Garuda, Dimensions, Crossref (DOI) dan SINTA. Pada bulan Mei 2019, JMPI sudah mendapatkan Akreditasi dari lembaga Akreditasi Jurnal Nasional (ARJUNA) RISTEKDIKTI dengan peringkat SINTA 5.

J-MPI masih berada pada posisi pengembangan yang masih memerlukan pembenahan dalam rangka meningkatkan kualitas publikasinya meskipun telah memperoleh akreditasi nasional (SINTA 5). Banyak catatan kritik dan saran dari asesor jurnal nasional yang perlu untuk ditindaklanjuti. Selain itu, banyak penulis dan reviewer yang mendorong agar J-MPI bisa mendapatkan peringkat akreditasi yang lebih tinggi serta bisa terindeks pada lembaga indeksasi jurnal internasional seperti DOAJ ataupun Scopus. Tim editor masih harus belajar tentang banyak hal dalam pengelolaan jurnal ilmiah agar kualitasnya bisa meningkat, seperti cara mendapatkan jumlah reviewer yang pakar, mengelola penerbitan, mendapatkan artikel ilmiah dari penulis, distribusi jurnal, pengelolaan OJS, hingga cara agar bisa terindeks oleh lembaga pengindeks internasional yang bereputasi. Untuk itu, Tim editor J-MPI membuat rencana strategis pengelolaan J-MPI untuk meningkatkan kualitas publikasi jurnal ilmiah.

B. Profil Jurnal

1. Nama Jurnal

J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)

2. Cakupan Keilmuan Jurnal

J-MPI Jurnal Manajemen Pendidikan Islam berfokus pada publikasi hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan bidang:

- a. Manajemen Pendidikan Islam,
- b. Kepemimpinan pendidikan Islam,
- c. Manajemen sekolah,
- d. Supervisi sekolah dan
- e. Manajemen pengetahuan yang mencakup penyelidikan textual dan investigasi lapangan dengan berbagai perspektif Pendidikan, filsafat, sejarah, teologi, sosiologi, antropologi, ilmu politik terkait manajemen pendidikan islam dan lain-lain.

3. Visi dan Misi

Visi: Menjadi pusat publikasi ilmiah dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam yang berkualitas baik skala nasional dan internasional

Misi:

- a. Mengelola publikasi ilmiah dengan profesional
- b. Meningkatkan kualitas penulisan dan bobot karya ilmiah sesuai standar akreditasi Nasional
- c. Mewujudkan publikasi ilmiah yang bereputasi internasional
- d. Mewujudkan pusat pendokumentasian publikasi ilmiah dalam bentuk e-jurnal yang terakreditasi atau yang bereputasi internasional

4. Nomor ISSN

Cetak/Printed : 2477-4987

Online/Elektronik: : 2477-6467

5. Bahasa

J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

6. Journal Policy

Setiap artikel yang *disubmit* ke J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) akan dicek kesesuaian dengan guideline oleh editor. Selanjutnya akan direview oleh reviewer yang kompeten sesuai dengan bidang keilmuannya melalui OJS. Artikel ilmiah harus memiliki beberapa kriteria untuk lolos terbit, antara lain: artikel merupakan hasil penelitian yang memiliki *novelty* atau kajian konseptual di bidang Manajemen Pendidikan Islam, artikel bebas dari plagiasi dengan tingkat similiarity maksimal 20%, memiliki teori dan data yang akurat, memberikan pembahasan yang ilmiah serta memiliki bukti yang kuat untuk kesimpulannya.

7. Daftar Editorial Team

Editor in Chief

Walid Fajar Antariksa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Editor

1. Abdul Fattah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Fantika Febry Puspitasari, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Nuril Mufidah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. M. Irfan Islamy, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin
5. Ence Surachman, Universitas Negeri Malang

Reviewer

1. Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
2. Dr. Nur Ali, M.Pd. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
3. Dr. Mulyono, M.A. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
4. Dr. M. Fahim Tharaba, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
5. Dr. Muhammad Walid, MA. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
6. Dr. H. Muhammad In'am Esha, M.Ag (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
7. Dr. Muh. Hambali, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
8. Dr. Alfi Haris Wanto (Universitas Brawijaya)
9. Oscar Radyan Danar, (Universitas Brawijaya)
10. Dr. Novan Ardy Wiyani, (IAIN Purwokerto)
11. Dr. Hasan Baharun, M.Pd. (Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo)

12. Dr. Tuti Andriani, M.Pd (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau)
13. Dr. Zainal Arifin, M.Si (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta)
14. Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I (IAIN Tulungagung)
15. Dr. Iwan Gunawan (Universitas Negeri Malang)

8. Checker Plagiarsm

Pengelola Jurnal merekomendasikan pada penulis untuk menggunakan checker plagiarism Turnitin. Hanya saja pengelola J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) mengalami kendala terkait terbatasnya artikel yang memenuhi kriteria maksimal 20% cek Turnitin.

C. Analisis SWOT J-MPI

J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) memiliki beberapa kelebihan dan beberapa kelemahan dari sisi internal. Sedangkan dari sisi eksternal memiliki peluang dan ancaman. Kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman tersebut kemudian dianalisis dalam analisis SWOT berikut:

Strength (Kekuatan)

1. J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) memiliki tim pengelola jurnal yang memiliki semangat dan komitmen untuk mengembangkan kualitas jurnal.
2. Memiliki reviewer yang kompeten di tingkat nasional.
3. J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam) sudah terakreditasi **SINTA 5**

Opportunities (Peluang)

1. Adanya jaringan organisasi profesi ilmiah (PPMPI) di tingkat nasional
2. Perkembangan bidang manajemen pendidikan islam dan penelitian tentangnya semakin pesat memerlukan sarana publikasi yang bereputasi
3. Banyaknya pakar di bidang manajemen pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri (memiliki ID scopus).

Weaknesses (Kelemahan)

1. J-MPI belum memiliki kerjasama resmi dengan organisasi profesi ilmiah tingkat nasional atau internasional
2. Masih minim reviewer yang memiliki ID Scopus
3. Terbatasnya biaya operasional
4. Belum terindeks lembaga indeksasi internasional yang bereputasi.

Threats (Tantangan)

1. Terdapat beberapa jurnal lain dengan fokus dan scope yang sama di lembaga lain yang sudah terakreditasi di tingkat nasional maupun internasional.
2. Banyaknya penulis atau peneliti yang belum mengetahui tentang proses mempublikasikan hasil penelitiannya.

D. Target

Pengelola J-MPI bermaksud mengajukan bantuan peningkatan kualitas jurnal ini dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah J-MPI (Jurnal

Manajemen Pendidikan Islam) sehingga mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan Islam. J-MPI juga bermaksud untuk meningkatkan peringkat akreditasinya dari SINTA 5 menuju ke SINTA 1 dan terindeks di lembaga pengindeks bereputasi internasional. Adapun target peningkatan kualitas Jurnal pada setiap tahunnya adalah sesuai dengan tabel berikut :

Tahun	Target
2020	Terakreditasi SINTA 3
2021	Terakreditasi SINTA 3
2022	Terakreditasi SINTA 2
2023	Terakreditasi SINTA 2
2024	Terakreditasi SINTA 2
2025	Terakreditasi SINTA 1
2026	Terakreditasi SINTA 1
2027	Terakreditasi SINTA 1
2028	Terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus
2029	Terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus
2030	Terakreditasi SINTA 1 dan terindeks Scopus

E. Strategi pencapaian

Agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan analisis SWOT maka tim editor J-MPI meneapkan strategi pencapaian untuk 5 tahun pertama adalah sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kapasitas tim editorial yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan jurnal secara berkala.
2. Merancang proses terbitan dengan baik agar dapat memperoleh akreditasi nasional
3. Melakukan kerjasama dengan pengelola jurnal lain yang telah terakdreditasi.
4. Menjalin konsolidasi dan sinergi antar editor agar dapat mencapai jurnal terakreditasi.
5. Menjalin kerja sama untuk melakukan review tulisan-tulisan yang masuk pada JPIPS.
6. Melibatkan Rumah Jurnal FITK, UIN untuk melakukan inovasi dan regulasi proses berjalannya sistem OJS.
7. Memanfaatkan secara optimal seluruh proses OJS untuk J-MPI
8. Melakukan kerjasama dengan tim editorial jurnal lain dalam rangka pengembangan dan terakreditasinya J-MPI.
9. Melakukan kerjasama dengan pakar/tim editorial jurnal lain yang telah terakreditasi Sinta, untuk merumuskan dan mengembangkan J-MPI agar SINTA dan melakukan penambahan indeksing.

Sedangkan rencana pencapaian untuk than 5 tahun berikutnya adalah dengan meningkatkan program internasionalisasi pengelolaan jurnal dengan meningkatkan standar pengelolaan dan meningkatkan kerj sama internasional.

BAB VI

KESIMPULAN

Model dan implementasi manajemen pengembangan Prospektus Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), yaitu meliputi: (1) Sejarah singkat lembaga/prodi; (2) Program dan spesifikasi lembaga/prodi; (3) Tujuan lembaga/prodi; (4) Bidang kajian lembaga/prodi; (5) Nilai keunggulan yang ditawarkan lembaga/prodi; (6) Kegiatan dan prospek lembaga/prodi; (7) Rekam jejak SDM lembaga/prodi; (8) Surat ijin operasional lembaga/prodi; (9) Prestasi lembaga/prodi; (10) Lembaga kerjasama lembaga/prodi.

Penelitian ini menghasilkan model Perencanaan Strategik Pengembangan Program studi MPI Menuju *World Class University*. Model ini memuat berbagai hasil analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal serta menyusun kerangka kebijakan serta kebijakan strategis pengembangan Program studi MPI menuju *World Class University*. Prospektus Prodi MPI mewujudkan WCU pada akhirnya bermuara untuk mewujudkan cita-cita besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar dapat melahirkan Profil Ulul Albab yaitu Ulama' yang Intelek Professional dan atau Intelek Professional yang ulama' yang mampu berdaya saing di level internasional serta mewujudkan kampus sebagai Pusat Unggulan (*Centre of Excellence*) sekaligus Pusat Peradaban Islam (*Centre of Islamic Civilization*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib, Juyuf Mudzakir, 2006, “*Ilmu Pendidikan Islam*”, Kencana, Jakarta: Kencana.
- Abuddin Nata. Dkk. ‘*Integrasi Ilmu Agama & Ilmu Umum*’. Jakarta: Rajawali Press. 2005.
- Amin Abdullah, “*Studi Agama Normativitas dan Historisitas*”, (Yogyakarta; LKiS, 1989) cet., I.
- Armenakis A. A., & Harris, S. G. (2002). “*Crafting a change message to create transformational readiness*”. Journal of Organizational Change Management, 15(2).
- Ashari, M. (2020). “*Action Plan Wujudkan Kampus Merdeka*”. Retrieved March 14, 2020, from Jawa Pos website: <https://www.jawapos.com/opini/05/02/2020/action-plan-wujudkan-kampus-merdeka/>
- Azizah Herawati Fikrah, Vol. 3, No. 1, Juni 2015 123 “*Kontekstualisasi Konsep Ulul Albab Di Era Sekarang*” Azizah Herawati Penyuluh Agama Ahli Muda Magelang. Azizah_hera@yahoo.co.id .
- Bauer, T. N., & Erdorgan, B. (2012). “*An Introduction to Organizational Behavior*”. Creative Commons by-ncsa/3.0/ license. Diunduh dari <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
- Brooks, B.D. and F.G.Goble. “*The Case for Character Education: The Role of the School in Teaching Values and Virtues*”. Studios 4 Productions.
- Charles, “*Integrasi Ilmu dengan Agama untuk Mengangkat Harga Diri Pelajar Muslim*”, Makalah.
- Deny Setiawan, “*Pengembangan Model Kurikulum Berorientasi KKNI di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*”. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 9 (2) (2017): 112-120. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, Indonesia.
- Dinn Wahyudin, “*Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Profesi Guru (Studi Kasus Di Universitas Pendidikan Indonesia)*”, JURNAL KEPENDIDIKAN, Volume 46, Nomor 2, November 2016.
- Denzen, Norman K, 1989. “*The Research Art: A Theoretical Introductions to Sociological Methods*”, Enflewood Cliffs N.J: Prentice Hall.
- Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S., 1994. “*Hanbook of Qualitative Research*”. Thousand Oaks, Clifornia: SAGE Publications, Inc.
- Goetz, J.P., & LeCompte, M.D., 1981. “*Ethnographic Research and the Problem of Data Reduction*”. *Anthropology and Education Quarterly*.

- Halimah Azzahra, “*Manajemen Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*”, Makalah, Mei 27, 2016.
- H. B. Hamdani Ali, “*Filsafat Pendidikan*”, (Yogyakarta; Kota Kembang, 1993).
- Hamdan Husein Batubara, “*Metode Dan Model Integrasi Sains Dan Islam Pada Perguruan Tinggi Agama Islam*”, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin.
- Huzni Thoyyar. “*Model-Model Integrasi Ilmu Dan Upaya Membangun Landasan Keilmuan Islam. Survey Literatur Terhadap Pemikiran Islam Kontemporer*”. Makalah. tidak dipublikasikan.
- Imam Munandar, “*Integrasi Dalam Study Islam*”, dalam *Makalah*, tidak dipublikasikan.
- Kemdikbud. (2020). “*Merdeka belajar: Kampus Merdeka*”. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/sv8wq>
- Koentjaraningrat. 1989. “*Metode-metode Penelitian Masyarakat*”. Jakarta: Gramedia.
- M. Fahim Tharaba, “*Kampus Islam Sebagai Agent of Change*”, Ulul Albab Volume 12, No.1 Tahun 2011.
- M. Fahim Tharaba, 2016, “*Kepemimpinan Pendidikan Islam (Islamic Education Leadership)*”, Dreamlenterabuana, Malang.
- M. Fahim Tharaba, 2017, „*Pengembangan Kurikulum PAI*“, Dreamlenterabuana, Malang.
- M. Zainuddin, “*Menuju Integrasi Ilmu Dan Agama*”, Selasa, 12 November 2013. in Wakil Rektor I . 4641 views. Gema.
- Mahdi Ghulsyani, “*Filsafat-Sains Menurut Al-Qur'an*”, Diterjemahkan oleh Agus Efendi (Bandung: Mizan, 2001).
- “*Mengulas Balik: Kampus Merdeka*”, [Fact News, May 1, 2020.](#)
- Misbahul Munir, Muhammad Sulhan, Fitriyah, 2015, “*Model Pengembangan Kurikulum Manajemen: Studi Pada Kurikulum Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Singapore Institute of Management (Sim, Singapore), dan School Of Management (SOM Pada Universiti Sains Malaysia (USM), Penang Malaysia*”.
- Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Moh. Ilyas Naufal, dkk., 2014, Makalah, “*Manajemen Pengembangan Kurikulum*”, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Intstitut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika).
- Mudjia Raharjo, “*Islamisasi Ilmu Pengetahuan Sosiologi Islam Sebagai Sebuah Tawaran*” dalam buku *Quo Vadis Pendidikan Islam*, (ed.) Mudjia Raharjo, (Malang; Cendikia Paramulya, 2002).

- Muhammad Cholil Nafis, “*Meretas Dikotomi antara Ilmu Agama dengan Ilmu Umum*”, *Makalah*, tidak dipublikasikan.
- Mulyadhi, “Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis” dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN*, (Jakarta, Depag, 2000).
- Mustari, “*Moderasi Beragama dan Diplomasi Kebudayaan*”, Webinar Internasional PPIM UIN Jakarta - Convey Indonesia. Den Haag – Jakarta, 4 September 2020.
- Nanat Fatah Natsir, “*Implementasi Paradigma Wahyu Memandu Ilmu Pada Pembidangan Ilmu-Ilmu Keislaman*”, *Makalah*, yang dipresentasikan dalam Lokakarya Konsorsium Bidang Ilmu.
- Peter Connolly (ed.), “*Aneka Pendekatan Studi Agama*”, (Yogyakarta; LKiS, 2002), cet. I.
- Prodjo, W. A. (2020). “*4 Alasan Nadiem Makarim Mengeluarkan Kebijakan Kampus Merdeka*”, Kompas.com. Retrieved March 14, 2020, from Kompas website: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/01/25/20283891/4-alasan-nadiem-makarim-mengeluarkan-kebijakan-kampus-merdeka?page=all#page3>
- R.C, Bogdan, & S.K. Biklen, 1982. “*Qualitative Research Education: an Introduction to Theory and Methode*”, London, Allin & Bacon, Inc.
- Sawyer, J. E., Houlette, M. A., & Yeagley, E. L. (2006). “*Decision performance and diversity structure: Comparing faultlines in convergent, crosscut, and racially homogeneous groups*”. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*.
- Sukidin, Basrowi, 2002. ”*Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*”, Surabaya: Insan Cendekia.
- Turmudi, dkk, “*Islam, Sains dan Teknologi Menggagas Bangunan Keilmuan Fakultas Sains dan Teknologi Islami Masa Depan*”, (Malang: UIN Maliki Press, 2006).
- www. Unesa.ac.id., “*Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar di Kampus Merdeka Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*”, Unesa. 2020.